



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUKU DATA & INFORMASI PENDIDIKAN



**DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025**

PANTUN

JIKA NYOYA DAN TUAN DIMULIAKAN
BANYAK SENYUM BANYAK SEDEKAH
JIKA DATA DAN INFORMASI DIHADIRKAN
SMOGA KEBIJAKAN MENJADI BERKAH

JIKA HENDAK MENYUSUN BATA
AMBIL RAPIKAN BENANG SEUTAS
JIKA RENCANA DISUSUN BERBASIS DATA
TENTU PENDIDIKAN AKAN BERKUALITAS

PERGI MENGAJI PAKAI SEPEDA
DIPOMPA BANNYA JANGAN KEMPES
INFORMASI DIKAJI UNTUK RENJA
SMOGA PERENCANAAN LANCAR DAN SUKSES

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah merupakan kata yang sudah seharusnya kita haturkan sebagai seorang manusia yang telah menerima banyak nikmat yang telah Allah SWT berikan. Penyusunan data dan informasi ini merupakan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadirkan data dan informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh para pengambil kebijakan.

Penyusunan data dan informasi pendidikan Tahun 2025 ini membutuhkan usaha yang tidak kecil. Segala sumberdaya dikerahkan untuk melaksanakan tahapan-tahapannya. Tahap awal dimulai dengan mengumpulkan dan mengkoordinasikan tentang urgensi data dan informasi. Selanjutnya dibentuk tim penyusun dan tim teknis pengumpul data. Mencari dan merilis daftar data lalu kemudian menyepakati daftar data tersebut. Tahapan penting berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis dan menyajikan data dan informasi yang saat ini bisa kita baca.

Penyusunan data dan informasi perencanaan ini tentu memiliki kendala dan hambatan, namun semua itu dapat diatasi dengan upaya terbaik sesuai dengan kemampuan. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pegawai pada bagian perencanaan yang telah mensukseskan penyusunan data dan informasi ini, Semoga Allah SWT membalas hasil kerja keras kita semua. Semoga Buku Data dan Informasi Perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak (*Aamiin Ya rabbal Alamin*).

Pangkalpinang, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

SAIPUL BAKHRI, S.Pd., M.M
NIP 197403042005011013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Tujuan.....	2
1.3.Isu-Isu Strategis.....	2
1.4.Dasar Hukum.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN.....	5
2.1.Tugas pokok dan Fungsi.....	5
2.2.Program dan Kegiatan.....	8
2.3.Tantangan dan Peluang Dinas Pendidikan.....	8
BAB III DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN.....	10
3.1.Indeks Pembangunan Manusia.....	10
3.2.Data Makro Pendidikan.....	14
3.3 Data Sektoral Pendidikan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	216

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar. 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
----	-------------	---	---

DAFTAR DIAGRAM

1.	Diagram. 3.1.1	Indeks Pembangunan manusia Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	11
2.	Diagram. 3.1.2	Harapan lama Sekolah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2025.....	12
3.	Diagram. 3.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2025.....	13
4.	Diagram. 3.2.1	APK SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024.....	15
5.	Diagram. 3.2.2	APK Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	17
6.	Diagram. 3.2.3	APK SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024.....	18
7.	Diagram. 3.2.4	APS Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	19
8.	Diagram 3.2.5	APM SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024.....	21
9.	Diagram 3.2.6	APM Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	22
10.	Diagram 3.2.7	Rata-rata Nilai Kompetensi Literasi Siswa SMA, SMK dan SLB Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	23
11.	Diagram 3.2.8	Rata-rata Nilai Kompetensi Numerasi Siswa SMA, SMK dan SLB Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024.....	24
12.	Diagram 3.2.9	Lulusan Sekolah Menengah Bekerja dan Berwirausaha Selaras dengan Keahlian.....	25
13.	Diagram 3.2.10	Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja Sesuai Kompetensi Keahlian.....	26
14.	Diagram 3.2.11	Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja dan Melanjutkan Studi.....	27
15.	Diagram 3.2.12	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK.....	28
16.	Diagram 3.3.1	Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB.....	29
17.	Diagram 3.3.2	Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SMA.....	31
18.	Diagram 3.3.3	Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SMK.....	32

19.	Diagram 3.3.4	Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SLB.....	33
20.	Diagram 3.3.5	Sebaran Jumlah Siswa SMA, SMK dan SLB.....	35
21.	Diagram 3.3.6	Sebaran Jumlah Siswa SMA di Provinsi Kep. Bangka Belitung...	36
22.	Diagram 3.3.7	Sebaran Jumlah Siswa SMA Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender.....	37
23.	Diagram 3.3.8	Sebaran Jumlah Siswa SMK di Provinsi Kep. Bangka Belitung...	38
24.	Diagram 3.3.9	Sebaran Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender.....	39
25.	Diagram 3.3.10	Sebaran Jumlah Siswa SLB di Provinsi Kep. Bangka Belitung....	40
26.	Diagram 3.3.11	Sebaran Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender.....	41
27.	Diagram 3.3.12	Sebaran Total Anak Tidak Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	42
28.	Diagram 3.3.13	Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah.....	42
29.	Diagram 3.3.14	Proporsi Siswa yang Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah.....	43
30.	Diagram 3.3.15	Sebaran Siswa Lulus Tidak Melanjutkan Pada Jenjang Kelas 6 dan Kelas 9.....	43
31.	Diagram 3.3.16	Sebaran Penduduk yang Belum Pernah Bersekolah.....	44
32.	Diagram 3.3.17	Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan (Swasta dan Negeri) Tahun 2025.....	45
33.	Diagram 3.3.18	Sebaran Guru dengan Pendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK dan SLB.....	46
34.	Diagram 3.3.19	Sebaran Tendik dengan Pendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK dan SLB.....	47
35.	Diagram 3.3.20	Sebaran Guru dengan Pendidikan S1 di SMA, SMK dan SLB.....	48
36.	Diagram 3.3.21	Sebaran Tendik dengan Pendidikan S1 di SMA, SMK dan SLB...	49
37.	Diagram 3.3.22	Sebaran Guru dengan Pendidikan S2 di SMA, SMK dan SLB.....	50

38.	Diagram 3.3.23	Sebaran Tendik dengan Pendidikan S2 di SMA, SMK dan SLB...	51
39.	Diagram 3.3.24	Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian.....	53
40.	Diagram 3.3.25	Status Guru SMA, SMK dan SLB dengan Pendidikan SMA/DI-DIII.....	55
41.	Diagram 3.3.26	Status Guru SMA, SMK dan SLB dengan Pendidikan S1.....	56
42.	Diagram 3.3.27	Status Guru SMA, SMK dan SLB dengan Pendidikan S2.....	57
43.	Diagram 3.3.28	Sebaran Jumlah Ruang Kelas pada SMA Negeri dan Swasta.....	59
44.	Diagram 3.3.29	Sebaran Kondisi Ruang Kelas pada SMK Negeri dan Swasta.....	61
45.	Diagram 3.3.30	Sebaran Jumlah Ruang Kelas pada Satuan Pendidikan SLB.....	63
46.	Diagram 3.3.31	Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMA.....	64
47.	Diagram 3.3.32	Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMK.....	65
48.	Diagram 3.3.33	Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SLB.....	66
49.	Diagram 3.3.34	Sebaran Jumlah Ruang Lab Komputer pada Satuan Pendidikan SMA.....	68
50.	Diagram 3.3.35	Sebaran Jumlah Ruang Lab Komputer pada Satuan Pendidikan SMK.....	69
51.	Diagram 3.3.36	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer pada Satuan Pendidikan SLB.....	70
52.	Diagram 3.3.37	Jumlah Ruang Kepsek pada Satuan Pendidikan SMA.....	71
53.	Diagram 3.3.38	Jumlah Ruang Kepsek pada Satuan Pendidikan SMK.....	72
54.	Diagram 3.3.39	Jumlah Ruang Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan SLB.....	73
55.	Diagram 3.3.40	Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SMA.....	74
56.	Diagram 3.3.41	Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SMK.....	75

57.	Diagram 3.3.42	Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SLB.....	76
58.	Diagram 3.3.43	Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SMA.....	78
59.	Diagram 3.3.44	Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SMA.....	79
60.	Diagram 3.3.45	Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SMK.....	80
61.	Diagram 3.3.46	Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SMK.....	81
62.	Diagram 3.3.47	Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SLB.....	82
63.	Diagram 3.3.48	Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SLB.....	83
64.	Diagram 3.3.49	Sebaran WC Siswa Laki-laki pada Satpen SMA.....	84
65.	Diagram 3.3.50	Sebaran WC Siswa Perempuan pada Satpen SMA.....	85
66.	Diagram 3.3.51	Sebaran WC Siswa Laki-laki pada Satpen SMK.....	86
67.	Diagram 3.3.52	Sebaran WC Siswa Perempuan pada Satpen SMK.....	87
68.	Diagram 3.3.53	Sebaran Jumlah WC Siswa Laki-laki pada Satpen SLB.....	88
69.	Diagram 3.3.54	Sebaran Jumlah WC Siswa Perempuan pada Satpen SLB.....	89
70.	Diagram 3.3.55	Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SMA.....	91
71.	Diagram 3.3.56	Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SMK.....	92
72.	Diagram 3.3.57	Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SLB.....	93
73.	Diagram 3.3.58	Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SMA.....	94
74.	Diagram 3.3.59	Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SMK.....	95
75.	Diagram 3.3.60	Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SLB.....	96

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.4.1	Kemampuan literasi Siswa SMA Umum.....	97
2.	Tabel 3.4.2	Kemampuan literasi Siswa SMA Negeri.....	98
3.	Tabel 3.4.3	Kemampuan literasi Siswa SMA Swasta.....	99
4.	Tabel 3.4.4	Kemampuan Numerasi Siswa SMA Umum.....	100
5.	Tabel 3.4.5	Kemampuan Numerasi Siswa SMA Negeri.....	101
6.	Tabel 3.4.6	Kemampuan Numerasi Siswa SMA Swasta.....	102
7.	Tabel 3.4.7	Karakter Siswa pada SMA Negeri dan Swasta.....	103
8.	Tabel 3.4.8	Karakter Peserta Didik pada SMA Negeri.....	104
9.	Tabel 3.4.9	Karakter Peserta Didik pada SMA Swasta.....	105
10.	Tabel 3.4.10	Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Negeri dan Swasta.....	106
11.	Tabel 3.4.11	Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Negeri.....	107
12.	Tabel 3.4.12	Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Swasta.....	108
13.	Tabel 3.4.13	Indeks Distribusi Guru pada SMA Swasta.....	109
14.	Tabel 3.4.14	Kecukupan formasi guru ASN.....	110
15.	Tabel 3.4.15	Kualitas Pembelajaran SMA Semua.....	111
16.	Tabel 3.4.16	Kualitas Pembelajaran SMA Negeri.....	112
17.	Tabel 3.4.17	Kualitas Pembelajaran SMA Swasta.....	113
18.	Tabel 3.4.18	Refleksi dan perbaikan pembelajaran.....	114
19.	Tabel 3.4.19	Iklm Keamanan Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta...	115
20.	Tabel 3.4.20	Iklm Keamanan Satuan Pendidikan SMA Negeri.....	116
21.	Tabel 3.4.21	Iklm Keamanan Satuan Pendidikan SMA Swasta.....	117
22.	Tabel 3.4.22	Iklm Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta.....	118
23.	Tabel 3.4.23	Iklm Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Negeri.....	119
24.	Tabel 3.4.24	Iklm Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Swasta.....	120
25.	Tabel 3.4.25	Iklm Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta	121
26.	Tabel 3.4.26	Iklm Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Negeri.....	122
27.	Tabel 3.4.27	Iklm Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Swasta.....	123
28.	Tabel 3.4.28	Partisipasi Warga Satuan Pendidikan.....	124
29.	Tabel 3.4.29	Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK.....	125
30.	Tabel 3.4.30	Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK Negeri.....	126

31.	Tabel 3.4.31	Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK Swasta.....	127
32.	Tabel 3.4.32	Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Umum.....	128
33.	Tabel 3.4.33	Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Negeri.....	129
34.	Tabel 3.4.34	Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Swasta.....	130
35.	Tabel 3.4.35	Gambaran Karakter Pendidikan SMK.....	131
36.	Tabel 3.4.36	Gambaran Karakter Pendidikan SMK Negeri.....	132
37.	Tabel 3.4.37	Gambaran Karakter Pendidikan SMK Swasta.....	133
38.	Tabel 3.4.38	Proporsi PTK bersertifikat.....	134
39.	Tabel 3.4.39	Indeks Distribusi Guru SMK.....	135
40.	Tabel 3.4.40	Kecukupan Formasi Guru ASN.....	136
41.	Tabel 3.4.41	Kualitas pembelajaran SMK Umum.....	137
42.	Tabel 3.4.42	Kualitas pembelajaran SMK Negeri.....	138
43.	Tabel 3.4.43	Kualitas pembelajaran SMK swasta.....	139
44.	Tabel 3.4.44	Refleksi dan perbaikan pembelajaran.....	140
45.	Tabel 3.4.45	Iklm Keamanan SMK Umum.....	141
46.	Tabel 3.4.46	Iklm Keamanan SMK Negeri.....	142
47.	Tabel 3.4.47	Iklm Keamanan SMK Swasta.....	143
48.	Tabel 3.4.48	Iklm Kebinekaan SMK Umum.....	144
49.	Tabel 3.4.49	Iklm Kebinekaan SMK Negeri.....	145
50.	Tabel 3.4.50	Iklm Kebinekaan SMK Swasta.....	146
51.	Tabel 3.4.51	Iklm Inklusivitas SMK Umum.....	147
52.	Tabel 3.4.52	Iklm Inklusivitas SMK Negeri.....	148
53.	Tabel 3.4.53	Iklm Inklusivitas SMK Swasta.....	149
54.	Tabel 3.4.54	Link and Match dengan Dunia Kerja.....	150
55.	Tabel 3.4.55	Partisipasi warga satuan Pendidikan SMK.....	151
56.	Tabel 3.4.56	Kompetensi Literasi SMALB Umum.....	152
57.	Tabel 3.4.57	Kompetensi Literasi SMALB Negeri.....	153
58.	Tabel 3.4.58	Kompetensi Literasi SMALB Swasta.....	154
59.	Tabel 3.4.59	Kompetensi Numerasi SMALB Negeri dan Swasta.....	155
60.	Tabel 3.4.60	Capaian Karakter SMALB Negeri dan Swasta.....	156
61.	Tabel 3.4.61	Proporsi PTK SMALB Negeri dan Swasta Bersertifikat.....	157
62.	Tabel 3.4.62	Indeks Distribusi Guru.....	158
63.	Tabel 3.4.63	Kecukupan Formasi Guru ASN di Satuan Pendidikan SMALB...	159
64.	Tabel 3.4.64	Kualitas Pembelajaran SMALB.....	160
65.	Tabel 3.4.65	Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru SMALB.....	161
66.	Tabel 3.4.66	Iklm Keamanan Satuan Pendidikan SMALB.....	162

67.	Tabel 3.4.67	Iklim Kebinekaan SMALB.....	163
68.	Tabel 3.4.68	Iklim Inklusivitas SMALB.....	164
69.	Tabel 3.4.69	Partisipasi warga satuan Pendidikan.....	165
70.	Tabel 3.4.70	Kemampuan literasi SMPLB.....	166
71.	Tabel 3.4.71	Kemampuan Numerasi SMPLB.....	167
72.	Tabel 3.4.72	Karakter Siswa SMPLB Negeri dan Swasta.....	168
73.	Tabel 3.4.73	Proporsi PTK bersertifikat di SMPLB Negeri dan Swasta.....	169
74.	Tabel 3.4.74	Indeks Distribusi Guru di SMPLB Negeri dan Swasta.....	170
75.	Tabel 3.4.75	Kecukupan Formasi Guru ASN di SMPLB.....	171
76.	Tabel 3.4.76	Kualitas Pembelajaran di SMPLB.....	172
77.	Tabel 3.4.77	Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru.....	173
78.	Tabel 3.4.78	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMPLB.....	174
79.	Tabel 3.4.79	Iklim Keamanan Kesetaraan Gender SMPLB.....	175
80.	Tabel 3.4.80	Iklim Kebinekaan SMPLB.....	176
81.	Tabel 3.4.81	Iklim Inklusivitas SMPLB.....	177
82.	Tabel 3.4.82	Partisipasi Warga Satuan Pendidikan SMPLB	178
83.	Tabel 3.4.83	Kemampuan Literasi SDLB.....	179
84.	Tabel 3.4.84	Kemampuan Numerasi SDLB.....	180
85.	Tabel 3.4.85	karakter SDLB.....	181
86.	Tabel 3.4.86	Proporsi PTK SDLB Bersertifikat.....	182
87.	Tabel 3.4.87	Indeks Distribusi Guru SDLB.....	183
88.	Tabel 3.4.88	Kecukupan formasi guru ASN SDLB.....	184
89.	Tabel 3.4.89	Kualitas pembelajaran SDLB.....	185
90.	Tabel 3.4.90	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.....	186
91.	Tabel 3.4.91	Iklim keamanan satuan Pendidikan.....	187
92.	Tabel 3.4.92	Iklim Kesetaraan Gender	188
93.	Tabel 3.4.93	Iklim Kebinekaan.....	189
94.	Tabel 3.4.94	Iklim Inklusivitas.....	190
95.	Tabel 3.4.95	Partisipasi warga satuan Pendidikan.....	191
96.	Tabel 3.4.96	Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan Semua.....	192
97.	Tabel 3.4.97	Kompetensi Literasi SMALB Negeri.....	193
98.	Tabel 3.4.98	Kompetensi Literasi SMALB Swasta.....	194
99.	Tabel 3.4.99	Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Negeri dan Swasta.....	195
100.	Tabel 3.4.100	Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Negeri.....	196
101.	Tabel 3.4.101	Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Swasta.....	197
102.	Tabel 3.4.102	Kualitas Pembelajaran SMA Kesetaraan Negeri dan Swasta.....	198
103.	Tabel 3.4.103	Partisipasi warga satuan Pendidikan.....	199

104	Tabel 3.4.104	Kemampuan literasi SMPLB.....	200
105	Tabel 3.4.105	Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Negeri.....	201
106	Tabel 3.4.106	Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Swasta.....	202
107	Tabel 3.4.107	Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Negeri dan Swasta.....	203
108	Tabel 3.4.108	Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Negeri.....	204
109	Tabel 3.4.109	Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Swasta.....	205
110	Tabel 3.4.110	Kualitas Pembelajaran SMP Kesetaraan.....	206
111	Tabel 3.4.111	Partisipasi Warga Satuan Pendidikan.....	207
112	Tabel 3.4.112	Kemampuan Literasi SD Kesetaraan Negeri dan Semua.....	208
113	Tabel 3.4.113	Kemampuan literasi SD Kesetaraan Negeri.....	209
114	Tabel 3.4.114	Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Swasta.....	210
115	Tabel 3.4.115	Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan.....	211
116	Tabel 3.4.116	Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan Negeri.....	212
117	Tabel 3.4.117	Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan Swasta.....	213
118	Tabel 3.4.118	Kualitas Pembelajaran SD Kesetaraan.....	214
119	Tabel 3.4.119	Partisipasi Warga Satuan Pendidikan SD Kesetaraan.....	215

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Data memiliki peran yang sangat vital dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi publik seharusnya lahir dari pertimbangan berbasis data yang valid dan dapat diverifikasi. Keterkaitan antara data dan kebijakan ini telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional yang mengatur tata kelola perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan harus berlandaskan data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menugaskan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan dan mengelola informasi pembangunan secara terbuka. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menghadirkan standar yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan data, mulai dari metadata, interoperabilitas, hingga mekanisme validasi antarinstansi sebagai upaya menghadirkan data yang terpadu dan konsisten.

Indonesia juga memiliki berbagai himpunan data sektoral hingga tingkat desa, seperti data SDGs Desa yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Data tersebut sesungguhnya menyediakan gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat, namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar analisis dalam perencanaan pembangunan.

Secara konseptual, data merupakan gambaran faktual di lapangan, baik berupa angka, peristiwa, maupun fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ketika diolah dan dianalisis, data akan menghasilkan informasi yang mampu mengubah cara pandang pengambil kebijakan serta mempengaruhi arah tindakan organisasi. Oleh karena itu, penggunaan data yang berkualitas menjadi syarat utama dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis sebagai pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Agar perencanaan tersebut tersusun dengan baik, keberadaan data yang reliabel menjadi fondasi penetapan tujuan, target, dan indikator kinerja. Atas dasar tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menyusun data dan informasi pendidikan secara sistematis sebagai basis dalam merumuskan perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Kehadiran data yang tersusun

dengan baik diharapkan mampu mendukung lahirnya rencana pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di provinsi ini.

1.2 TUJUAN

Buku ini dihadirkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta berbagai indikator penting lainnya yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pengembangan sektor pendidikan. Kehadiran buku ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, sehingga setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. buku ini bertujuan untuk memetakan potensi, tantangan, serta kebutuhan pendidikan secara lebih akurat guna menentukan prioritas intervensi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Data yang tersaji juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan, sekaligus menjadi bahan publikasi yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, masyarakat, dan lembaga mitra. Melalui penyusunan buku ini, diharapkan proses pemantauan, evaluasi, serta pengembangan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan terarah, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan data dan informasi urusan Pendidikan ini adalah :

1. Menghasilkan data dan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan;
2. Membantu mendukung penyusunan dokumen perencanaan berbasis data sektoral;
3. Memberikan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan berkaitan erat dengan upaya meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di seluruh jenjang. Kondisi ini menuntut adanya langkah terarah untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang masih dipengaruhi oleh disparitas ekonomi, geografis, serta ketersediaan sarana prasarana pendidikan di beberapa wilayah. Selain itu, capaian kompetensi literasi dan numerasi masih menunjukkan adanya variasi antarsatuan pendidikan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan proses pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Peningkatan karakter peserta didik juga menjadi isu penting, mengingat penguatan karakter merupakan fondasi dalam membangun generasi yang berintegritas, berdaya saing,

dan berkepribadian baik. Di sisi lain, relevansi pendidikan dengan dunia kerja menjadi sorotan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah kejuruan. Persentase lulusan yang bekerja atau berwirausaha masih perlu ditingkatkan sebagai indikator keberhasilan pendidikan vokasi. Tantangan ini mencakup kebutuhan terhadap kemitraan yang lebih kuat dengan dunia industri, pembaruan kompetensi keahlian, serta penguatan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi peserta didik.

Keberlangsungan suatu institusi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menanggapi berbagai isu strategis melalui kebijakan dan langkah yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai perangkat daerah yang mengemban tujuan “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Daya Saing”, menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya angka melanjutkan ke pendidikan tinggi
2. Masih rendahnya kualitas hasil pembelajaran
3. Lulusan pendidikan menengah kejuruan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi
4. Belum optimalnya kepuasan pelayanan umum

1.4 DASAR HUKUM

1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182
4.	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);

6.	Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Nomor 15 Seri E);
7.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102).

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat lima kewenangan dalam urusan wajib pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cakupan kewenangan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Pengelolaan Pendidikan Menengah
- b. Pengelolaan Pendidikan Khusus

2. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

3. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

4. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Karenanya untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur ini, dibentuklah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. TUGAS:

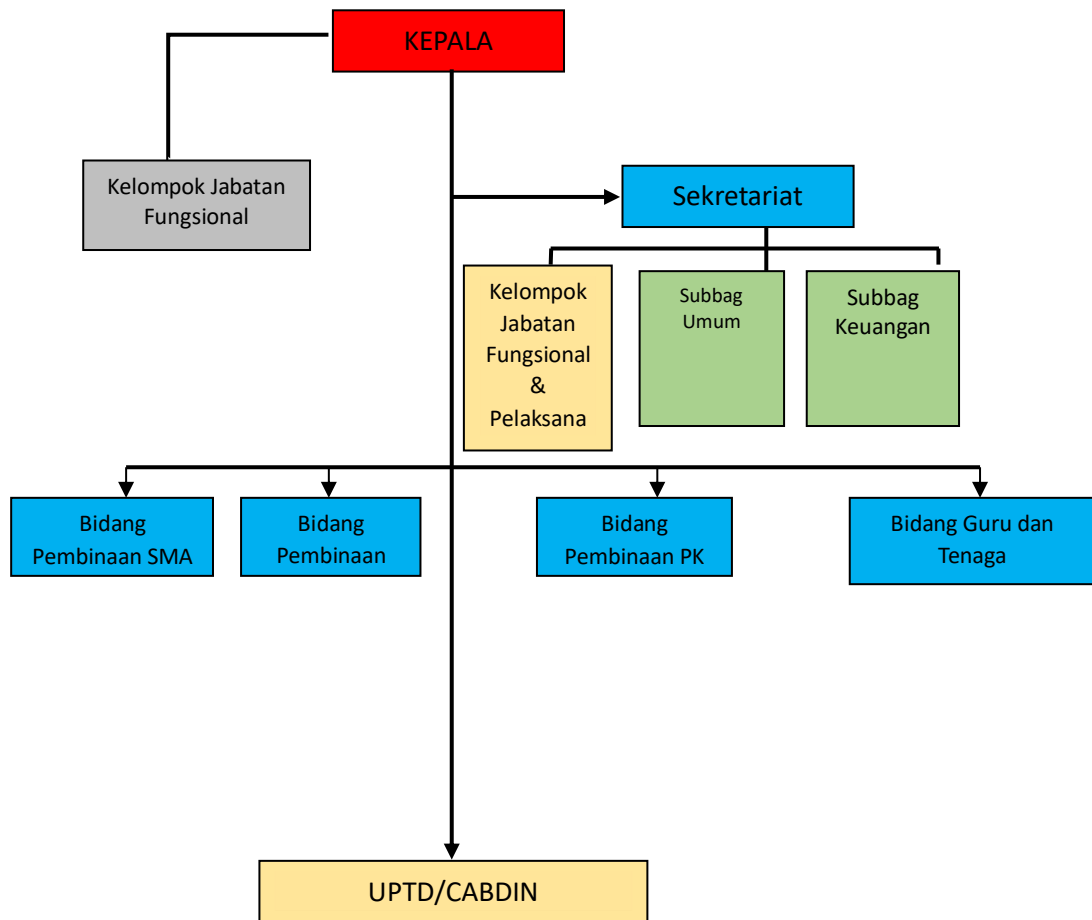
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

2. FUNGSI:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan mandat tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beroperasi berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2. Program dan Kegiatan

Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada dokumen perencanaan jangka menengah dinas pendidikan. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2.3. Tantangan dan Peluang Dinas Pendidikan

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan mencakup penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Di samping itu, Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan dasar tersebut, arah pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk memastikan terlaksananya kewenangan yang diamanatkan oleh UU 23/2014, sekaligus menjalankan peran gubernur dalam fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan di daerah. Berdasarkan identifikasi awal, sejumlah tantangan dan peluang pengembangan yang relevan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tantangan

A. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

1. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Terbatasnya Jangkauan Fisik dan Geografis.
3. Keterbatasan Transportasi dan Infrastruktur Penunjang

B. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

1. Masih ada satuan pendidikan yang terakreditasi C dan belum terakreditasi.
2. Ketersediaan dan Kompetensi Guru yang Belum Merata.
3. Keterbatasan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ANS terutama untuk satuan pendidikan di daerah pedesaan.
4. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di jenjang SMA, SMK dan SLB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Keterbatasan lahan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB terutama di daerah perkotaan sehingga sulit untuk mengembangkan satuan pendidikan tersebut.

2. Peluang

A. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas akses pendidikan.
2. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur Pendidikan.
3. Program Inklusi dan Pendidikan Berbasis Masyarakat

B. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
2. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sertifikasi.
3. Kolaborasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja serta Lembaga Pelatihan.
4. Pengembangan Kurikulum dan Media Pembelajaran Inovatif

BAB III

DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data dipahami sebagai keterangan objektif mengenai suatu fakta yang disajikan dalam bentuk angka, uraian kualitatif, maupun visual, dan diperoleh melalui pengamatan langsung atau dari kumpulan data yang sudah terdokumentasi dalam media cetak maupun digital. Sementara itu, informasi merupakan data yang telah diproses sehingga memberikan makna dan dapat digunakan untuk memahami suatu kondisi atau fenomena tertentu.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data berperan sebagai dasar, acuan, sekaligus parameter yang menentukan arah kebijakan. Prinsip evidence-based planning sebagaimana ditegaskan pula dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menuntut tersedianya data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan. Data tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi pijakan untuk membuat proyeksi atau gambaran keadaan di masa mendatang. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah wajib menyediakan data sektoral sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana pembangunan daerah. Berikut ini merupakan rangkuman data dan informasi pendidikan yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan sebagai pendukung penyusunan dokumen perencanaan di bidang pendidikan.

3.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

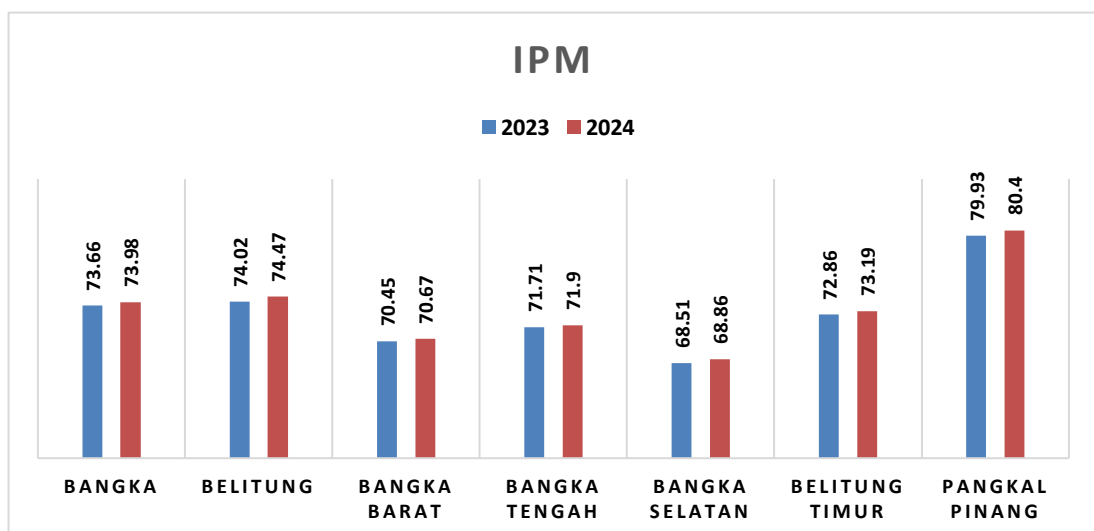
Indikator pendidikan lainnya yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks sektor pendidikan, IPM memuat dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menjadi ukuran penting dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah urusan pendidikan. Kedua indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas dan keberlanjutan akses pendidikan di suatu wilayah. Capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023–2024, yang dipetakan berdasarkan masing-masing kabupaten/kota, disajikan pada grafik. Data tersebut menunjukkan variasi capaian antarwilayah dan menjadi dasar analisis dalam menentukan prioritas serta strategi peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks kebijakan

pembangunan pendidikan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dipandang sebagai ukuran capaian pembangunan manusia, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Capaian IPM yang tinggi menunjukkan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, peningkatan kompetensi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan aspek pendidikan dalam komponen IPM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain sebagai alat ukur, IPM juga menjadi referensi dalam perencanaan pengalokasian sumber daya pendidikan di daerah, Dengan demikian, analisis IPM membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun intervensi berbasis wilayah (spatial-based policy) yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan hasil pemantauan IPM sebagai dasar dalam perumusan kebijakan afirmatif bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal. Dengan demikian, capaian IPM tidak hanya mencerminkan angka statistik, tetapi menjadi wujud nyata dari peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun IPM yang ada pada grafik dibawah ini :

Diagram. 3.1.1

Indeks Pembangunan manusia Bangka Belitung Tahun 2023-2024

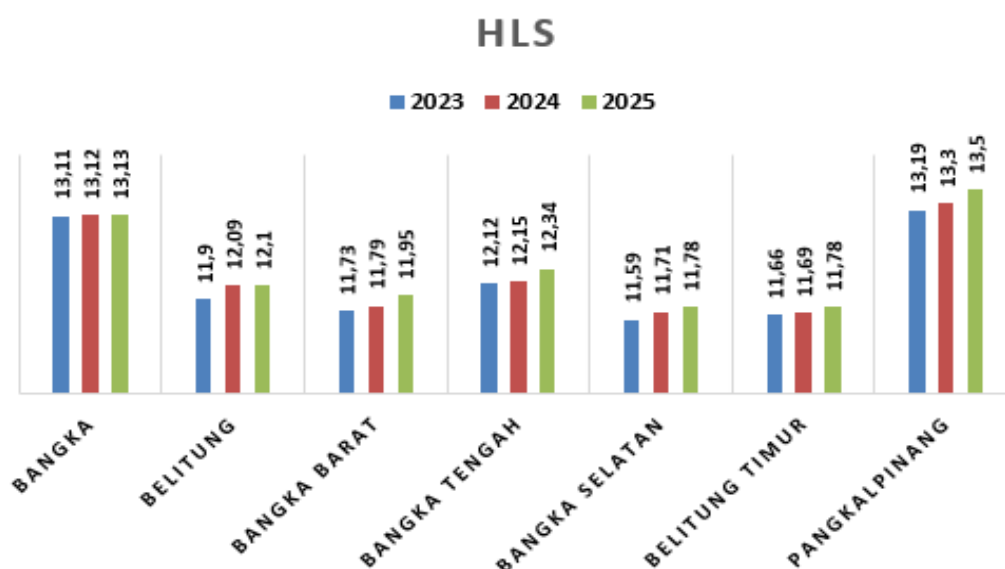


Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024, (diolah).

Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada level yang stabil, dengan rata-rata provinsi sebesar **12,49 tahun pada 2024** dan meningkat menjadi **12,5 tahun pada 2025**. Terdapat perbedaan capaian antarwilayah, di mana **Kota Pangkalpinang** menjadi daerah **tertinggi** dengan HLS **13,5 tahun** pada 2025. Sebaliknya, **Kabupaten Belitung** mencatat capaian **terendah**, yaitu **12,1 tahun**. Variasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada daerah dengan capaian rendah agar peningkatan pembangunan pendidikan dapat berlangsung lebih merata. Selain itu, tren peningkatan HLS ini juga mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan di sebagian besar kabupaten/kota. Namun, kesenjangan antardaerah masih terlihat cukup jelas. Kabupaten/kota dengan nilai HLS lebih rendah umumnya menghadapi tantangan pada pemerataan fasilitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta tingkat partisipasi sekolah terutama di jenjang menengah. Sementara itu, daerah dengan capaian tinggi seperti Pangkalpinang menunjukkan bahwa konsistensi dalam penyediaan sarana pendidikan dan dukungan kebijakan yang kuat mampu mendorong peningkatan indikator pendidikan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih terarah untuk mendorong peningkatan HLS di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, sehingga pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Diagram. 3.1.2

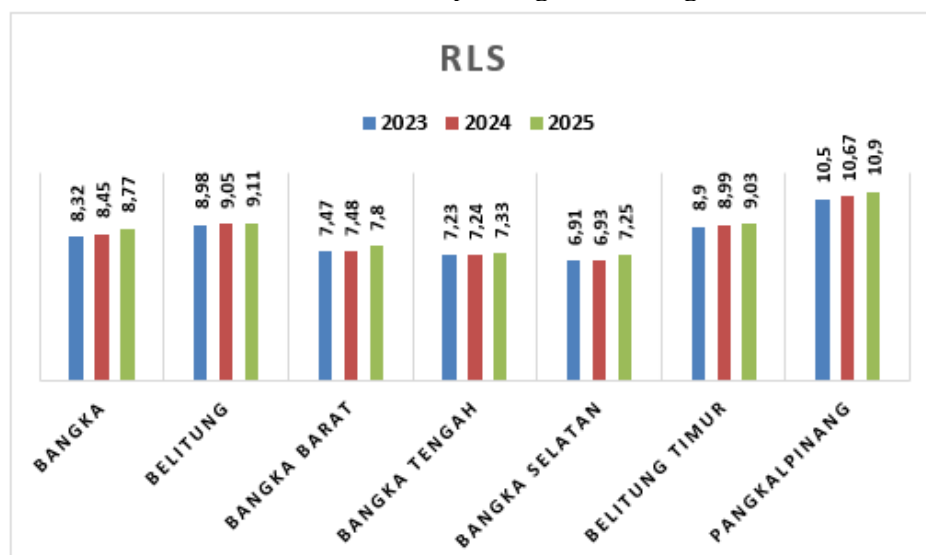
Harapan lama Sekolah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,65 tahun. Terdapat tiga kabupaten yang berada di bawah capaian provinsi, yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan menjadi daerah dengan capaian RLS terendah, sementara Kota Pangkalpinang merupakan daerah dengan capaian RLS tertinggi. Perbedaan capaian RLS antardaerah tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Daerah dengan capaian rendah umumnya menghadapi hambatan seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, serta disparitas tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, capaian tinggi di Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa ketersediaan sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan tingkat partisipasi sekolah yang lebih baik berkontribusi pada meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan RLS di daerah-daerah yang masih tertinggal, termasuk penguatan program wajib belajar, peningkatan layanan pendidikan menengah, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang rentan putus sekolah. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, diharapkan kesenjangan RLS antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin berkurang dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara merata.

Diagram. 3.1.3
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025, (diolah).

3.2. DATA MAKRO PENDIDIKAN

Data makro pendidikan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian pembangunan sektor pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data ini menggambarkan kondisi umum penyelenggaraan pendidikan, mencakup aspek akses, pemerataan, kualitas, dan relevansi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan tersedianya data makro, harapan program pendidikan yang dirumuskan benar-benar berbasis (evidence-based policy). Dalam konteks perencanaan pembangunan, data makro pendidikan menjadi dasar untuk melakukan pengendalian, evaluasi, serta penyesuaian arah kebijakan terhadap capaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan. Proses pengumpulan data makro pendidikan diperoleh berasal dari berbagai sumber, antara lain Dapodik, Rapor Pendidikan, dan Data BPS. Data makro ini menggambarkan capaian indikator sasaran pada pembangunan jangka menengah urusan pendidikan pada tahun 2025. Data ini juga merupakan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian yang ditampilkan dalam data makro ini menjadi acuan penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan RENSTRA serta sebagai dasar untuk merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Data ini juga berperan dalam memastikan bahwa arah pembangunan pendidikan tetap konsisten dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah

3.2.1. Angka Partisipasi Kasar

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat

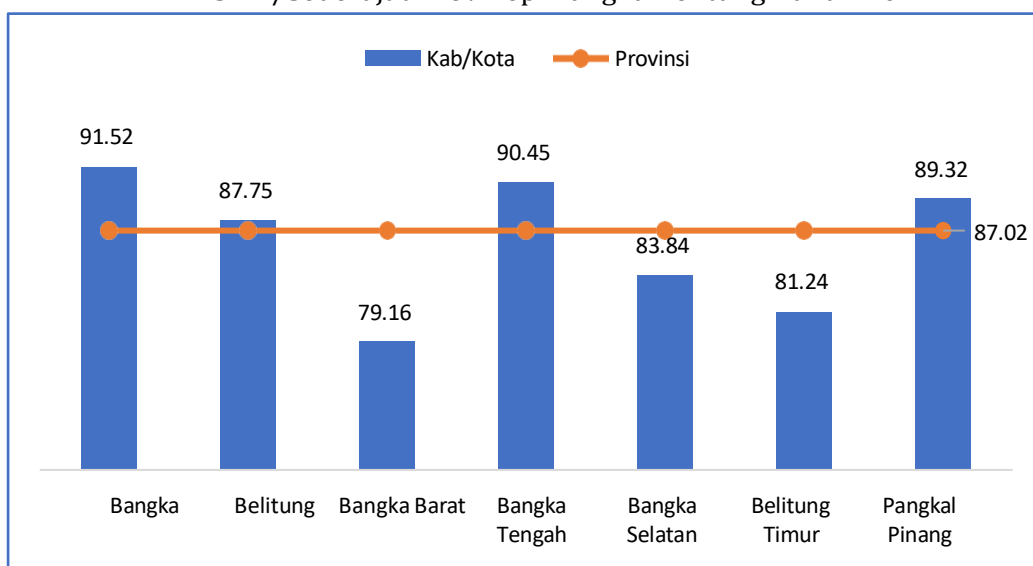
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMA/Sederajat di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2024 sebesar 87,02. Sementara berdasarkan sebaran capaian berdasarkan kabupaten kota terdapat 3 Kabupaten yang masih di bawah provinsi. Ketiga Kabupaten tersebut di Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Perbedaan capaian APK antarwilayah menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keterjangkauan dan partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/ sederajat. Kabupaten/kota dengan capaian tinggi, seperti Bangka dan Pangkalpinang, umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih

baik, ditunjang oleh ketersediaan sekolah, sarana transportasi, serta dukungan lingkungan sosial yang mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan capaian di bawah provinsi—seperti Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung Timur—masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas pendidikan, sebaran penduduk yang tidak merata, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak.

Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, terutama pada daerah yang tingkat partisipasinya masih rendah. Intervensi strategis, seperti penambahan ruang kelas, peningkatan kapasitas sekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta penguatan program transisi dari SMP ke SMA, diharapkan dapat meningkatkan APK secara signifikan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerataan kesempatan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh daerah mampu mencapai target partisipasi pendidikan secara optimal.

Diagram. 3.2.1

APK SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024, (diolah).

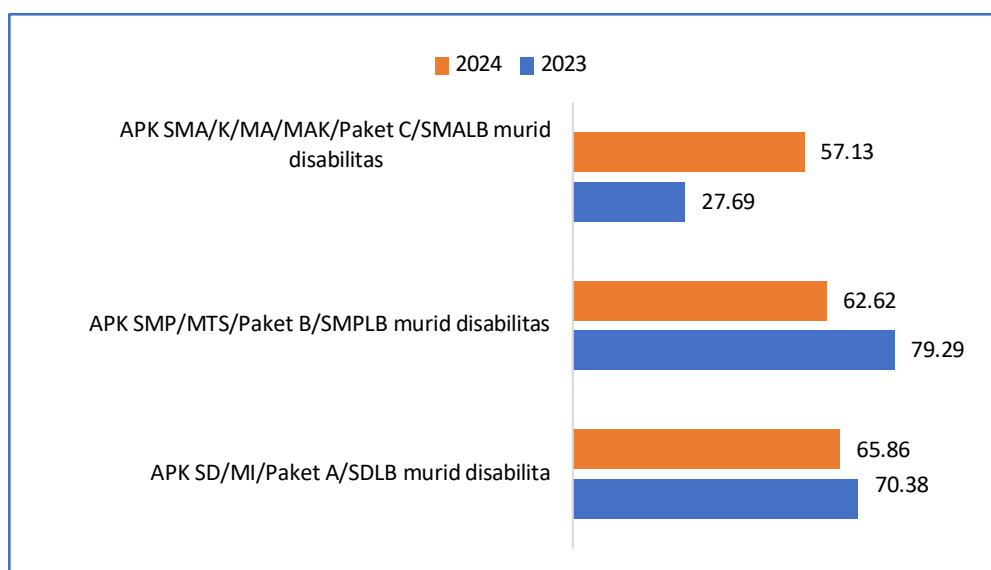
2. Angka Partisipasi Kasar SLB

Angka Partisipasi Kasar siswa disabilitas adalah proporsi peserta didik disabilitas pada jenjang SM, SMP, dan SD sederajat terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 16–18, 13–15, dan 7–12 tahun di suatu wilayah. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan murid disabilitas pada SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 untuk jenjang SMA mencapai 57,13, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jenjang SMP, capaian menurun menjadi 62,62, sementara pada jenjang SD sebesar 65,86 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan perlunya penguatan layanan pendidikan inklusif yang lebih merata dan berkelanjutan. Perubahan capaian APK murid disabilitas pada tiap jenjang pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat dinamika dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan pendidikan khusus maupun inklusif di daerah. Kenaikan pada jenjang SMA menunjukkan adanya peningkatan akses bagi peserta didik disabilitas untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran orang tua, serta perluasan program inklusi di sekolah-sekolah.

Namun, penurunan capaian pada jenjang SMP dan SD mengisyaratkan bahwa tantangan pada pendidikan dasar dan menengah pertama masih cukup signifikan. Faktor-faktor seperti terbatasnya jumlah guru pendamping khusus, fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas turut memengaruhi capaian tersebut.

Diagram. 3.2.2

APK Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

3.2.2. Angka Partisipasi Sekolah

1. Angka Partisipasi Sekolah SMA/Sederajat

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 berada pada angka **72,69**. Meskipun capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah telah mengakses pendidikan menengah atas, pemerataan partisipasi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Berdasarkan sebaran per kabupaten/kota, terdapat tiga daerah yang masih berada di bawah capaian provinsi, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan terkait akses pendidikan, seperti keterjangkauan sekolah, kondisi ekonomi keluarga, serta ketersediaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan partisipasi sekolah di wilayah tersebut agar kesenjangan APS dapat terus ditekan dan pemerataan layanan pendidikan dapat tercapai.

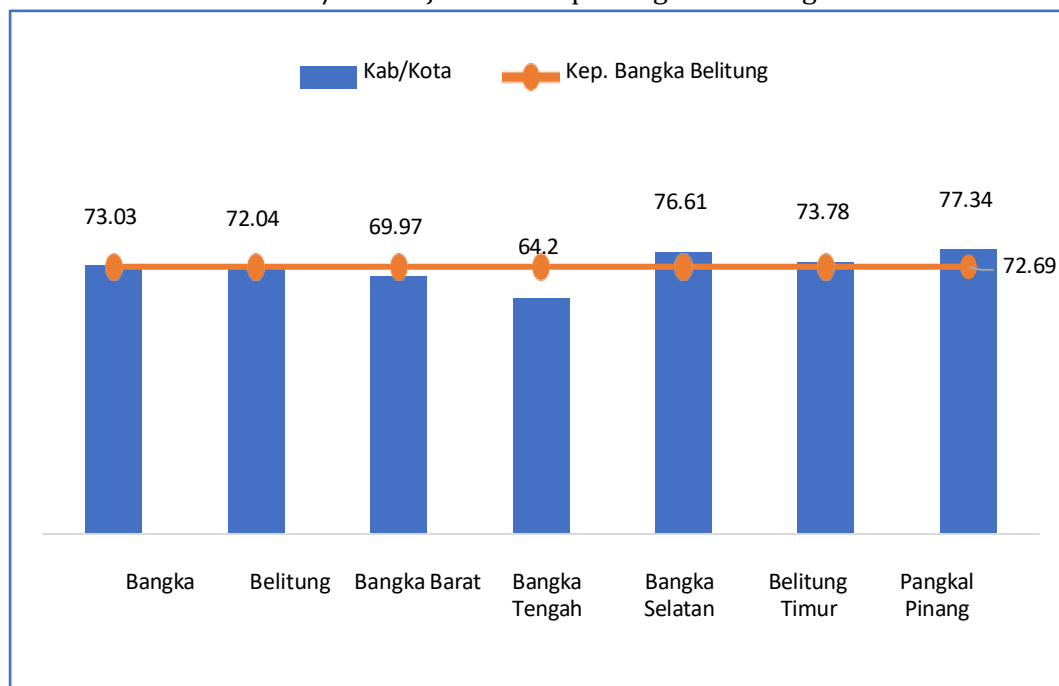
Selain itu, variasi capaian APS antardaerah juga menggambarkan bahwa faktor sosial, geografis, dan ketersediaan sarana pendidikan masih memengaruhi partisipasi penduduk usia 16–18 tahun dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/ sederajat. Daerah-daerah yang berada di bawah rata-rata provinsi umumnya memiliki tantangan seperti jarak sekolah yang relatif jauh, keterbatasan transportasi, serta tingkat ekonomi keluarga yang membuat sebagian remaja memilih untuk

bekerja lebih awal. Di sisi lain, daerah seperti Pangkalpinang dan Belitung

menunjukkan capaian yang lebih tinggi karena memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih memadai, jumlah sekolah yang lebih banyak, serta adanya dukungan sosial masyarakat yang kuat terhadap pendidikan.

Diagram. 3.2.3

APS SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024, (diolah).

2. Angka Partisipasi Sekolah SLB

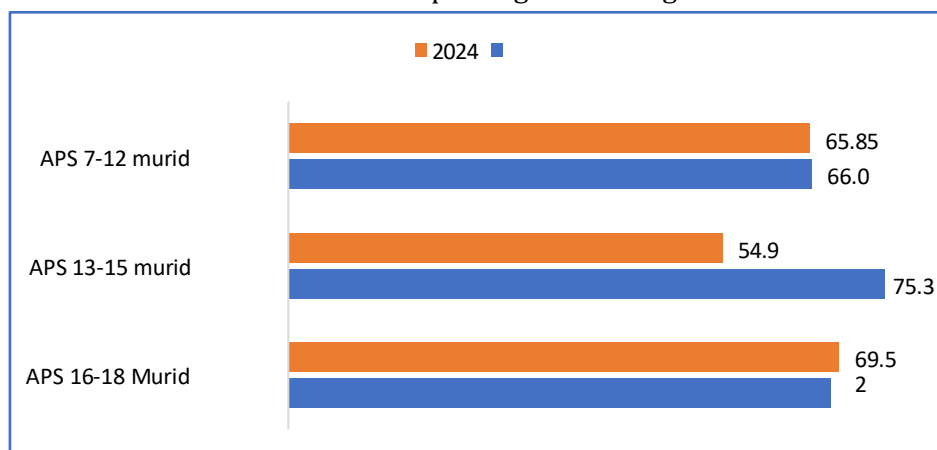
Angka partisipasi sekolah (APS) murid disabilitas SD merupakan proporsi peserta didik disabilitas usia 7-12 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 7-12 tahun di suatu wilayah. APS murid disabilitas SMP adalah proporsi peserta didik disabilitas usia 13-15 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 13-15 tahun. Sementara proporsi peserta didik disabilitas usia 16-18 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 16-18 tahun merupakan APS SMA. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan murid disabilitas pada SLB di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2024 untuk jenjang SMA yaitu 69,52 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jenjang SMP juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 62,62, namun untuk jenjang SDLB meningkat menjadi 65,85. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SDLB menunjukkan adanya perbaikan akses layanan

pendidikan bagi anak disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan inklusif yang dijalankan oleh pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal perluasan jangkauan pendidikan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Program dukungan seperti penambahan guru pendamping khusus, penyediaan alat bantu belajar, serta pelatihan inklusi bagi pendidik menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan partisipasi tersebut. Sementara itu, penurunan APS pada jenjang SMP disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Salah satu penyebab utama kemungkinan terkait dengan transisi dari pendidikan dasar ke menengah yang masih menghadapi hambatan, baik dari segi kesiapan sekolah dalam menerima peserta didik disabilitas maupun faktor sosial dan ekonomi keluarga. Di beberapa wilayah, keterbatasan sarana dan tenaga pendidik khusus juga masih menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang memadai bagi siswa disabilitas usia remaja.

Untuk jenjang SMA, peningkatan APS menjadi 69,52 persen mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi siswa disabilitas. Kenaikan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dalam mendorong satuan pendidikan menengah umum dan kejuruan agar lebih terbuka terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dukungan berupa pelatihan guru, pengembangan kurikulum adaptif, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas turut berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi tersebut.

Diagram. 3.2.4

APS Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

3.2.3. Angka Partisipasi Murni

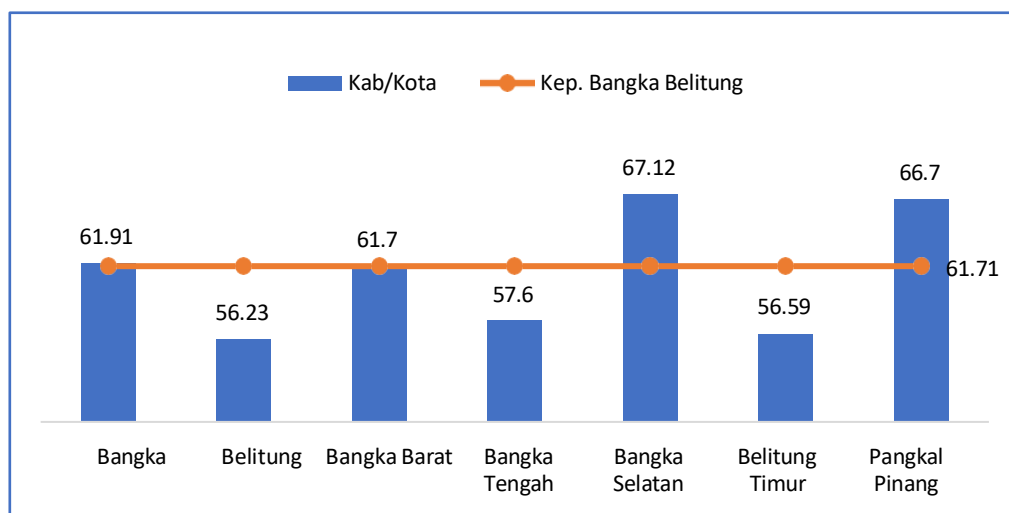
1. Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SMA/Sederajat di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2024 sebesar 61,71. Sementara capaian berdasarkan kabupaten kota terdapat 3 Kabupaten yang masih di bawah provinsi. Ketiga Kabupaten tersebut di Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/Sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 61,71 persen menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk usia 16–18 tahun, sekitar enam dari sepuluh remaja telah mengenyam pendidikan menengah sesuai usianya. Meskipun angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, pemerataan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kabupaten Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur yang masih mencatatkan nilai APM di bawah rata-rata provinsi perlu mendapatkan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh faktor ketersediaan satuan pendidikan menengah yang masih terbatas, jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal siswa, serta keterbatasan transportasi dan dukungan ekonomi keluarga. Selain itu, sebagian lulusan SMP di wilayah tersebut memilih melanjutkan ke pendidikan nonformal atau langsung bekerja, yang berdampak pada rendahnya angka partisipasi di jenjang SMA.

Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian APM di atas rata-rata provinsi, masing-masing sebesar 67,12 persen dan 66,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah di wilayah tersebut relatif lebih baik. Selain itu, keberadaan sekolah menengah yang lebih merata, dukungan beasiswa dari pemerintah daerah, serta program sekolah gratis turut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi siswa di tingkat SMA/SMK.

Diagram. 3.2.5
APM SMA/Sederajat Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024, (diolah).

2. Angka Partisipasi Murni SLB

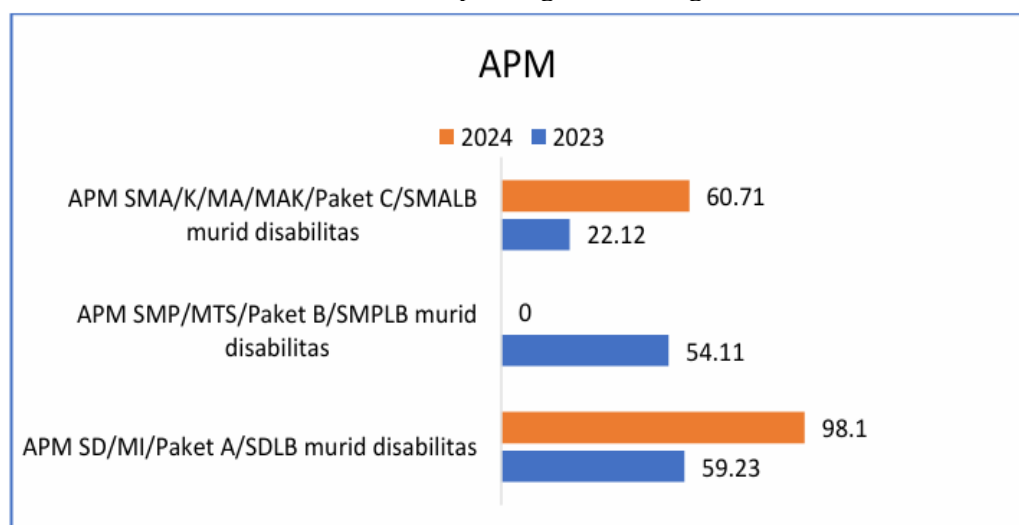
Angka partisipasi murni siswa disabilitas merupakan proporsi peserta didik disabilitas jenjang SD sederajat pada usia 7-12 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 7-12 tahun di suatu wilayah. Proporsi peserta didik disabilitas pada usia 13-15 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 13-15 tahun merupakan APM siswa disabilitas SMP. APM untuk jenjang SMA merupakan. Proporsi peserta didik disabilitas pada usia 16-18 tahun terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 16-18 tahun. Berikut data yang menggambarkan APM siswa disabilitas. Berdasarkan data pada grafik di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) siswa disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 menunjukkan variasi capaian antarjenjang pendidikan. Pada jenjang SDLB atau sederajat, APM mencapai 98,1 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 59,23 persen. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar bagi anak disabilitas melalui penyediaan layanan pendidikan khusus dan inklusif yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

Untuk jenjang SMPLB, APM tahun 2024 tercatat sebesar 54,11 persen, sedangkan pada jenjang SMALB sebesar 60,71 persen, keduanya menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dibandingkan

capaian tahun 2023. Peningkatan partisipasi pada kedua jenjang tersebut tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, seperti pemberian bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus, serta penyediaan sarana pembelajaran yang ramah disabilitas. Selain itu, kerja sama antara sekolah luar biasa dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif turut memperluas jangkauan layanan bagi peserta didik disabilitas usia remaja. Meskipun capaian APM siswa disabilitas pada jenjang menengah telah meningkat, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah sekolah luar biasa di beberapa kabupaten, yang menyebabkan sebagian anak disabilitas harus menempuh jarak cukup jauh untuk bersekolah. Di samping itu, masih ada keluarga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan formal bagi anak disabilitas, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan advokasi di tingkat masyarakat.

Diagram. 3.2.6

APM Siswa Disabilitas Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024



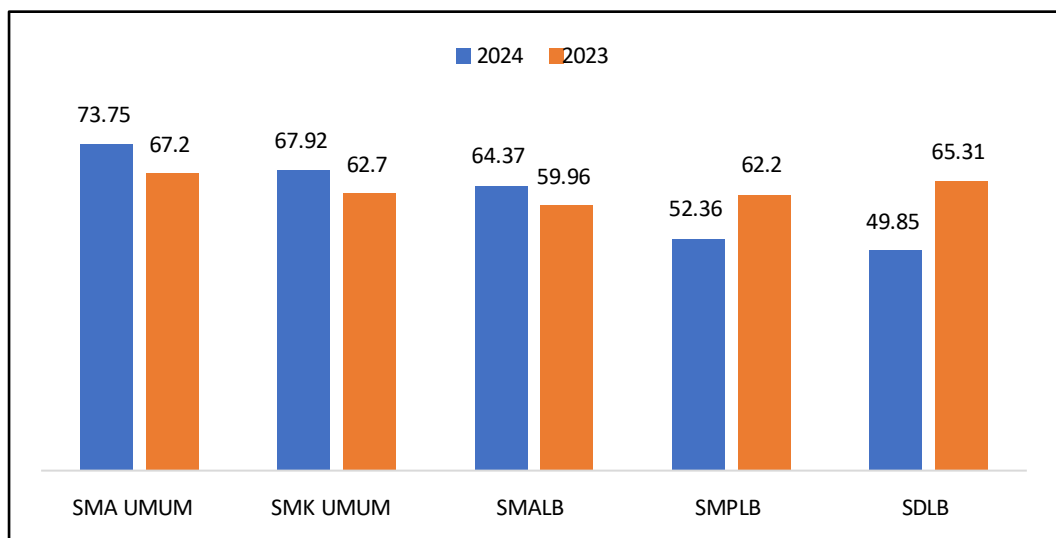
Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

3.2.4. Rata-rata Nilai Kompetensi Literasi

Rata-rata nilai kompetensi literasi adalah nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Berdasarkan data berikut diketahui bahwa rata-rata nilai kompetensi literasi SMA, SMK, dan SMALB Tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Sementara rata-rata Nilai Kompetensi Literasi SBLB dan SMPLB tahun

2024 justru menurun dari tahun sebelumnya. Pada jenjang SMA, rata-rata nilai literasi tahun 2024 mencapai 73,75, naik dari 67,2 pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa siswa SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kemampuan membaca dan memahami teks yang semakin baik, baik dalam konteks akademik maupun nonakademik. Sementara itu, untuk jenjang SMK nilai rata-rata literasi meningkat dari 67,2 menjadi 67,94 pada tahun 2024. Meskipun peningkatan relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran literasi di sekolah kejuruan juga mulai mengalami kemajuan. Pada jenjang SMALB, rata-rata nilai literasi meningkat dari 59,46 pada tahun 2023 menjadi 64,37 di tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikator positif bahwa peserta didik dengan kebutuhan khusus juga memperoleh manfaat dari program pembelajaran berbasis literasi yang adaptif.

Diagram. 3.2.7
Rata-rata Nilai Kompetensi Literasi Siswa SMA, SMK dan SLB Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

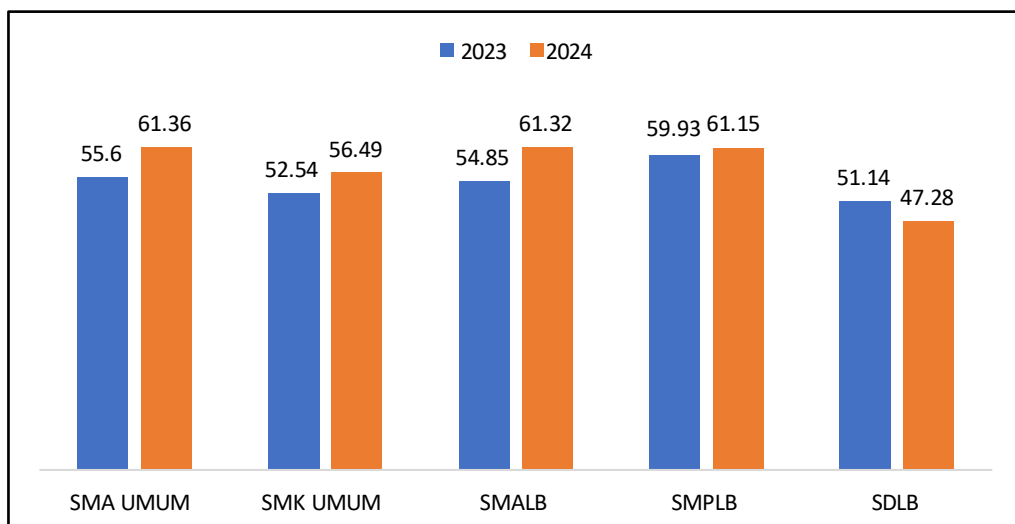
3.2.5. Rata-rata Nilai Kompetensi Numerasi

Rata-rata nilai kompetensi Numerasi adalah nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berdasarkan data berikut diketahui bahwa rata-rata nilai kompetensi Numerasi SMA, SMK, SMALB dan SMPLB Tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Rata-rata Nilai Kompetensi Numerasi SBLB dan SMPLB tahun 2024 justru menurun

dari tahun sebelumnya.

Pada jenjang SMA, rata-rata nilai numerasi tahun 2024 mencapai 61,36, meningkat dari 55,6 pada tahun 2023. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa pembelajaran numerasi di sekolah menengah atas telah berjalan lebih efektif. Sementara itu, untuk jenjang SMK rata-rata nilai numerasi naik dari 52,54 menjadi 56,49. Kenaikan ini menunjukkan hasil positif dari implementasi teaching factory dan pembelajaran berbasis industri yang mendorong siswa SMK menggunakan konsep numerik dalam konteks dunia kerja. Pada jenjang SMALB, capaian nilai numerasi meningkat dari 54,85 menjadi 61,32, menandakan bahwa peserta didik dengan kebutuhan khusus juga memperoleh manfaat dari pembelajaran numerasi yang adaptif.

Diagram. 3.2.8
Rata-rata Nilai Kompetensi Numerasi Siswa SMA, SMK dan SLB
Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

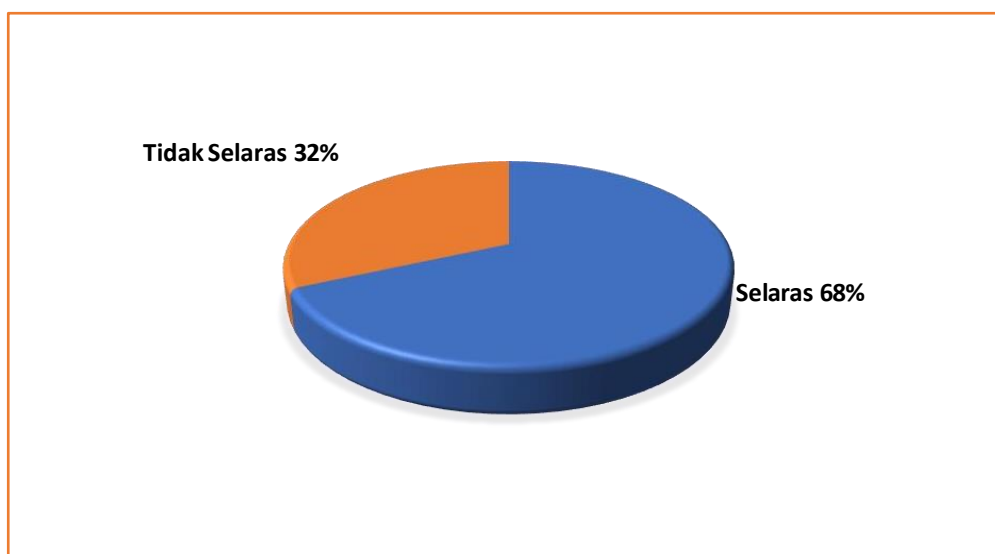
3.2.6. Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja Sesuai Keahlian dan Melanjutkan ke Pendidikan Tinggi

Lulusan sekolah menengah yang bekerja selaras dengan keahlian merupakan persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dan selaras dengan bidang pekerjaannya. Secara umum lulusan SMK yang bekerja dan berwirausaha selaras dengan keahliannya sudah lebih banyak, sebagaimana pada diagram berikut. Berdasarkan data dari Tracer Study Kabupaten Taban 2025, dari total lulusan SMK yang telah bekerja atau berwirausaha, sebanyak 68% dinyatakan bekerja sesuai

dengan bidang keahlian yang mereka pelajari di sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas lulusan SMK mampu mengaplikasikan kompetensi yang telah mereka peroleh ke dalam dunia kerja atau usaha yang sesuai.

Namun, masih terdapat 32% lulusan yang bekerja atau berwirausaha di luar bidang keahlian mereka, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lapangan kerja sesuai jurusan, minat yang bergeser, atau kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun demikian, proporsi yang selaras lebih dominan, mengindikasikan bahwa pendidikan kejuruan pada tingkat SMK umumnya berhasil menyiapkan lulusannya untuk terjun ke bidang yang relevan.

Diagram. 3.2.9
Lulusan Sekolah Menengah Bekerja dan Berwirausaha Selaras dengan Keahlian



Sumber: Tracer Study Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

Lulusan sekolah menengah yang bekerja sesuai keahlian merupakan estimasi persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian ditambah persentase lulusan dengan kepuasan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dibagi dua berdasarkan sampel di daerah Berdasarkan gambar yang memperlihatkan data mengenai "Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja Sesuai Kompetensi Keahlian" untuk kategori SMK Negeri dan Swasta serta SMK Negeri, dapat disimpulkan bahwa perhitungan kesesuaian kerja ini menggunakan

metode estimasi yang menggabungkan dua indikator utama. Pertama, persentase lulusan SMK yang telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian resmi. Kedua, persentase lulusan yang mendapatkan kepuasan atau pengakuan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Kedua persentase ini kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan angka akhir yang mencerminkan tingkat keselarasan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan bidang pekerjaan yang mereka tekuni.

Diagram. 3.2.10
Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja Sesuai Kompetensi Keahlian



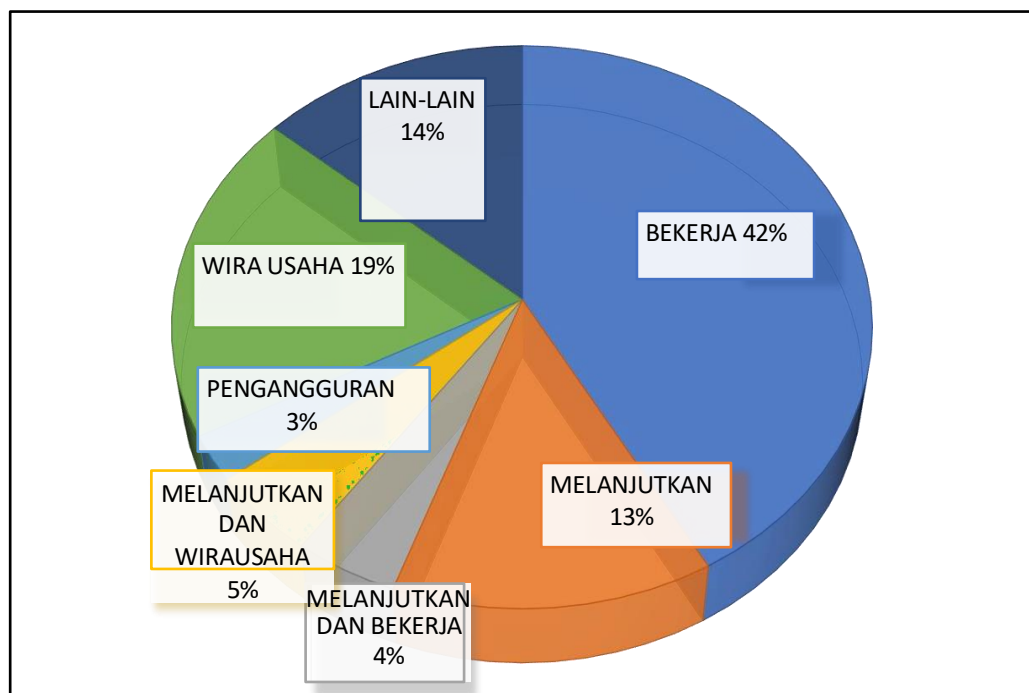
Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

Berdasarkan data Tracer Study Kabupaten Taban 2024, terlihat gambaran yang cukup komprehensif mengenai destinasi lulusan SMK setelah tamat. Sebanyak 42% lulusan memilih untuk langsung bekerja, menjadikannya jalur utama yang diambil oleh hampir setengah dari total lulusan. Sementara itu, 33% lainnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (melanjutkan studi), menunjukkan bahwa cukup banyak lulusan SMK yang tetap memiliki minat dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara akademis. Selain kedua jalur utama tersebut, terdapat pula pilihan yang menggabungkan antara bekerja dan studi. Sebanyak 4% lulusan memilih untuk melanjutkan studi sambil bekerja, mencerminkan upaya untuk tetap produktif secara ekonomi sekaligus meningkatkan kualifikasi. Ada pula 5% yang memadukan kuliah dengan

berwirausaha, menunjukkan jiwa entrepreneurship yang mulai dikembangkan sejak dini. Di sisi lain, persentase lulusan yang memilih untuk berwirausaha penuh sebesar 15%, angka yang cukup signifikan dan mengindikasikan bahwa pendidikan SMK juga berhasil menumbuhkan semangat kemandirian dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun, masih terdapat 14% lulusan yang menganggur (tidak bekerja, tidak kuliah, dan tidak berwirausaha) serta 3% yang belum bekerja atau melanjutkan studi (menganggur sementara atau dalam masa pencarian). Angka ini mengingatkan akan pentingnya dukungan lebih lanjut, baik dari sisi penyaluran kerja, pematapan keterampilan, maupun motivasi, agar lulusan dapat segera terserap dalam aktivitas produktif pascasekolah. Sementara lulusan SMK yang telah bekerja, melanjutkan ke pendidikan tinggi, bekerja sambil kuliah, kuliah sekalian wirausaha, berwirausaha dan pengangguran dapat dilihat pada data berikut.

Diagram. 3.2.11

Lulusan Sekolah Menengah yang Bekerja dan Melanjutkan Studi



Sumber: Tracer Study Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

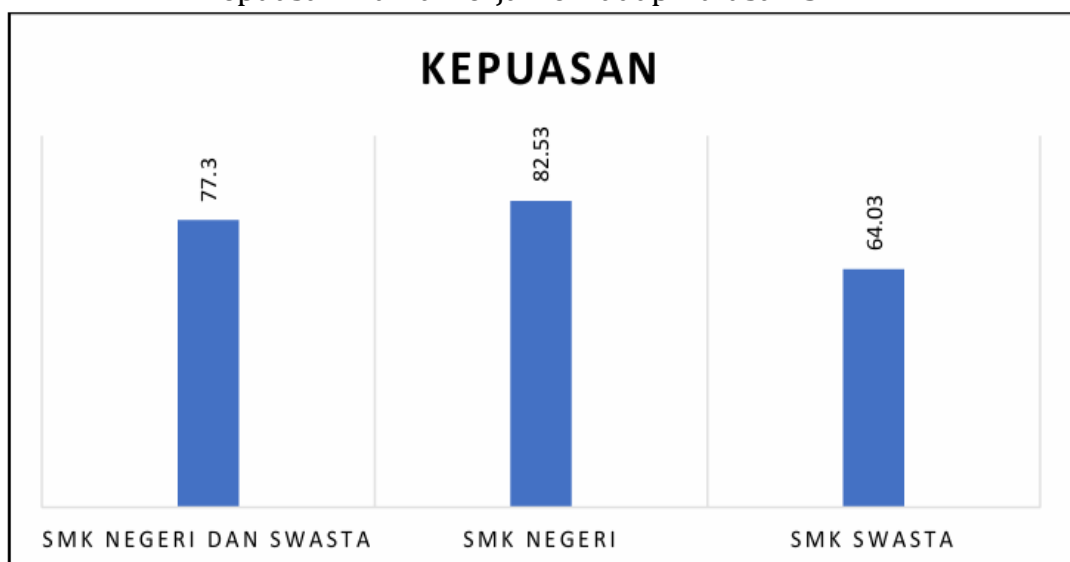
3.2.7. Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK

Indikator ini dihitung dengan mengestimasi persentase kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan penilaian atasan langsung bagi lulusan satu tahun terakhir yang bekerja dan memiliki atasan langsung. Data tersebut menunjukkan bahwa kompetensi lulusan

SMK Negeri, baik dari kepemilikan sertifikat kompetensi keahlian maupun kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja, telah berada pada kategori memadai atau baik. Sementara itu, lulusan SMK Swasta berada pada kategori sedang atau cukup baik. Berdasarkan data Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK, terlihat adanya perbedaan tingkat kepuasan antara lulusan SMK Negeri dan SMK Swasta. Indikator ini diukur melalui penilaian atasan langsung terhadap lulusan SMK yang bekerja dalam satu tahun terakhir dan memiliki atasan di tempat kerja. Secara umum, lulusan SMK Negeri dinilai telah memiliki kompetensi yang memadai, baik dari aspek sertifikasi keahlian maupun penerapan budaya kerja di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri berhasil membekali lulusan dengan keterampilan teknis bersertifikat serta sikap dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Di sisi lain, lulusan SMK Swasta memperoleh penilaian sedang atau cukup baik terkait kepemilikan sertifikat kompetensi dan budaya kerja. Meskipun tergolong memuaskan, tingkat kepuasan ini masih lebih rendah dibandingkan lulusan SMK Negeri, yang mengindikasikan adanya perbedaan kualitas pelatihan, fasilitas, atau kurikulum yang berdampak pada persepsi dunia kerja.

Diagram. 3.2.12

Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

3.3. DATA SEKTORAL PENDIDIKAN

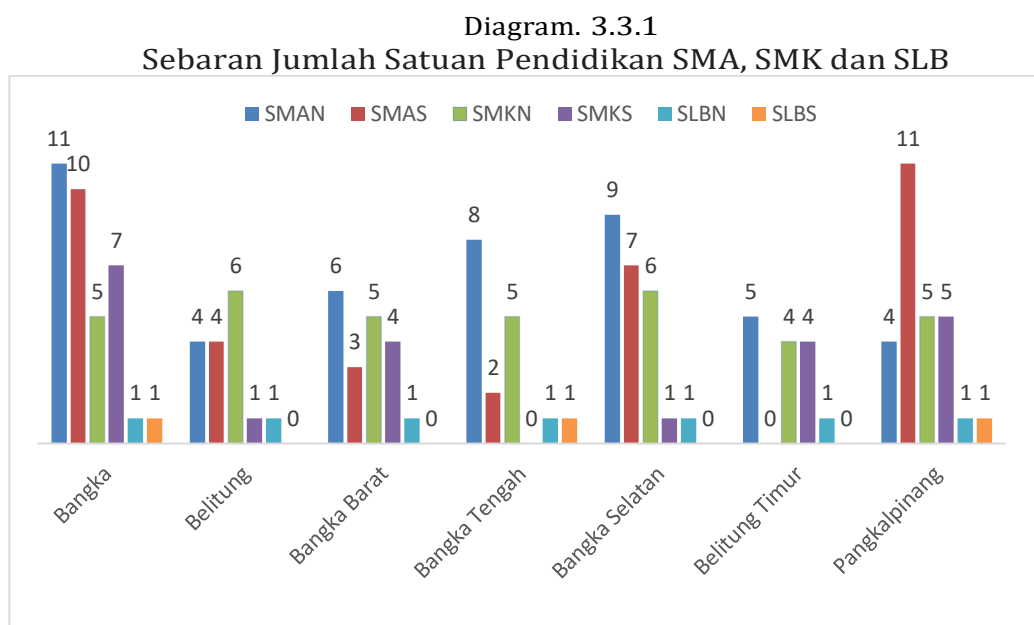
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Pendidikan nasional. telah menetapkan 8 standar pendidikan nasional, antara lain: Standar Isi; Standar Proses; Standar Penilaian; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan.

3.3.1. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Data yang disajikan adalah data Sekolah Menengah Tingkat Atas di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai total satuan pendidikan negeri maupun swasta sebanyak 152 sekolah, terdiri atas 84 SMA, 58 SMK, serta 10 SLB. Gambar 3.3.1 menampilkan data persentase jumlah Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan grafik yang menunjukkan Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dianalisis lebih lanjut tentang komposisi dan proporsi penyebaran jenjang pendidikan menengah dan khusus di provinsi tersebut. Dari total 152 satuan pendidikan, Sekolah Menengah Atas (SMA) mendominasi dengan jumlah 84 sekolah, yang setara dengan 55.3% dari total satuan pendidikan. Dominasi ini menunjukkan bahwa pendidikan umum pada jenjang menengah atas masih menjadi pilihan utama dan memiliki infrastruktur yang paling banyak tersedia di wilayah ini. Di posisi kedua, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 58 sekolah, atau sekitar 38.2% dari total. Proporsi yang cukup signifikan ini mencerminkan komitmen daerah untuk mengembangkan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Jumlah SMK yang hampir mencapai 40% menandakan adanya keseimbangan yang baik antara penyediaan pendidikan akademik dan kejuruan.

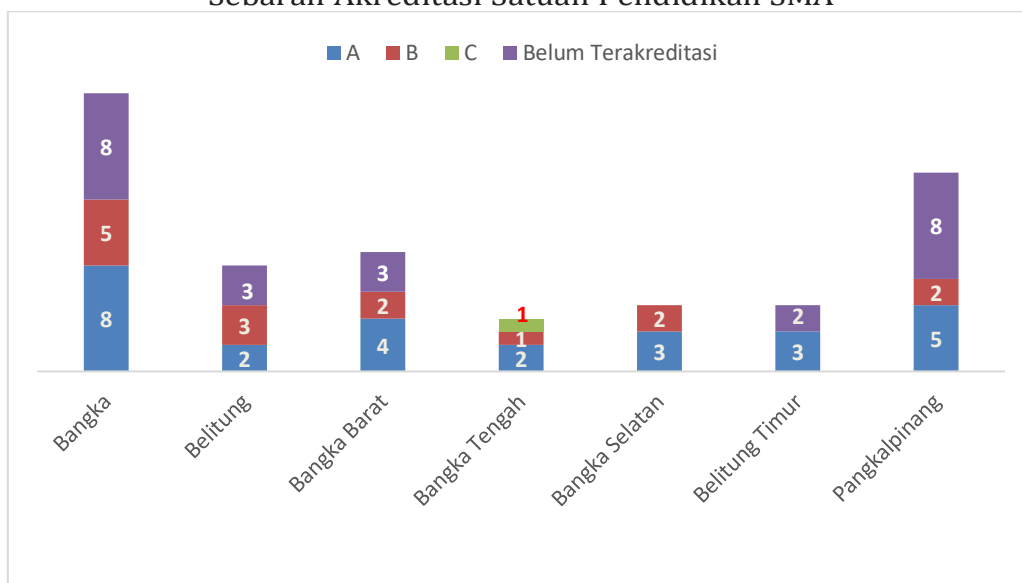
Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) berjumlah 10 sekolah, yang merepresentasikan 6.6% dari total satuan pendidikan. Meskipun jumlahnya paling kecil, keberadaan SLB yang tersebar ini sangat krusial untuk memastikan pemerataan dan pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan penilaian resmi yang memastikan bahwa sebuah sekolah telah memenuhi standar kualitas tertentu yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Proses ini sangat penting karena memberikan gambaran mengenai mutu pendidikan, kelayakan pengelolaan, serta kemampuan sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang efektif. Akreditasi juga menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Selain itu, hasil akreditasi dapat membantu pemerintah dalam menentukan arah pembinaan dan pengembangan sekolah. Berikut sebaran akreditasi satuan pendidikan jenjang SMA yang menjadi gambaran kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diagram 3.3.2

Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SMA



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

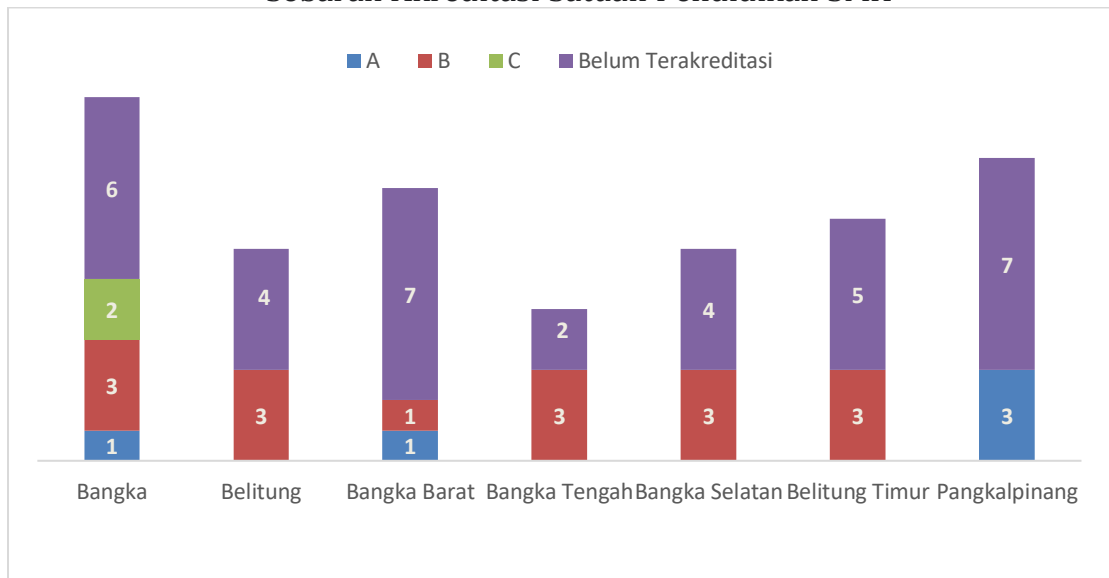
Grafik sebaran akreditasi SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah sekolah belum terakreditasi paling banyak, masing-masing 8 sekolah. Untuk akreditasi A, Kabupaten Bangka memiliki jumlah tertinggi yaitu 8 sekolah, diikuti Bangka Barat (4 sekolah) dan Pangkalpinang (5 sekolah). Akreditasi B tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah bervariasi antara 1–5 sekolah. Sementara itu, akreditasi C hanya muncul di Bangka dan Bangka Tengah.

mengelompokkan akreditasi SMA ke dalam beberapa kategori utama, yaitu A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), dan B dalam Trans-Pendidikan (mungkin mengacu pada status "Terakreditasi B" yang sedang dalam proses peninjauan atau perpanjangan). Dari sebaran yang terlihat, mayoritas satuan pendidikan SMA di provinsi ini kemungkinan besar berada pada peringkat akreditasi B, yang menandakan bahwa sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan kualitas yang baik. Peringkat ini menunjukkan kinerja yang solid dalam aspek-aspek seperti proses pembelajaran, kompetensi pendidik, pengelolaan sarana prasarana, dan pengelolaan sekolah. Sementara itu, sekolah dengan akreditasi A merepresentasikan satuan pendidikan yang telah melampaui standar minimal dan berkinerja unggul dalam berbagai indikator. Jumlah sekolah dalam kategori ini menjadi tolok ukur pencapaian tertinggi dan

sebaiknya terus ditingkatkan. Di sisi lain, sekolah dengan akreditasi C menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan yang signifikan untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Selanjutnya Sebaran akreditasi satuan Pendidikan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada diagram berikut.

Diagram. 3.3.3
Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SMK



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

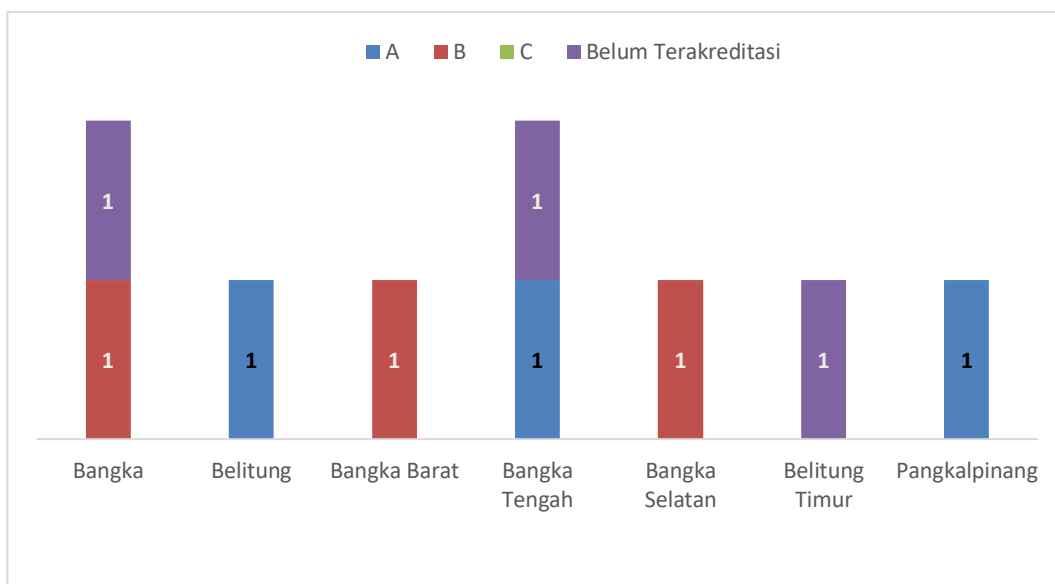
Grafik sebaran akreditasi SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang belum terakreditasi masih cukup tinggi. Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat masing-masing memiliki 7 SMK belum terakreditasi, disusul Kabupaten Bangka dengan 6 SMK. Bagi Sekolah yang telah terakreditasi, akreditasi A masih terbatas, dengan jumlah tertinggi di Pangkalpinang dan Bangka (masing-masing 3 sekolah). Akreditasi B terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan variasi antara 1–4 sekolah. Sementara itu, akreditasi C hanya ditemukan di Kabupaten Bangka sebanyak 2 sekolah. Data tersebut mengungkapkan beberapa temuan kritis dan peluang peningkatan. Tingginya jumlah SMK yang belum terakreditasi menjadi perhatian utama. Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat, sebagai pusat aktivitas dan wilayah berkembang, masing-masing mencatat 7 SMK yang belum terakreditasi, diikuti Kabupaten Bangka dengan 6 SMK. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan publik dan dunia industri terhadap kualitas lulusan, serta menghambat akses sekolah terhadap berbagai bentuk bantuan dan pengakuan formal. Di sisi pencapaian,

akreditasi A (Unggul) masih sangat terbatas, hanya dimiliki oleh 3 sekolah di Pangkalpinang dan 3 sekolah di Kabupaten Bangka.

Selanjutnya Sebaran akreditasi satuan Pendidikan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada diagram berikut.

Diagram. 3.3.4

Sebaran Akreditasi Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

Data akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kondisi yang cukup beragam dan mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan mutu yang terfokus. Dari ketujuh wilayah kabupaten/kota, hanya dua wilayah yang memiliki SLB dengan akreditasi tertinggi, yaitu A (Unggul), yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Pencapaian ini patut diapresiasi dan dijadikan model praktik baik. Mayoritas wilayah lainnya memiliki SLB dengan akreditasi B (Baik), yang mencakup Kabupaten Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar SLB telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan kualitas yang baik, meskipun masih ada ruang untuk bergerak ke tingkat unggul. Temuan yang paling memerlukan perhatian adalah adanya satu wilayah, yaitu Kabupaten Belitung Timur, yang SLB-nya masih berada pada peringkat akreditasi C (Cukup). Status ini mengindikasikan bahwa satuan pendidikan tersebut masih berada pada tahap memenuhi standar minimal. Di sisi lain, tidak ada satupun SLB yang tercatat dalam kategori "Belum Terakreditasi", yang merupakan aspek positif karena menunjukkan bahwa semua SLB formal telah melalui proses penilaian dasar.

3.3.2. Peserta Didik

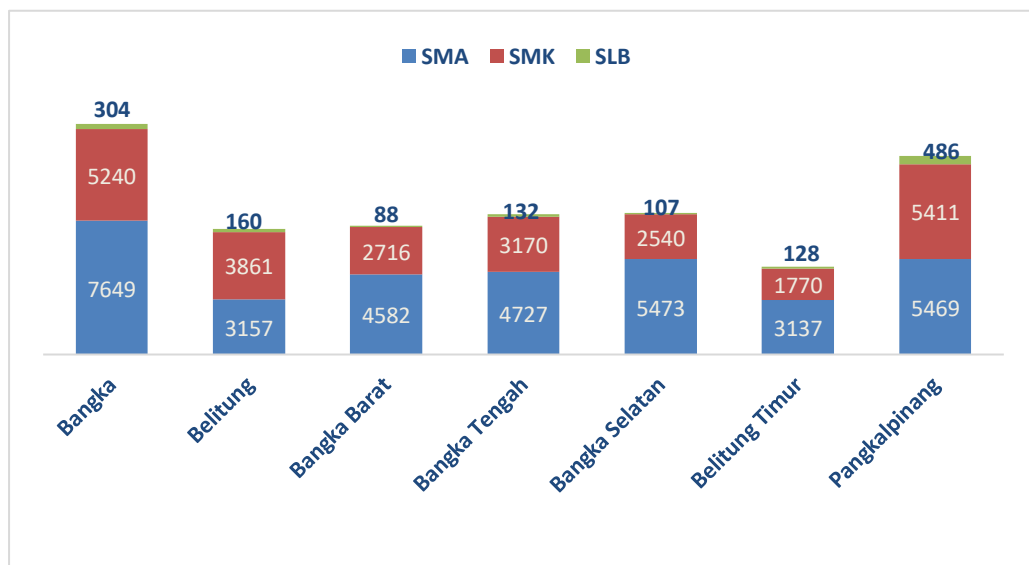
Menurut Permendikbud Nomor 4 Tahun 2024, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Definisi ini menegaskan bahwa setiap individu yang mengikuti pendidikan berhak memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhannya. Peserta didik juga dipandang sebagai subjek yang perlu didukung agar berkembang secara optimal dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan. Peserta didik merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan yang berperan strategis dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Jumlah dan sebaran peserta didik menjadi indikator penting dalam menilai pemerataan akses pendidikan antarjenjang dan antarwilayah. Oleh karena itu, pendataan peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam perencanaan pendidikan berbasis data. Pendataan peserta didik dilakukan secara elektronik melalui sistem Dapodik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan setiap satuan pendidikan wajib memperbarui data secara berkala agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan..

Distribusi peserta didik juga dianalisis berdasarkan jenis kelamin, status sekolah (negeri dan swasta), serta jenis pendidikan (SMA, SMK, dan SLB). Data ini digunakan untuk menilai tingkat partisipasi serta keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif di daerah. Pemerintah Provinsi terus mendorong peningkatan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperkuat layanan pada sekolah luar biasa (SLB) serta menyediakan tenaga pendidik khusus yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif. Selain itu, perkembangan jumlah peserta didik setiap tahun digunakan untuk memperkirakan kebutuhan ruang belajar, guru, dan sarana pendukung lainnya. Misalnya, peningkatan jumlah peserta didik di jenjang SMK akan berdampak pada kebutuhan ruang praktik, peralatan kejuruan, serta kemitraan dengan dunia industri. Dengan demikian, data peserta didik tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat perencanaan kebutuhan pendidikan di masa mendatang.

1. Jumlah peserta didik

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, pada diagram 3.3.5 sebaran jumlah siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar-wilayah. Kabupaten Bangka memiliki jumlah siswa tertinggi, yaitu terdiri dari 7.649 siswa SMA, 5.240 siswa SMK, dan 304 siswa SLB. Kondisi ini menempatkan Bangka sebagai daerah dengan populasi peserta didik jenjang menengah terbesar. Di sisi lain, Kabupaten Belitung mencatat jumlah siswa yang lebih rendah dibanding Bangka, yakni 3.861 siswa SMA, 2.716 siswa SMK, dan 160 siswa SLB. Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah memiliki jumlah siswa yang relatif seimbang, dengan Bangka Barat mencatat 4.582 siswa SMA, 2.716 siswa SMK, dan 88 siswa SLB. Sementara itu, Bangka Tengah memiliki 4.727 siswa SMA, 3.170 siswa SMK, dan 132 siswa SLB. Kabupaten Bangka Selatan juga menunjukkan jumlah siswa yang cukup besar dengan 5.473 siswa SMA, 2.540 siswa SMK, dan 107 siswa SLB. Sementara itu, Belitung Timur menjadi daerah dengan jumlah siswa SMK terendah, yaitu 1.770 siswa, dengan 3.137 siswa SMA dan 128 siswa SLB. Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi menempati posisi kedua tertinggi setelah Bangka, dengan jumlah 5.469 siswa SMA, 5.411 siswa SMK, dan 486 siswa SLB. Jumlah siswa SMK di Pangkalpinang merupakan salah satu yang terbesar di provinsi ini.

Diagram. 3.3.5
Sebaran Jumlah Siswa SMA, SMK dan SLB

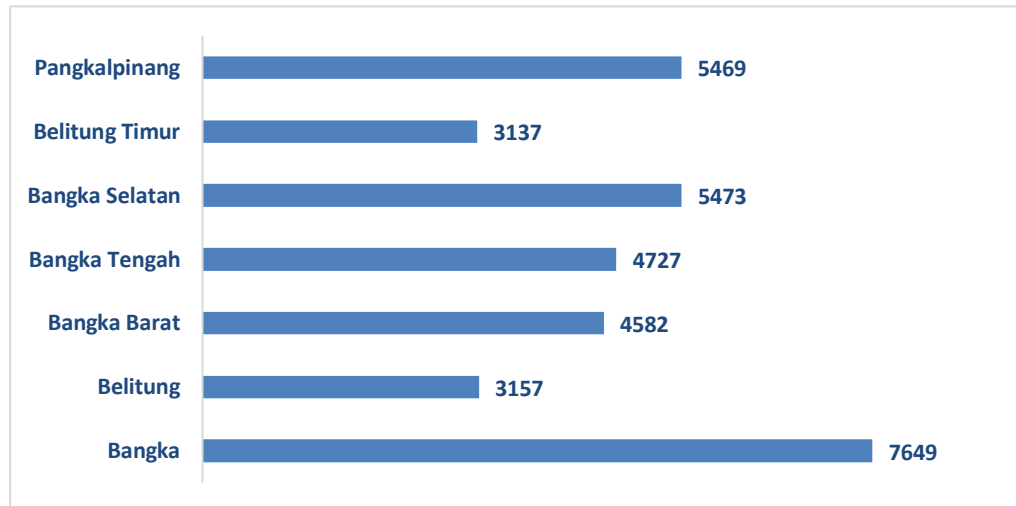


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan grafik 3.3.6 sebaran jumlah siswa SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa Kabupaten Bangka memiliki jumlah siswa tertinggi, yaitu 7.649 siswa. Disusul oleh Kabupaten Bangka Selatan dengan 5.473 siswa dan

Kota Pangkalpinang dengan 5.469 siswa. Sementara itu, jumlah siswa terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung, masing-masing 3.137 dan 3.157 siswa. Data ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah peserta didik yang cukup signifikan antarwilayah, yang dapat mencerminkan kondisi demografis maupun ketersediaan satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota. Sebaran jumlahnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram. 3.3.6
Sebaran Jumlah Siswa SMA di Provinsi Kep. Bangka Belitung

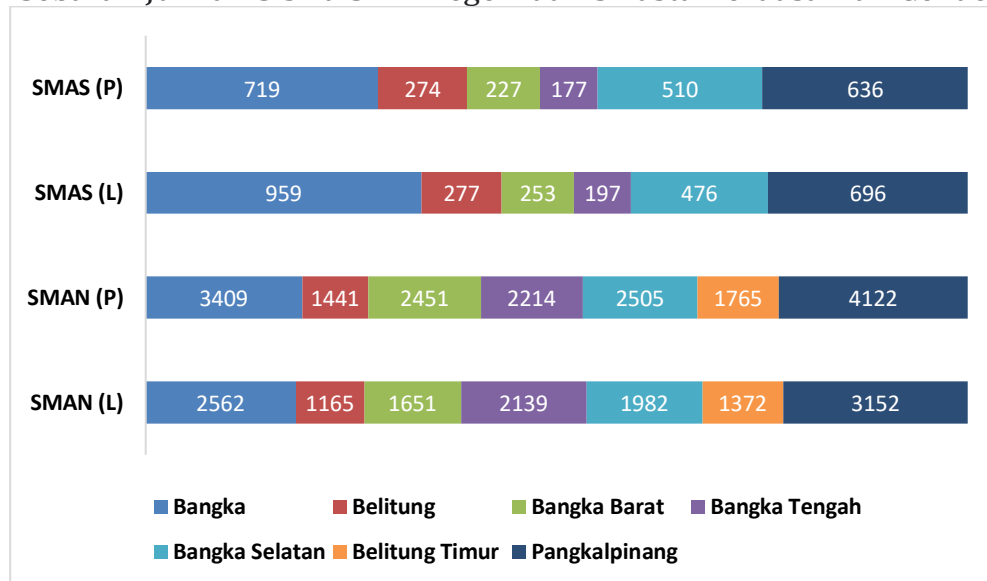


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan grafik diagram 3.3.7 sebaran jumlah siswa SMA Negeri dan Swasta menurut gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa jumlah siswa perempuan dan laki-laki pada jenjang SMA Negeri jauh lebih besar dibandingkan SMA Swasta. Untuk SMA Swasta, jumlah siswa laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan di hampir semua kabupaten/kota. Sementara itu, pada SMA Negeri, jumlah siswa perempuan mendominasi di beberapa daerah seperti Bangka, Bangka Barat, dan Pangkalpinang, sedangkan daerah lain menunjukkan selisih yang tidak terlalu jauh antara gender. Data berikut menunjukkan jumlah sebaran peserta didik SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan gender.

Diagram. 3.3.7

Sebaran Jumlah Siswa SMA Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender



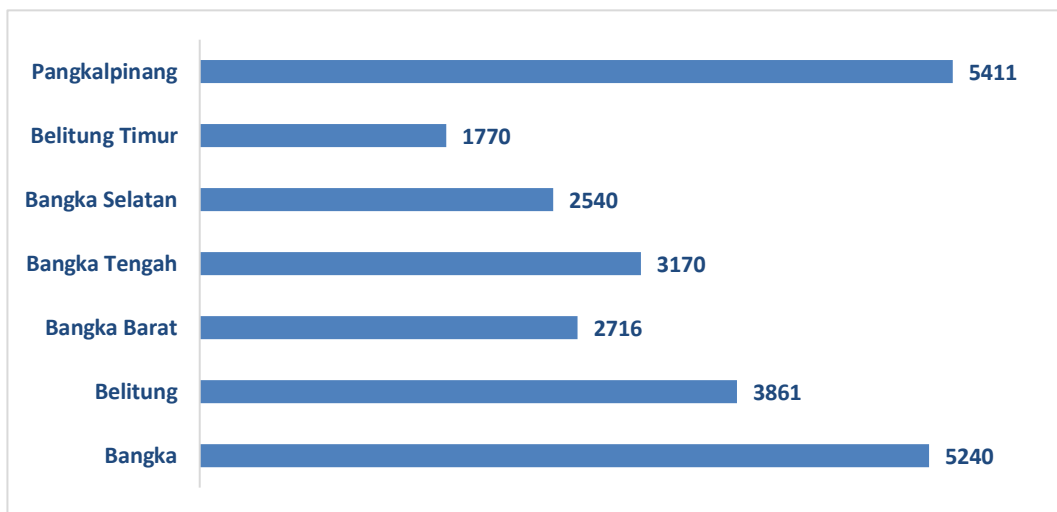
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan diagram 3.3.8 sebaran jumlah siswa SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa jumlah siswa terbanyak berada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dengan masing-masing 5.411 dan 5.240 siswa. Kabupaten Belitung juga memiliki jumlah siswa yang cukup besar, yaitu 3.861 siswa. Sementara itu, jumlah siswa terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur dengan 1.770 siswa. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kebutuhan dan minat pendidikan kejuruan di tiap wilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, ketersediaan satuan pendidikan, serta karakteristik ekonomi daerah. Secara keseluruhan, terdapat variasi dalam komposisi gender di tiap kabupaten/kota: Kabupaten Bangka dan Bangka Barat menunjukkan jumlah siswa perempuan (F) yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki (L). Sementara di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang, justru siswa laki-laki (L) yang mendominasi. Kabupaten Belitung menunjukkan komposisi yang hampir seimbang dengan sedikit keunggulan jumlah siswa perempuan.

Variasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh karakteristik program studi (kompetensi keahlian) yang ditawarkan di masing-masing wilayah. Dominasi perempuan di suatu daerah mungkin terkait dengan banyaknya program studi di bidang bisnis, manajemen, pariwisata, atau kesehatan, sementara dominasi laki-laki mungkin mengindikasikan konsentrasi program di bidang teknik, teknologi, kelautan, atau

pertambahan yang selaras dengan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, data sebaran jumlah siswa SMK ini tidak hanya menggambarkan besaran, tetapi juga mengisyaratkan pola minat, kesenjangan antar wilayah, dan kebutuhan penyesuaian strategi pengembangan pendidikan vokasi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diagram. 3.3.8
Sebaran Jumlah Siswa SMK di Provinsi Kep. Bangka Belitung



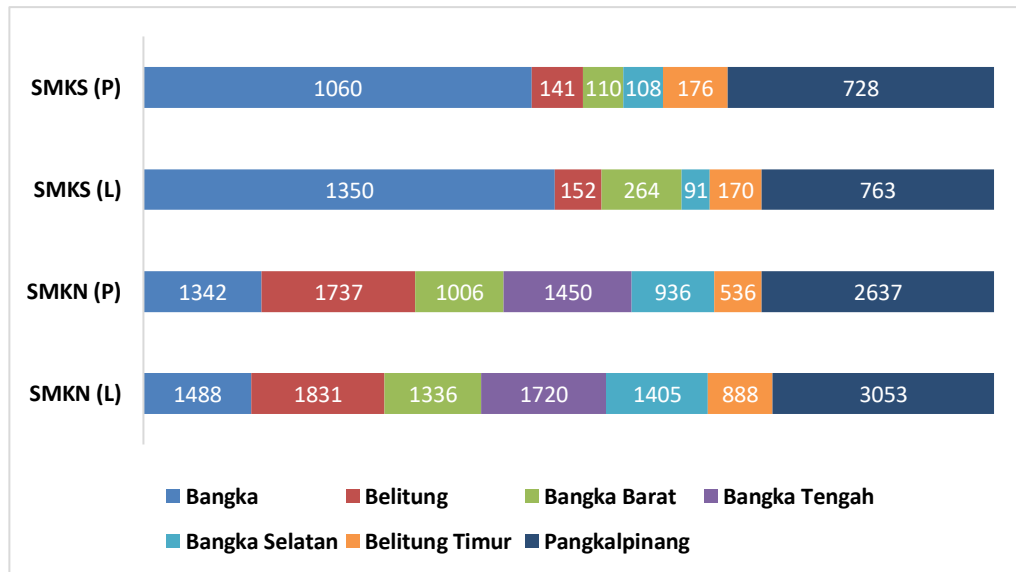
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Data diagram 3.3.9 berikut menunjukkan jumlah sebaran peserta didik SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan gender. Data menunjukkan bahwa jumlah siswa SMK, baik negeri maupun swasta, lebih banyak didominasi oleh siswa laki-laki. Kabupaten Bangka, Belitung, dan Kota Pangkalpinang menjadi wilayah dengan jumlah siswa tertinggi untuk kedua gender. Sebaliknya, Belitung Timur memiliki jumlah siswa paling sedikit. Pola ini menggambarkan bahwa konsentrasi peserta didik SMK lebih besar di daerah dengan populasi dan pilihan satuan pendidikan yang lebih banyak. Dominasi siswa laki-laki di sebagian besar wilayah, terutama di pusat-pusat pendidikan seperti Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung, menunjukkan karakteristik kuat dari penawaran program studi di SMK. Kemungkinan besar, kompetensi keahlian yang tersedia lebih banyak berada pada bidang yang secara tradisional diminati atau dianggap sesuai bagi laki-laki, seperti Teknik (mesin, otomotif, listrik), Kelautan, Pertambangan, Konstruksi, dan Teknologi Informasi. Hal ini perlu menjadi bahan refleksi untuk

mendorong **kesetaraan** gender dalam pendidikan vokasi, misalnya dengan memperkuat program studi di bidang Bisnis, Pariwisata, Tata Boga, Kecantikan, **atau** Keperawatan yang dapat menarik minat lebih banyak perempuan, serta membuka akses dan sosialisasi yang inklusif agar perempuan juga tertarik pada bidang teknik dan teknologi.

Diagram. 3.3.9

Sebaran Jumlah Siswa SMK Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender

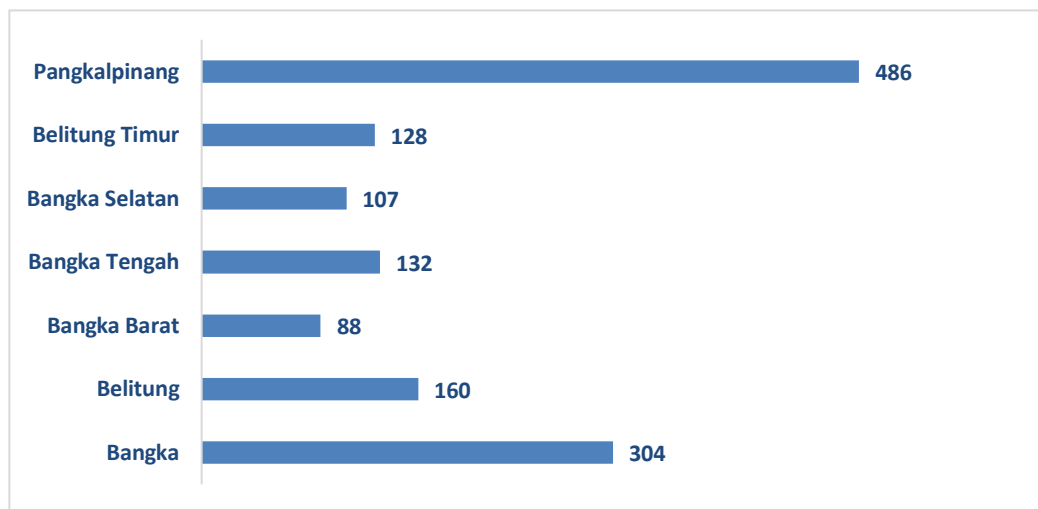


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berikutnya pada diagram 3.3.10 Berdasarkan sebaran jumlah siswa SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah siswa tertinggi dengan 486 siswa. Disusul oleh Kabupaten Bangka dengan 304 siswa dan Belitung dengan 160 siswa. Sementara itu, jumlah siswa terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dengan 88 siswa. Data ini menunjukkan bahwa konsentrasi peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak berada di wilayah dengan fasilitas pendidikan khusus yang lebih lengkap. Sebaran jumlahnya dapat dilihat pada diagram berikut. Dominasi jumlah siswa SLB di Kota Pangkalpinang (486 siswa) dan Kabupaten Bangka (304 siswa) sangat mencolok. Hal ini tidak hanya mencerminkan populasi yang lebih besar, tetapi sangat mungkin menunjukkan bahwa kedua wilayah ini berfungsi sebagai pusat layanan pendidikan inklusif dan khusus di provinsi ini. Keberadaan fasilitas yang lebih lengkap, tenaga ahli (seperti guru pendamping khusus, terapis), serta aksesibilitas yang lebih baik (misalnya, pusat rehabilitasi atau rumah sakit) menarik keluarga dari wilayah sekitarnya untuk menyekolahkan anaknya di sana. Sebaliknya,

jumlah siswa yang jauh lebih rendah di Kabupaten Bangka Barat (88 siswa) dan wilayah lainnya kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana SLB, jumlah satuan pendidikan yang sedikit, atau bahkan belum adanya SLB di beberapa daerah, sehingga anak berkebutuhan khusus terpaksa mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler atau tidak terlayani dengan optimal.

Diagram. 3.3.10
Sebaran Jumlah Siswa SLB di Provinsi Kep. Bangka Belitung



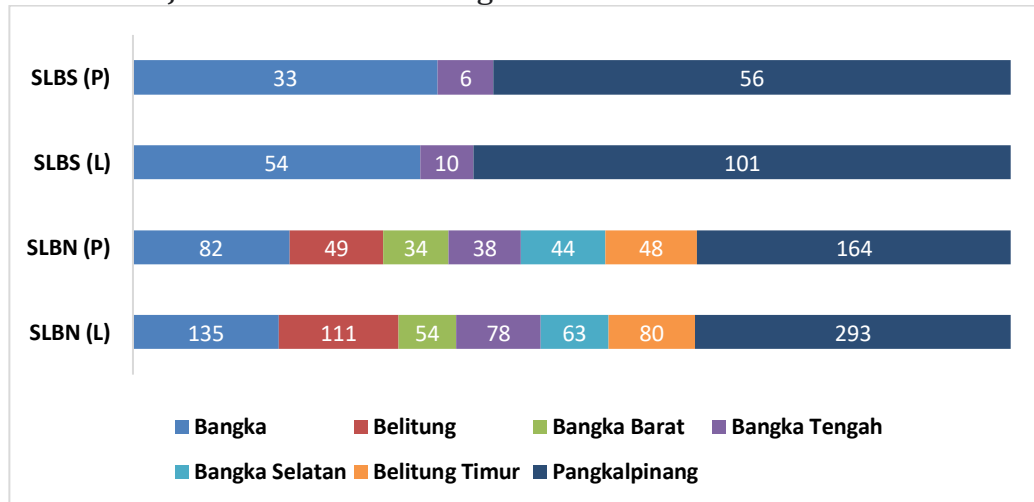
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Berdasarkan Diagram 3.3.11, data menunjukkan sebaran peserta didik SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan gender. Jumlah siswa SLB negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan variasi antarwilayah dan gender. Pada SLBS, jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sementara pada SLBN, jumlah siswa laki-laki juga lebih tinggi, terutama di Kota Pangkalpinang sebagai penyumbang terbesar. Kabupaten lain seperti Bangka, Belitung, dan Bangka Tengah turut memberikan kontribusi signifikan dengan pola distribusi yang relatif seimbang. Grafik ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan pendidikan khusus cukup tinggi, terutama bagi siswa laki-laki dan wilayah perkotaan. Data juga memperlihatkan bahwa Kota Pangkalpinang menjadi pusat layanan pendidikan khusus dengan jumlah siswa SLBN yang dominan. Hal ini menguatkan asumsi bahwa wilayah perkotaan berfungsi sebagai pusat rujukan karena kelengkapan fasilitas, ketersediaan tenaga ahli, serta akses layanan pendukung seperti

kesehatan dan rehabilitasi. Sementara itu, kontribusi Kabupaten Bangka, Belitung, dan Bangka Tengah menunjukkan bahwa meskipun tidak sebesar Pangkalpinang, wilayah tersebut telah memiliki satuan pendidikan khusus yang mampu melayani populasi lokal..

Diagram. 3.3.11

Sebaran Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Berdasarkan Gender



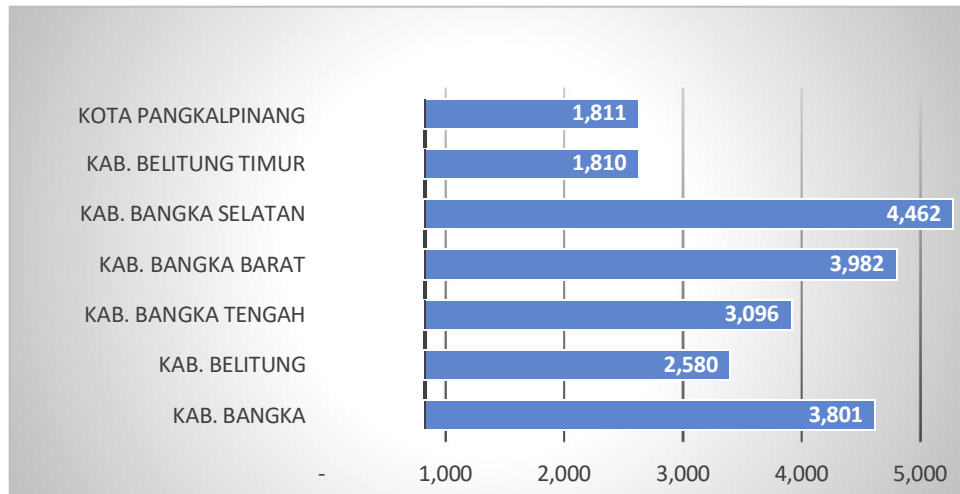
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2. Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak berusia 6 hingga 21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan karena faktor ekonomi, sosial, atau kesehatan. ATS juga mencakup anak yang pernah bersekolah lalu berhenti di tengah proses pembelajaran (putus sekolah), anak yang sudah lulus pada suatu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta anak usia tersebut yang belum pernah bersekolah. Beberapa penyebab utama anak tidak bersekolah antara lain keterbatasan ekonomi dan masalah sosial. Grafik berikut menunjukkan total anak 6-21 Tahun yang tidak bersekolah lagi berdasarkan Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak

Diagram. 3.3.12

Sebaran Total Anak Tidak Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

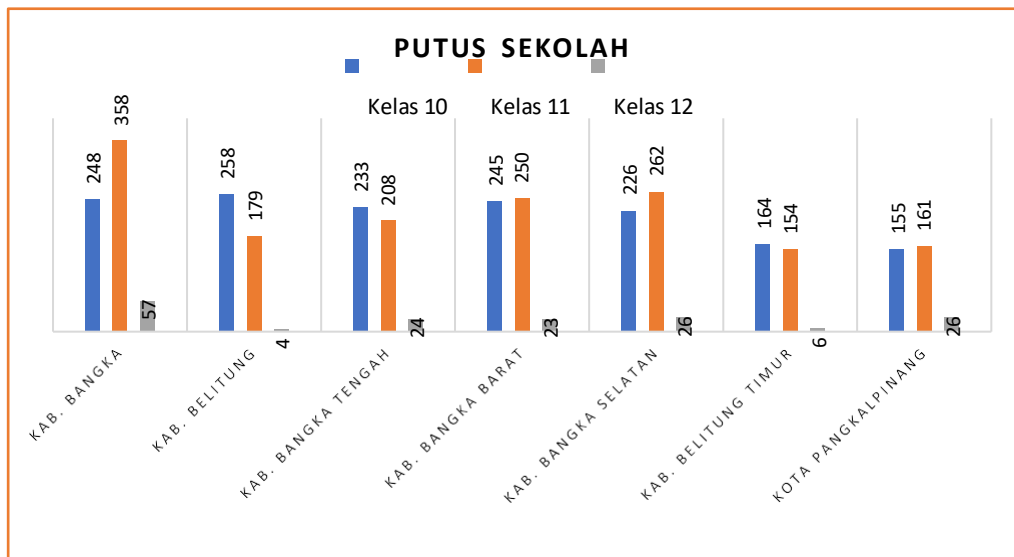


Sumber: Verval Data ATS Dinas Pendidikan Tahun 2024, (diolah).

Data berikut menunjukkan total anak 16-18 Tahun yang putus sekolah dijenjang Pendidikan menengah berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diagram. 3.3.13

Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah

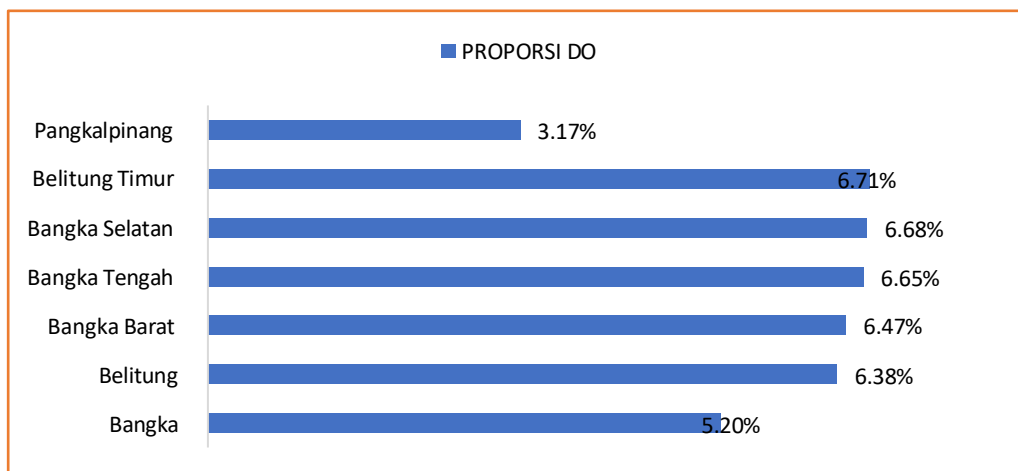


Sumber: Verval Data ATS Dinas Pendidikan Tahun 2024, (diolah).

Berikut informasi tentang proporsi siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data berikut menunjukkan bahwa proporsi putus sekolah di Bangka Belitung secara rata-rata berada diangka 5,89%. Sebaran proporsinya dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram. 3.3.14

Proporsi Siswa yang Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah

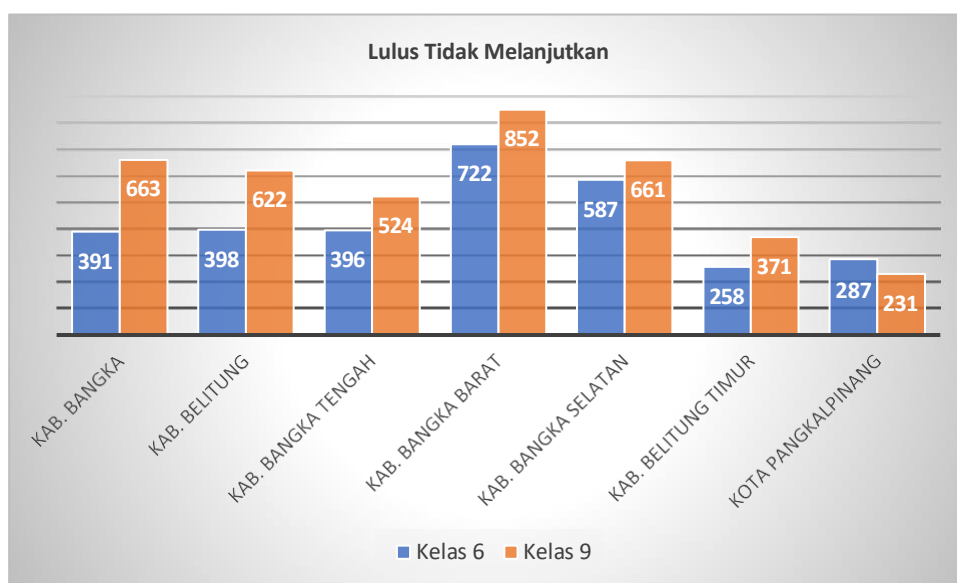


Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024, (diolah).

Berikutnya data anak jenjang Kelas 6 Sekolah Dasar dan Kelas 9 jenjang SMP yang lulus sekolah tapi tidak melanjutkan berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diagram. 3.3.15

Sebaran Siswa Lulus Tidak Melanjutkan Pada Jenjang Kelas 6 dan Kelas 9

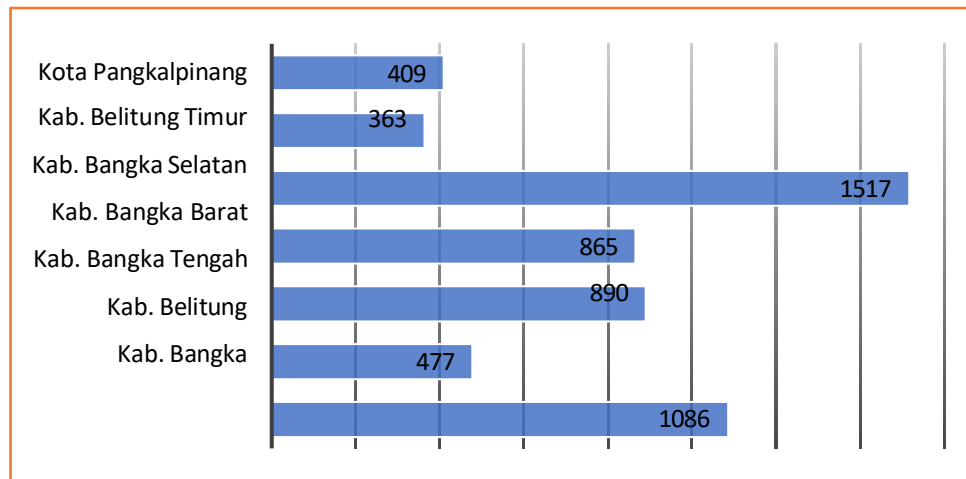


Sumber: Verval Data ATS Dinas Pendidikan Tahun 2024, (diolah).

Sementara itu penduduk yang tidak pernah bersekolah berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada grafik berikut ini. Namun data tersebut belum terverifikasi dan tervalidasi dengan baik dikarenakan berbagai aspek teknis dan waktu, namun data tersebut harus ditindaklanjuti untuk segera diverifikasi dan validasi.

Diagram. 3.3.16

Sebaran Penduduk yang Belum Pernah Bersekolah



Sumber: Verval Data ATS Dinas Pendidikan Tahun 2024, (diolah).

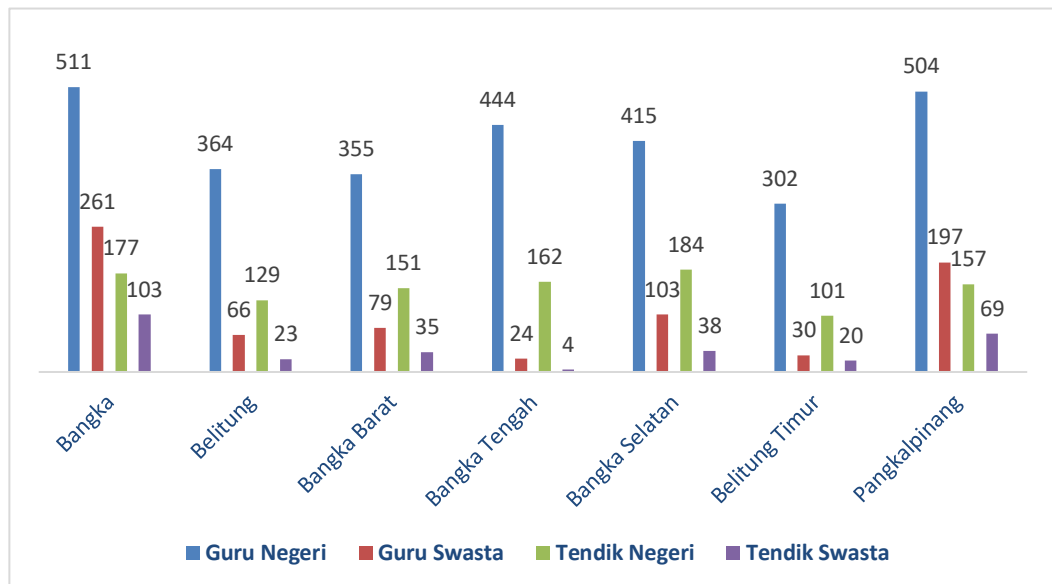
3.3.3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara tenaga kependidikan berperan mendukung kelancaran administrasi, teknis, dan operasional sekolah. Guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tenaga kependidikan adalah personel yang bertugas mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran, seperti tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga layanan khusus. Berikut disajikan data persebaran jumlah guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri

maupun swasta pada jenjang SMA, SMK, dan SLB berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sebaran Guru dan Tendik bisa dilihat pada grafik 3.3.16 sebagai berikut :

Diagram. 3.3.17
Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan (Swasta dan Negeri)
Tahun 2025



Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

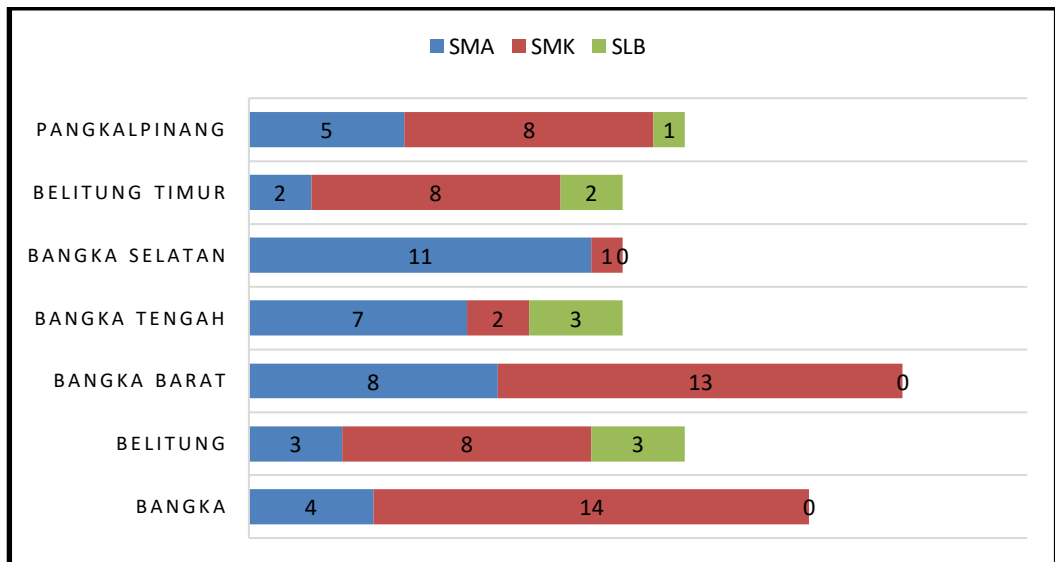
Pada diagram 3.3.17 Sebaran guru berpendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK, dan SLB menunjukkan bahwa sebagian besar guru dengan kualifikasi ini bertugas di SMK, terutama di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Pangkalpinang, Belitung Timur, dan Bangka Selatan memiliki distribusi yang lebih seimbang antara guru SMA, SMK, dan SLB. Sementara itu, Bangka Tengah dan Belitung memiliki jumlah guru SLB yang relatif kecil. Secara umum, SMK menjadi sekolah dengan jumlah guru berpendidikan SMA/DI-DIII terbanyak di hampir semua wilayah. Data di bawah ini merupakan sebaran total guru dengan Pendidikan SMA /DI-DIII pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebutuhan guru di SMK masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi layanan pembelajaran pada program keahlian yang beragam. Sebaran yang tidak merata antarwilayah juga menunjukkan perlunya strategi penataan dan pemerataan guru agar seluruh satuan pendidikan, khususnya SLB dan SMA di beberapa kabupaten, dapat memperoleh dukungan tenaga

pendidik yang memadai. Data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan kebutuhan guru, termasuk peningkatan kualifikasi dan distribusi yang lebih proporsional di masa mendatang.

Diagram. 3.3.18

Sebaran Guru dengan Pendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK dan SLB



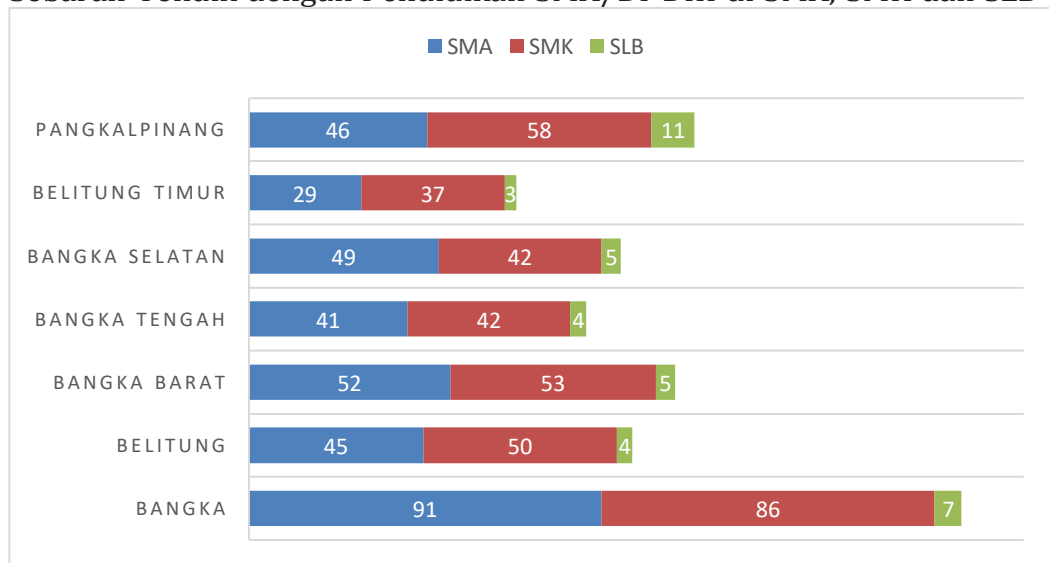
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.18 Sebaran tenaga kependidikan (tendik) berpendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK, dan SLB menunjukkan bahwa jumlah tendik terbanyak berada di Kabupaten Bangka, baik di SMA maupun SMK. Hampir semua wilayah memiliki komposisi yang cukup seimbang antara SMA dan SMK, meskipun SMK cenderung sedikit lebih banyak di beberapa daerah seperti Pangkalpinang dan Belitung. Jumlah tendik di SLB relatif kecil di seluruh wilayah, dengan variasi hanya 3–11 orang. Secara keseluruhan, kebutuhan tendik berpendidikan menengah ini paling dominan pada satuan pendidikan SMA dan SMK dibanding SLB. Data di bawah ini merupakan sebaran total Tendik dengan Pendidikan SMA /DI-DIII pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data menunjukkan pola yang jelas di mana kebutuhan tenaga kependidikan (tendik) dengan kualifikasi pendidikan menengah (SMA/DI-DIII) paling tinggi berada di satuan pendidikan SMA dan SMK, dengan Kabupaten Bangka sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi untuk kedua jenjang tersebut. Hal ini sangat wajar mengingat jumlah

satuan pendidikan dan peserta didik di SMA dan SMK jauh lebih besar dibandingkan SLB, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga administrasi, laboran, pustakawan, atau teknisi dengan kualifikasi tersebut. Kecenderungan jumlah yang sedikit lebih tinggi di SMK dibanding SMA di beberapa wilayah (seperti Pangkalpinang dan Belitung) mungkin disebabkan oleh kebutuhan spesifik SMK akan tenaga teknis atau laboran untuk mendukung praktikum di bengkel.

Diagram. 3.3.19

Sebaran Tendik dengan Pendidikan SMA/DI-DIII di SMA, SMK dan SLB



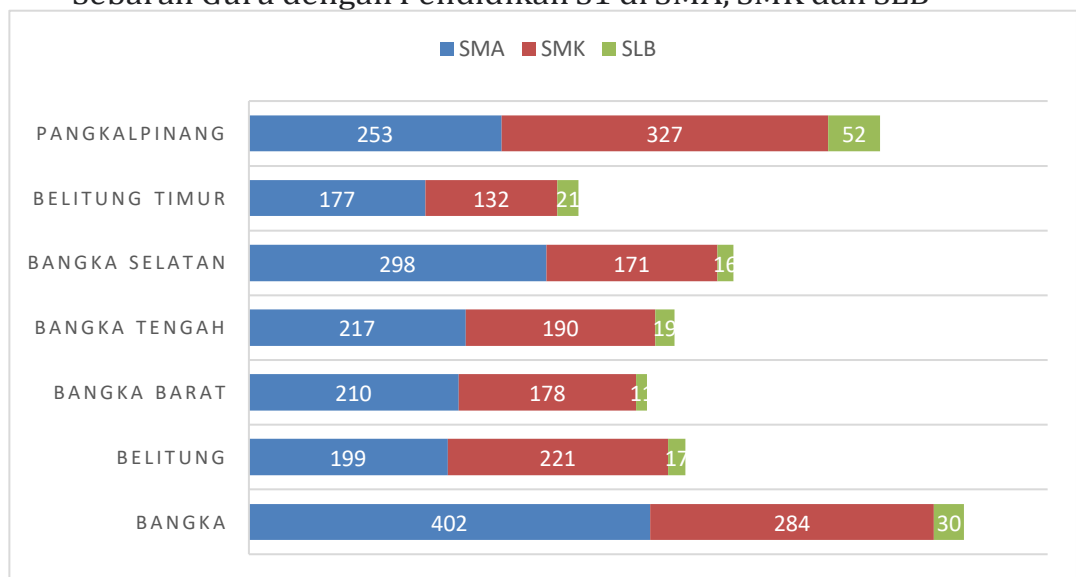
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.19 Grafik menunjukkan sebaran guru berpendidikan S1 di SMA, SMK, dan SLB pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum, jumlah guru SMA lebih banyak dibandingkan guru SMK dan SLB di semua wilayah. Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka memiliki jumlah guru S1 tertinggi, terutama pada jenjang SMA. Sementara itu, jumlah guru SLB relatif kecil di seluruh daerah. Pola ini menggambarkan masih dominannya kebutuhan guru SMA dibandingkan jenjang lainnya, serta pemerataan yang cukup konsisten antarwilayah. Kecenderungan tingginya jumlah guru S1 di SMA juga menunjukkan bahwa persyaratan kualifikasi akademik di jenjang ini telah terpenuhi dengan baik. Sebaran yang relatif merata menandakan adanya distribusi tenaga pendidik yang cukup proporsional, meskipun beberapa wilayah masih membutuhkan

penambahan guru pada SMK dan SLB untuk mendukung layanan pendidikan yang lebih optimal. Informasi ini dapat menjadi dasar penting dalam perencanaan pemenuhan formasi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di tiap kabupaten/kota. Berikut ini merupakan sebaran total guru dengan Pendidikan S1 pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diagram. 3.3.20

Sebaran Guru dengan Pendidikan S1 di SMA, SMK dan SLB



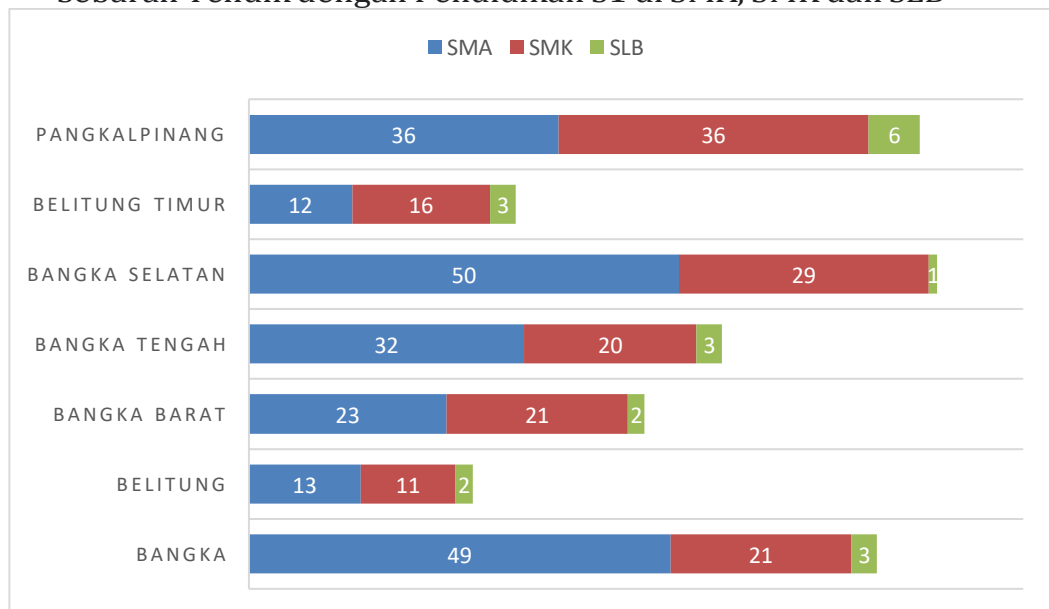
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah)

Pada diagram 3.3.20 Grafik menunjukkan sebaran tenaga kependidikan (tendik) berpendidikan S1 di SMA, SMK, dan SLB pada setiap kabupaten/kota. Jumlah tendik S1 terbesar berada pada jenjang SMA di hampir semua wilayah, khususnya di Bangka Selatan, Bangka, dan Bangka Tengah. Jumlah tendik SMK relatif lebih kecil dan bervariasi antarwilayah, sementara tendik SLB merupakan yang paling sedikit di seluruh daerah. Secara keseluruhan, kebutuhan dan ketersediaan tendik S1 masih didominasi oleh jenjang SMA. Berikut ini merupakan sebaran total tendik dengan Pendidikan S1 pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data secara konsisten menunjukkan bahwa jenjang SMA memiliki jumlah guru bergelar S1 terbanyak di hampir seluruh kabupaten/kota. Hal ini sangat menonjol di wilayah dengan basis pendidikan yang kuat seperti Kabupaten Bangka (602 guru), Bangka Tengah (326 guru), dan Bangka

Selatan (272 guru). Dominasi ini wajar karena SMA sebagai pendidikan umum menengah atas membutuhkan guru dengan spesialisasi mata pelajaran akademik (seperti Matematika, Fisika, Bahasa, IPS) yang kualifikasi utamanya adalah sarjana (S1) bidang pendidikan. Jumlah guru S1 di SMK secara umum lebih rendah dibandingkan SMA, meskipun variasi antar wilayah cukup besar. Jumlah guru S1 di SLB adalah yang paling kecil, bahkan terlihat sangat minim (ditandai dengan angka 0.5 yang mungkin mewakili jumlah kecil). Ini merupakan titik kritis dalam sistem pendidikan inklusif. Guru di SLB harus memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk dapat menangani berbagai jenis kebutuhan khusus siswa secara efektif.

Diagram. 3.3.21

Sebaran Tendik dengan Pendidikan S1 di SMA, SMK dan SLB



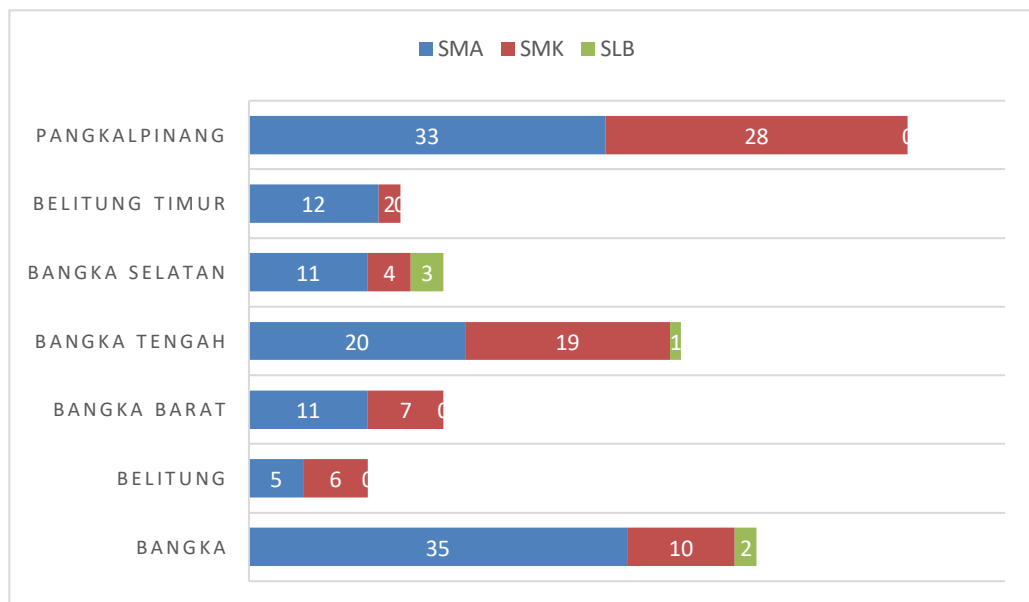
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.21 Grafik menunjukkan sebaran guru berpendidikan S2 di SMA, SMK, dan SLB pada setiap kabupaten/kota. Jumlah guru S2 paling banyak terdapat pada jenjang SMA, terutama di Pangkalpinang dan Bangka. Guru S2 di SMK jumlahnya lebih sedikit dan bervariasi antarwilayah, sedangkan guru S2 di SLB merupakan yang paling sedikit di seluruh daerah. Secara keseluruhan, ketersediaan guru berpendidikan S2 masih terbatas dan lebih terpusat pada jenjang SMA. Sebaran total guru dengan Pendidikan S2 pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konsentrasi guru bergelar magister (S2) paling tinggi di jenjang

SMA, dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sebagai wilayah penyumbang utama. Pola ini sangat logis karena beberapa alasan: Tuntutan Akademik yang Lebih Tinggi: SMA sebagai gerbang menuju perguruan tinggi membutuhkan guru dengan kedalaman ilmu dan metodologi penelitian yang lebih baik, yang sebagian diperoleh melalui pendidikan S2. Akses dan Motivasi: Guru-guru di wilayah perkotaan seperti Pangkalpinang dan kabupaten dengan fasilitas pendidikan tinggi seperti Bangka memiliki akses yang lebih mudah untuk melanjutkan studi S2, baik karena kedekatan geografis dengan perguruan tinggi penyelenggara maupun dukungan kelembagaan.

Diagram. 3.3.22

Sebaran Guru dengan Pendidikan S2 di SMA, SMK dan SLB



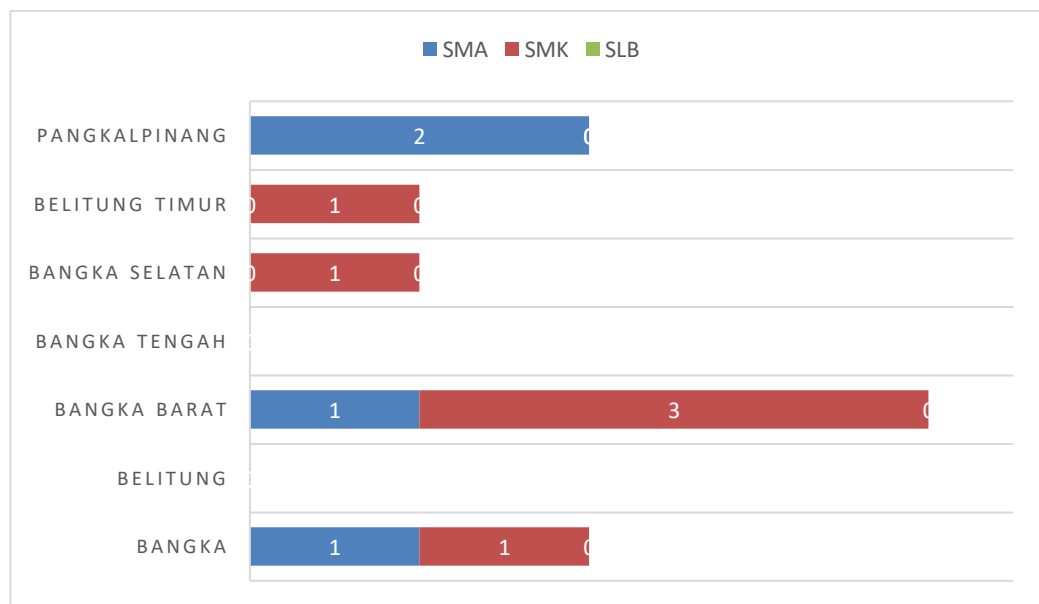
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.32 Grafik menunjukkan jumlah tenaga kependidikan (tendik) berpendidikan S2 di SMA, SMK, dan SLB pada tiap kabupaten/kota. Secara umum, jumlah tendik S2 masih sangat terbatas di seluruh wilayah. Pangkalpinang dan Bangka memiliki tendik S2 pada jenjang SMA, sedangkan beberapa daerah seperti Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Barat memiliki tendik S2 pada jenjang SMK. Tidak terlihat adanya tendik S2 di SLB. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualifikasi S2 di kalangan tendik masih rendah dan belum merata di seluruh daerah. Sebaran total tendik dengan Pendidikan S2 pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB baik pada sekolah negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA: Keberadaan tendik S2 di

Pangkalpinang dan Bangka kemungkinan besar diisi oleh pejabat struktural seperti Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Pengawas Sekolah, atau Kepala Sekolah di SMA-SMA unggulan. Gelar S2 bagi mereka berfungsi untuk kapasitas manajerial, pengawasan, dan perencanaan pendidikan yang lebih strategis. SMK: Variasi kehadiran tendik S2 di beberapa SMK di berbagai daerah (tidak hanya di pusat) bisa merupakan indikasi positif. Ini mungkin menunjukkan adanya kepala sekolah atau pengawas SMK yang berinisiatif meningkatkan kualifikasi untuk mengelola dan membina pendidikan vokasi yang kompleks, atau adanya tenaga pengembang kurikulum vokasi di tingkat daerah. SLB: Ketidakhadiran tendik S2 di jenjang SLB adalah titik buta (blind spot) yang serius. Padahal, pengelolaan dan kebijakan pendidikan khusus membutuhkan perencana dan pengawas dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang disabilitas dan pendidikan inklusif. Ketiadaan ini berisiko membuat kebijakan untuk SLB kurang berbasis bukti dan penelitian.

Diagram. 3.3.23

Sebaran Tendik dengan Pendidikan S2 di SMA, SMK dan SLB



Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.23 Grafik menunjukkan jumlah guru SMA, SMK, dan SLB berdasarkan status kepegawaian. Secara keseluruhan, guru berstatus PNS merupakan kelompok terbesar, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Guru PPPK juga memiliki jumlah yang cukup besar, meskipun masih berada di bawah PNS. Sementara itu, guru honorer serta guru yayasan di sekolah swasta jumlahnya lebih sedikit, namun tetap berperan dalam mendukung kebutuhan tenaga pengajar. Pada semua

status kepegawaian, jumlah guru SLB terlihat paling kecil dibandingkan SMA dan SMK. Dominasi PNS dan Stabilitas Tenaga Pengajar:

Dominasi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jenjang SMA dan SMK merupakan indikator positif dari stabilitas dan jaminan kualitas tenaga pengajar inti. Status PNS memberikan rasa aman secara ekonomi dan karier, yang pada teori dapat mendorong guru untuk fokus pada pengembangan profesional tanpa khawatir akan keamanan kerja. Namun, dominasi ini juga perlu diimbangi dengan mekanisme penilaian kinerja yang ketat untuk memastikan bahwa stabilitas tersebut tidak berubah menjadi kondisi nyaman yang kurang produktif.

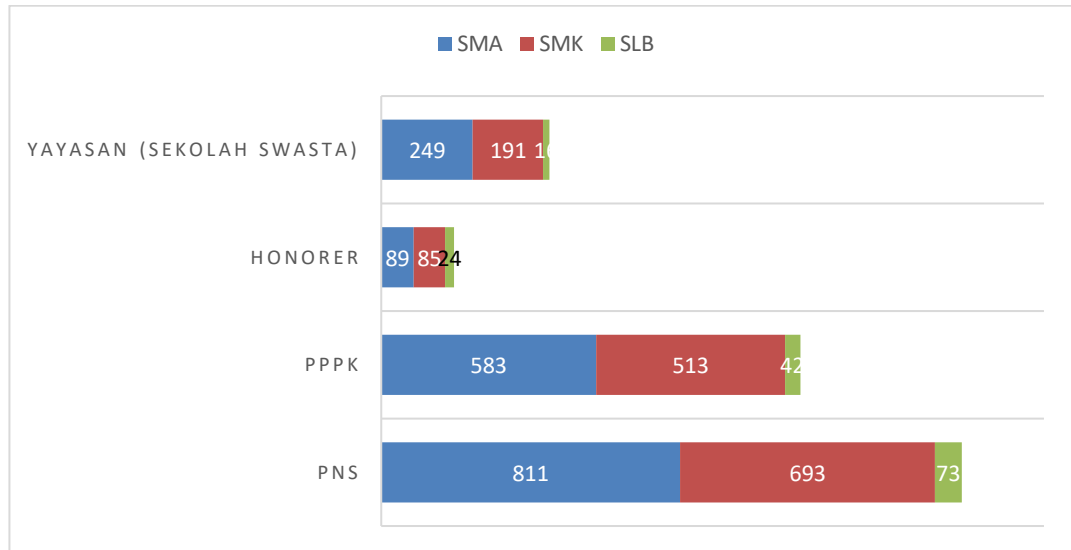
Peran Penting Guru PPPK dan Transisi Kebijakan: Keberadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah yang cukup besar mencerminkan upaya pemerintah memenuhi kekurangan guru PNS melalui jalur yang lebih fleksibel namun tetap terjamin secara legal dan finansial dibandingkan honorer murni. Guru PPPK menjadi penopang utama sistem di banyak sekolah dan berperan crucial dalam proses pembelajaran. Keberlangsungan dan kualitas program PPPK ini perlu terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan motivasi mengajar tetap tinggi, sehingga tidak muncul kesenjangan kualitas antara guru PNS dan PPPK. Tantangan Guru Honorer dan Guru Yayasan: Jumlah yang lebih sedikit dari guru honorer dan guru yayasan di sekolah swasta menggambarkan dua hal. Pertama, adanya upaya pemerintah untuk merasionalisasi jumlah guru tidak tetap melalui program PPPK. Kedua, mencerminkan tantangan sustainability sekolah swasta dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas dengan sistem remunerasi yang seringkali bergantung pada kemampuan finansial yayasan dan iuran siswa. Kelompok guru ini sering berada dalam kondisi yang paling rentan secara sosial-ekonomi, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah, misalnya melalui program pelatihan berkelanjutan atau skema bantuan tunjangan.

Kondasi Khusus di Jenjang SLB: Jumlah guru yang paling kecil di semua kategori status kepegawaian pada jenjang SLB konsisten dengan data sebelumnya tentang jumlah satuan pendidikan dan siswa SLB yang memang lebih sedikit. Namun, hal ini juga memperkuat analisis tentang kerentanan dan kelangkaan tenaga guru di bidang pendidikan khusus.

Baik PNS, PPPK, honorer, maupun guru yayasan di SLB jumlahnya terbatas, yang mengindikasikan bahwa daya tarik untuk menjadi guru SLB masih rendah, mungkin karena beban kerja yang dianggap lebih berat, kebutuhan kompetensi khusus, atau kurangnya insentif yang memadai.

Diagram. 3.3.24

Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaian



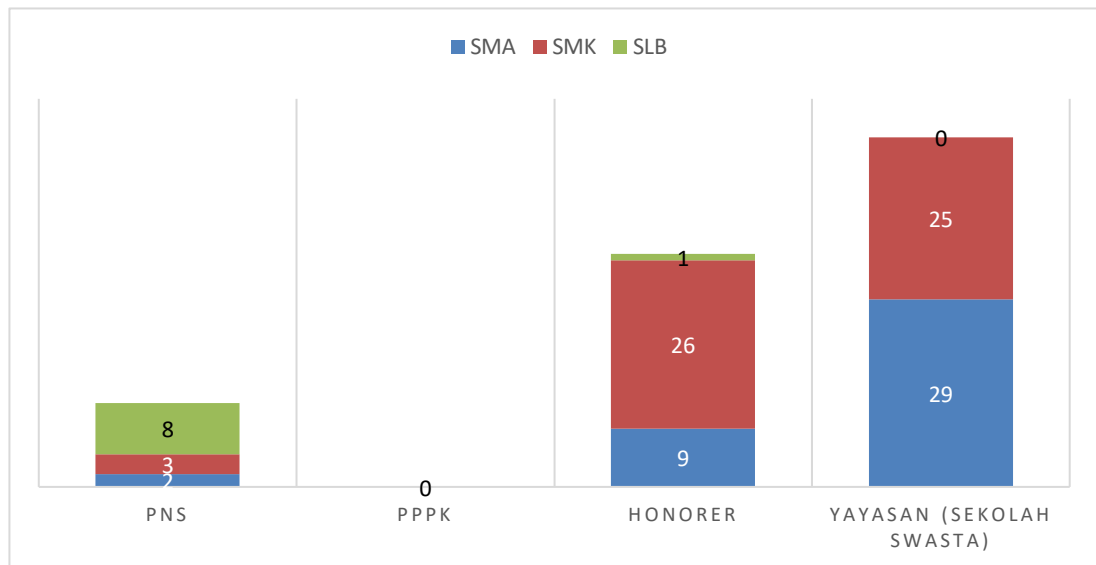
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.324. Grafik menunjukkan jumlah guru SMA, SMK, dan SLB berpendidikan SMA/DI–DIII menurut status kepegawaian. Pada kategori PNS, jumlahnya relatif kecil dengan SMK paling banyak. Tidak ada guru pada kategori PPPK. Guru honorer didominasi oleh SMK, sementara SMA dan SLB lebih sedikit. Pada sekolah swasta (yayasan), jumlah guru paling tinggi, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Secara keseluruhan, guru berpendidikan SMA/DI–DIII paling banyak bekerja di sekolah swasta dan honorer dibanding sebagai PNS. Dominasi PNS dan Stabilitas Tenaga Pengajar: Dominasi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jenjang SMA dan SMK merupakan indikator positif dari stabilitas dan jaminan kualitas tenaga pengajar inti. Status PNS memberikan rasa aman secara ekonomi dan karier, yang pada teori dapat mendorong guru untuk fokus pada pengembangan profesional tanpa khawatir akan keamanan kerja. Namun, dominasi ini juga perlu diimbangi dengan mekanisme penilaian kinerja yang ketat untuk memastikan bahwa stabilitas tersebut tidak berubah menjadi kondisi nyaman yang kurang produktif. Peran Penting

Guru PPPK dan Transisi Kebijakan: Keberadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah yang cukup besar mencerminkan upaya pemerintah memenuhi kekurangan guru PNS melalui jalur yang lebih fleksibel namun tetap terjamin secara legal dan finansial dibandingkan honorer murni. Guru PPPK menjadi penopang utama sistem di banyak sekolah dan berperan crucial dalam proses pembelajaran. Keberlangsungan dan kualitas program PPPK ini perlu terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan motivasi mengajar tetap tinggi, sehingga tidak muncul kesenjangan kualitas antara guru PNS dan PPPK. Tantangan Guru Honorer dan Guru Yayasan: Jumlah yang lebih sedikit dari guru honorer dan guru yayasan di sekolah swasta menggambarkan dua hal. Pertama, adanya upaya pemerintah untuk merasionalisasi jumlah guru tidak tetap melalui program PPPK. Kedua, mencerminkan tantangan sustainability sekolah swasta dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas dengan sistem remunerasi yang seringkali bergantung pada kemampuan finansial yayasan dan iuran siswa. Kelompok guru ini sering berada dalam kondisi yang paling rentan secara sosial-ekonomi, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah, misalnya melalui program pelatihan berkelanjutan atau skema bantuan tunjangan. Kondisi Khusus di Jenjang SLB: Jumlah guru yang paling kecil di semua kategori status kepegawaian pada jenjang SLB konsisten dengan data sebelumnya tentang jumlah satuan pendidikan dan siswa SLB yang memang lebih sedikit. Namun, hal ini juga memperkuat analisis tentang kerentanan dan kelangkaan tenaga guru di bidang pendidikan khusus. Baik PNS, PPPK, honorer, maupun guru yayasan di SLB jumlahnya terbatas, yang mengindikasikan bahwa daya tarik untuk menjadi guru SLB masih rendah, mungkin karena beban kerja yang dianggap lebih berat, kebutuhan kompetensi khusus, atau kurangnya insentif yang memadai.

Diagram. 3.3.25

Status Guru SMA, SMK dan SLB dengan Pendidikan SMA/DI-DIII



Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

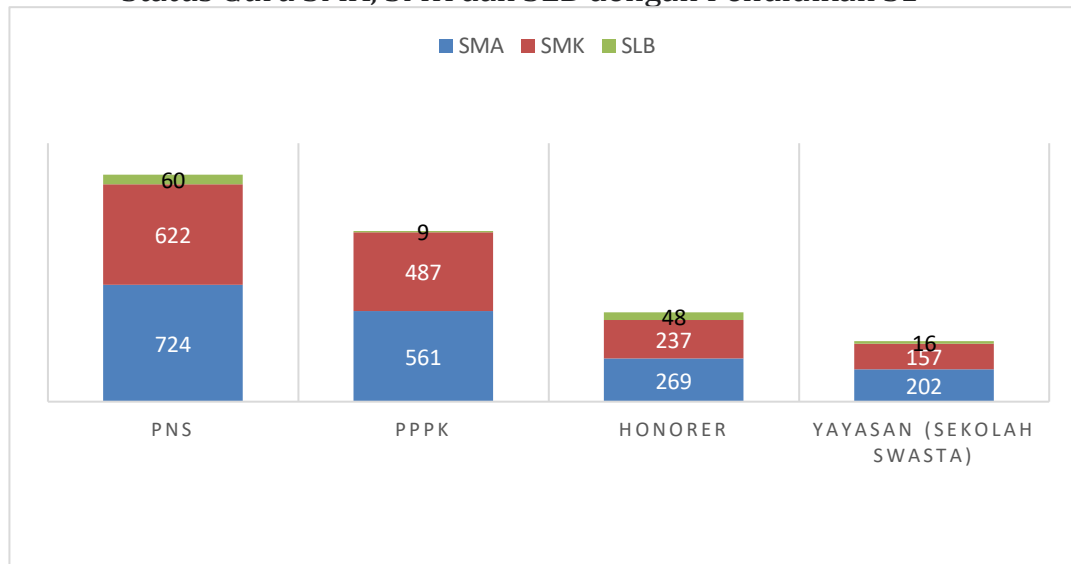
Pada diagram 3.3.25 gambaran tingkat pendidikan Sarjana (S1) guru SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Status Kepegawaiannya, Sebagian besar guru berpendidikan S1 berada pada kategori PNS dan PPPK, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Jumlah guru honorer dan guru yayasan juga cukup besar, namun tetap jauh lebih sedikit dibandingkan guru PNS dan PPPK. Secara keseluruhan, ketersediaan guru S1 didominasi oleh guru di sekolah negeri. Dominasi PNS dan PPPK: Fondasi Kualitas Negeri Guru berpendidikan S1 terkonsentrasi pada status PNS dan PPPK, khususnya di SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan: Keberhasilan Standardisasi: Gelar S1 telah menjadi standar minimal rekrutmen guru formal. Stabilitas dan Jaminan Mutu: Terbentuk inti tenaga pengajar yang stabil dan berkualifikasi. Investasi Pemerintah yang Besar: Mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap mutu pendidikan. Peran dan Tantangan Guru Honorer dan Yayasan

Meski lebih sedikit, guru S1 berstatus honorer dan di yayasan/swasta tetap penting. Mereka berperan sebagai: Penopang Tambahan: Mengisi kekurangan di sekolah negeri (honorer) atau menjadi tulang punggung di swasta. Pihak Rentan: Status tidak tetap berisiko menurunkan motivasi dan membuang potensi SDM terdidik. Cermin Tantangan Finansial: Jumlah yang lebih sedikit di sekolah swasta, terutama SMK dan SLB, mengindikasikan kesulitan finansial dalam

merekrut dan mempertahankan guru berkualitas. Kondisi Kritis di Jenjang SLB Jumlah guru S1 di SLB sangat kecil di semua status kepegawaian. Hal ini mempertegas kelangkaan kronis guru S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB), yang menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan layanan pendidikan khusus yang berkualitas, bahkan melalui jalur formal sekalipun.

Diagram. 3.3.26

Status Guru SMA, SMK dan SLB dengan Pendidikan S1



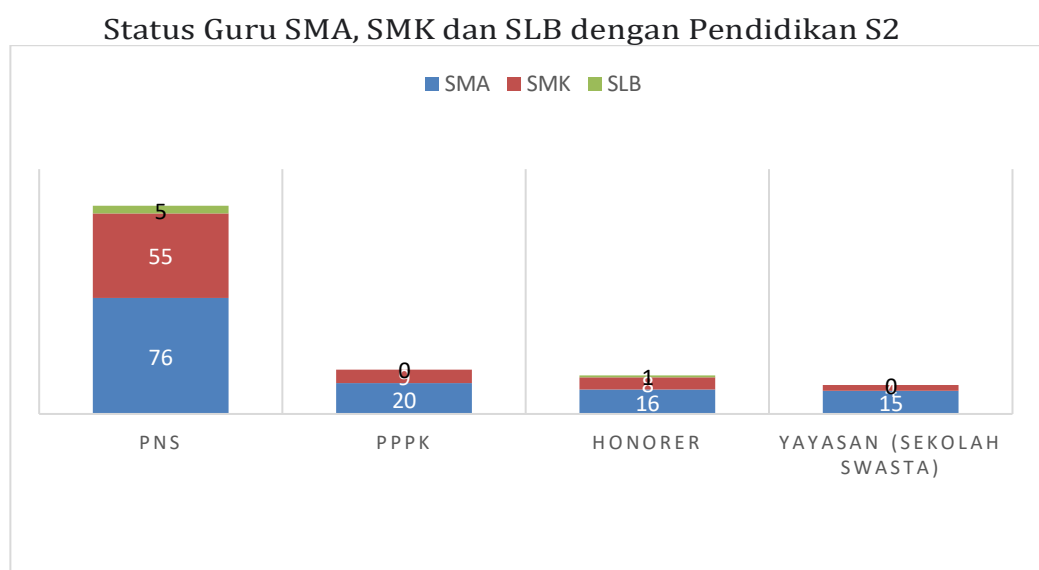
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.26 Grafik memperlihatkan distribusi guru SMA, SMK, dan SLB berpendidikan S2 menurut status kepegawaian. Guru berstatus PNS merupakan kelompok terbesar, didominasi oleh guru SMA dan SMK, sementara SLB jumlahnya lebih sedikit. Pada kategori PPPK, jumlah guru juga cukup signifikan meski jauh lebih kecil dibanding PNS. Guru honorer hanya sedikit, dengan sebaran yang relatif merata antara jenjang SMA dan SMK. Di sekolah swasta (yayasan), jumlah guru berpendidikan S2 lebih kecil dibanding kategori lain. Secara umum, guru berpendidikan S2 paling banyak berada pada status PNS. Analisis ini mengungkapkan bahwa kepemilikan gelar magister (S2) di kalangan guru masih merupakan aset yang langka dan sangat terkonsentrasi pada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama di jenjang SMA dan SMK. Dominasi ini mengindikasikan bahwa program peningkatan kualifikasi guru lebih banyak diakses dan dimanfaatkan oleh guru-guru yang sudah memiliki status kepegawaian yang stabil. Hal ini wajar karena PNS memiliki akses lebih besar terhadap program beasiswa pemerintah, jaminan cuti

belajar, dan insentif karier yang terkait dengan peningkatan pendidikan. Keberadaan mereka sebagai kelompok terbesar menjadi tulang punggung dalam pengembangan keilmuan dan kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan negeri.

Sementara itu, guru dengan status PPPK juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, meski jauh di bawah PNS. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, menunjukkan bahwa program PPPK tidak hanya menarik tenaga berkualifikasi S1, tetapi juga mampu merekrut dan mungkin mendorong peningkatan kualifikasi bagi tenaga yang sudah bergelar S2. Kehadiran mereka memperkuat kapasitas akademik di sekolah negeri. Di sisi lain, jumlah guru berpendidikan S2 dengan status honorer dan guru yayasan di sekolah swasta sangat terbatas. Keterbatasan ini mencerminkan tantangan struktural. Bagi guru honorer, ketiadaan jaminan kerja jangka panjang dan beban finansial sering menjadi hambatan utama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 yang membutuhkan biaya dan waktu besar. Demikian pula, sekolah swasta mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung studi lanjut gurunya atau menawarkan remunerasi yang sepadan untuk menarik guru bergelar S2. Secara khusus, jumlah guru S2 di SLB yang sangat sedikit pada semua kategori status—terutama sebagai PNS—kembali mempertegas kesenjangan kapasitas yang mendalam. Kelangkaan ini tidak hanya soal jumlah.

Diagram. 3.3.27



Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

3.3.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan unsur vital yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar secara efektif. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, sarana pendidikan mencakup segala peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Sementara itu, prasarana pendidikan mencakup segala fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung kegiatan belajar, seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, serta fasilitas sanitasi dan kebersihan sekolah. Proses pendataan sarana dan prasarana dilakukan melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yang memuat informasi detail mengenai kondisi fisik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana pendukung lainnya. Data ini diverifikasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan Provinsi bekerja sama dengan satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa status kerusakan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, baik dalam kategori baik, rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Dalam konteks perencanaan pembangunan pendidikan, kebutuhan sarana dan prasarana dihitung berdasarkan proyeksi jumlah peserta didik dan satuan pendidikan. Proses perhitungan ini mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sarana dan prasarana Pendidikan yang berhasil dikumpulkan berdasarkan data Dapodik terakhir. Data sarana dan prasarana yang akan disajikan sebagaimana yang terdata dalam Dapodik dan ditambah dengan data air bersih, sanitasi dan sarana persampahan. Terkait dengan data terakhir tersebut dikumpulkan langsung dari satuan Pendidikan.

3.3.4.1. Ruang Kelas

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang kelas adalah ruangan di sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satu prasarana yang mendukung peningkatan akses pendidikan adalah ruang kelas.

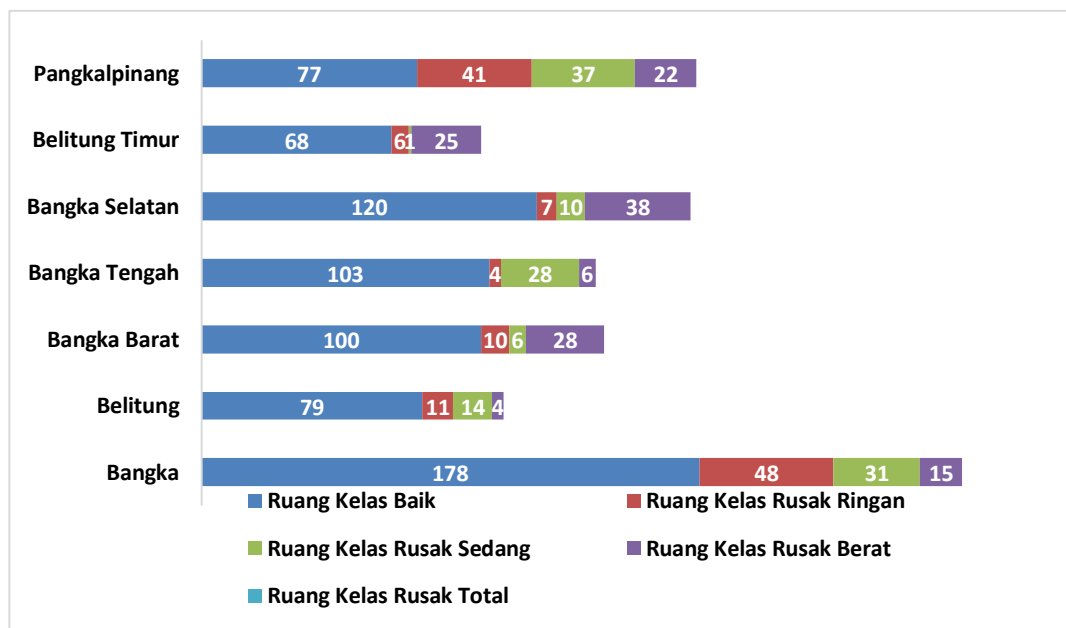
Ruang kelas dalam kondisi yang baik dan cukup akan mampu menampung penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dengan baik.

1) Ruang Kelas SMA

Kondisi ruang kelas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas berada dalam kondisi baik, terutama di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Namun, masih ditemukan ruang kelas rusak ringan, sedang, hingga berat di semua wilayah. Kabupaten Bangka dan Pangkalpinang memiliki jumlah kerusakan ruang kelas yang paling tinggi, baik kerusakan ringan maupun berat. Secara keseluruhan, perbaikan sarana pendidikan masih menjadi kebutuhan penting di beberapa kabupaten/kota.

Diagram. 3.3.28

Sebaran Jumlah Ruang Kelas pada SMA Negeri dan Swasta



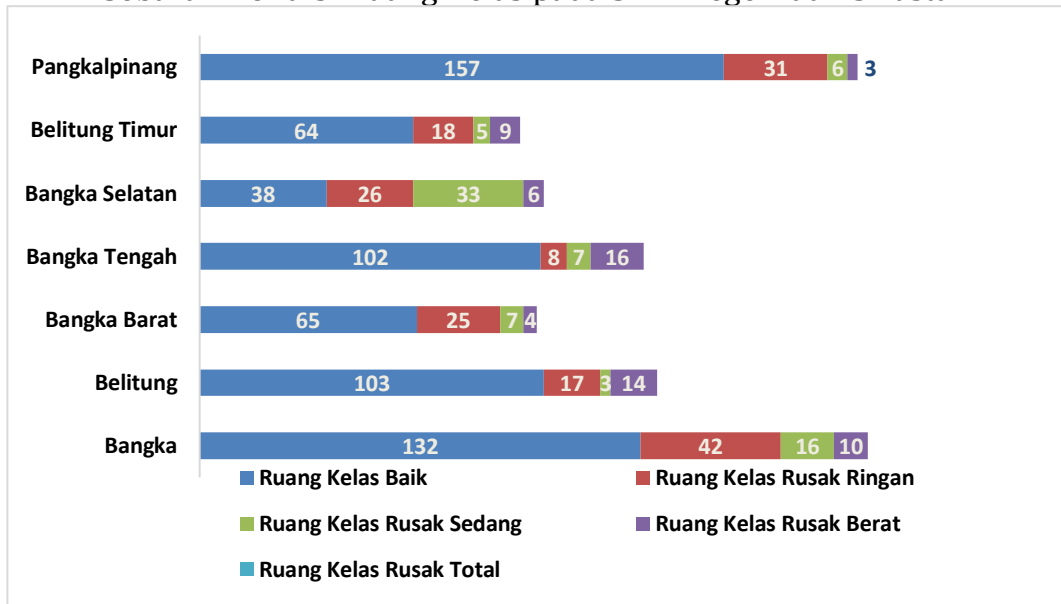
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Data tersebut mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas ruang kelas di provinsi ini berada dalam kondisi baik—dengan Kabupaten Bangka (272 ruang), Bangka Selatan (203 ruang), dan Bangka Tengah (202 ruang) sebagai penyumbang terbesar—namun terdapat potret kerusakan yang perlu mendapat perhatian serius. Persebaran ruang kelas dengan kerusakan ringan, sedang, dan berat ditemukan di hampir semua wilayah, mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur pendidikan secara berkala. Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang menonjol sebagai wilayah dengan beban kerusakan tertinggi. Di Kabupaten Bangka, selain memiliki jumlah ruang kelas baik yang sangat besar, juga tercatat sejumlah ruang kelas dalam kategori rusak ringan (22), rusak sedang (11), dan rusak berat (18). Pola serupa terlihat di Pangkalpinang, meski dalam skala yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah dengan jumlah sekolah dan siswa yang padat, tingkat keausan dan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur juga lebih tinggi. Kerusakan yang tidak segera ditangani dapat berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas proses belajar mengajar. Sementara itu, wilayah seperti Bangka Barat dan Belitung juga menunjukkan adanya ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dan sedang. Meski jumlahnya tidak sebanyak di Bangka dan Pangkalpinang, keberadaannya tetap tidak boleh diabaikan karena dapat memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut.

2) Ruang Kelas SMK

Kondisi ruang kelas di sebagian besar daerah masih didominasi oleh ruang kelas dalam kondisi baik. Namun beberapa daerah memiliki tingkat kerusakan yang cukup menonjol, terutama **Bangka Selatan** dengan ruang baik paling sedikit dan kerusakan sedang paling tinggi. Selain itu, **Bangka Tengah**, **Belitung**, dan **Bangka** juga memiliki jumlah kerusakan berat yang perlu mendapat prioritas penanganan. Secara umum, kebutuhan utama adalah **perbaikan ringan**, tetapi beberapa wilayah memerlukan **rehabilitasi sedang hingga berat** untuk menjamin kelayakan proses belajar mengajar

Diagram. 3.3.29
Sebaran Kondisi Ruang Kelas pada SMK Negeri dan Swasta



Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025, (diolah).

Data mengonfirmasi bahwa mayoritas ruang kelas SMK masih dalam kondisi baik, namun terdapat variasi dan titik keritisan yang signifikan antar wilayah, yang memerlukan respons berbeda. Kabupaten Bangka Selatan mencuat sebagai area dengan tantangan terberat. Dengan hanya 33 ruang kelas dalam kondisi baik, daerah ini memiliki jumlah ruang kelas rusak sedang tertinggi (35) dan rusak berat yang cukup signifikan (13). Proporsi kerusakan yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa banyak ruang praktik atau teori di SMK Bangka Selatan yang mungkin tidak layak pakai secara optimal, yang dapat sangat menghambat pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk praktik kejuruan yang membutuhkan fasilitas memadai.

Kabupaten Bangka Tengah, Belitung, dan Bangka juga menunjukkan jumlah ruang kelas rusak berat yang perlu diwaspadai (masing-masing 6, 8, dan jumlah serupa di Bangka). Kerusakan berat pada ruang kelas SMK—yang sering kali berupa bengkel, laboratorium, atau studio—lebih kritis dampaknya dibandingkan di sekolah umum. Perbaikan tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga sering kali melibatkan peralatan praktik yang mahal

3) Ruang Kelas SLB

Pada diagram 3.3.29 Grafik menunjukkan sebaran kondisi ruang kelas di satuan pendidikan SLB pada tiap kabupaten/kota. Pangkalpinang memiliki ruang kelas baik terbanyak, meskipun masih terdapat sebagian yang rusak ringan.

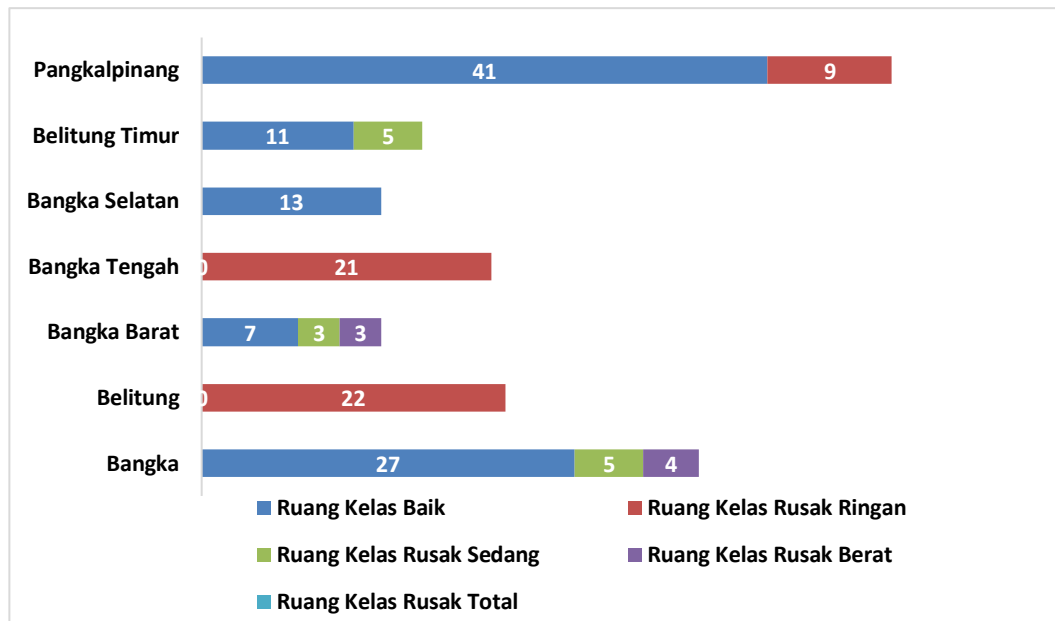
Belitung Timur dan Bangka Selatan didominasi ruang kelas dalam kondisi baik tanpa kerusakan berat. Sebaliknya, Bangka Tengah dan Belitung memiliki jumlah ruang kelas rusak ringan paling besar dibanding daerah lain. Di Bangka Barat dan Bangka masih ditemukan ruang kelas rusak sedang hingga berat, meskipun ruang kelas baik tetap mendominasi. Secara keseluruhan, sebagian besar daerah memiliki ruang kelas yang baik, namun beberapa wilayah masih memerlukan perhatian terkait kerusakan ruang kelas.

Data mengonfirmasi bahwa secara umum, ruang kelas dalam kondisi baik mendominasi di hampir semua wilayah, dengan Kota Pangkalpinang (42 ruang kelas baik) menjadi wilayah dengan fasilitas terbanyak. Hal ini sejalan dengan perannya sebagai pusat layanan. Namun, di balik gambaran umum yang positif ini, terdapat variasi kerusakan yang perlu dicermati karena implikasinya yang lebih serius bagi SLB. Prioritas Perbaikan Mendesak: Kabupaten Bangka Barat dan Bangka menonjol karena memiliki ruang kelas rusak sedang hingga berat. Kerusakan tingkat ini pada lingkungan SLB sangat mengkhawatirkan karena dapat membahayakan keselamatan siswa berkebutuhan khusus yang mungkin memiliki mobilitas terbatas, gangguan penglihatan, atau sensitivitas lainnya. Ruang kelas di SLB juga sering memerlukan modifikasi khusus (seperti jalur evakuasi, pencahayaan, atau akustik) yang membuat kerusakan struktural menjadi lebih kritis.

Kebutuhan Pemeliharaan Rutin: Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung menunjukkan jumlah ruang kelas rusak ringan yang paling besar. Meskipun tergolong ringan, kerusakan ini tidak boleh diabaikan. Di SLB, detail seperti lantai yang tidak rata, kusen jendela yang rusak, atau keran air yang bocor dapat menjadi penghalang besar bagi kemandirian dan kenyamanan siswa. Kerusakan ringan yang tidak segera ditangani berpotensi memburuk dan mengganggu terapi atau aktivitas pembelajaran khusus. Wilayah dengan Kondisi Relatif Optimal: Belitung Timur dan Bangka Selatan patut diapresiasi karena hanya memiliki ruang kelas dalam kondisi baik tanpa catatan kerusakan berat. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur di SLB wilayah tersebut berjalan dengan baik.

Diagram. 3.3.30

Sebaran Jumlah Ruang Kelas pada Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.2. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan adalah fasilitas penting di sekolah yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan berbagai sumber belajar, baik berupa buku, majalah, dokumen, maupun media digital. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat literasi dan pusat informasi, tempat siswa dan guru dapat membaca, belajar mandiri, mencari referensi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, ruang perpustakaan juga mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, seperti diskusi, penelitian sederhana, dan pengembangan minat baca, sehingga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

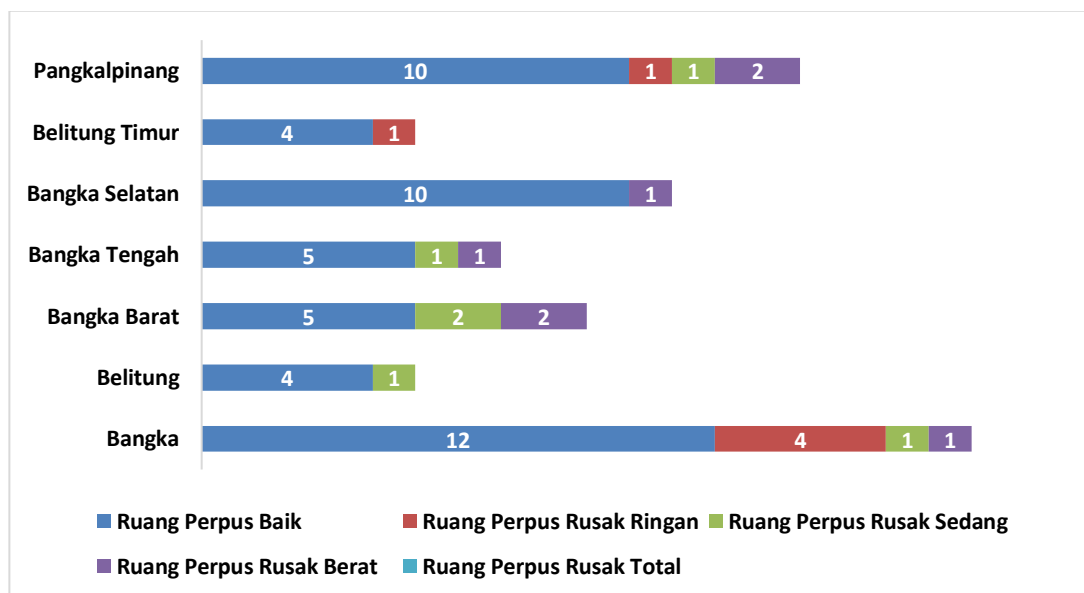
1) SMA

Pada diagram 3.3.30 Sebaran ruang perpustakaan SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki ruang perpustakaan dalam kondisi baik, terutama Bangka dan Pangkalpinang. Namun, masih terdapat ruang perpustakaan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, meski jumlahnya relatif sedikit. Bangka memiliki jumlah kerusakan tertinggi, terutama kategori rusak ringan.

Secara umum, kondisi perpustakaan di SMA tergolong memadai, namun tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan pada beberapa satuan pendidikan. Ini memberikan gambaran bahwa meskipun ketersediaan ruang perpustakaan sudah cukup baik, upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat literasi, pengembangan minat baca, serta penyedia sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, perbaikan pada ruang perpustakaan yang mengalami kerusakan—meskipun jumlahnya tidak banyak—perlu menjadi perhatian agar seluruh peserta didik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengakses fasilitas yang layak dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih optimal.

Diagram. 3.3.31

Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMA



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

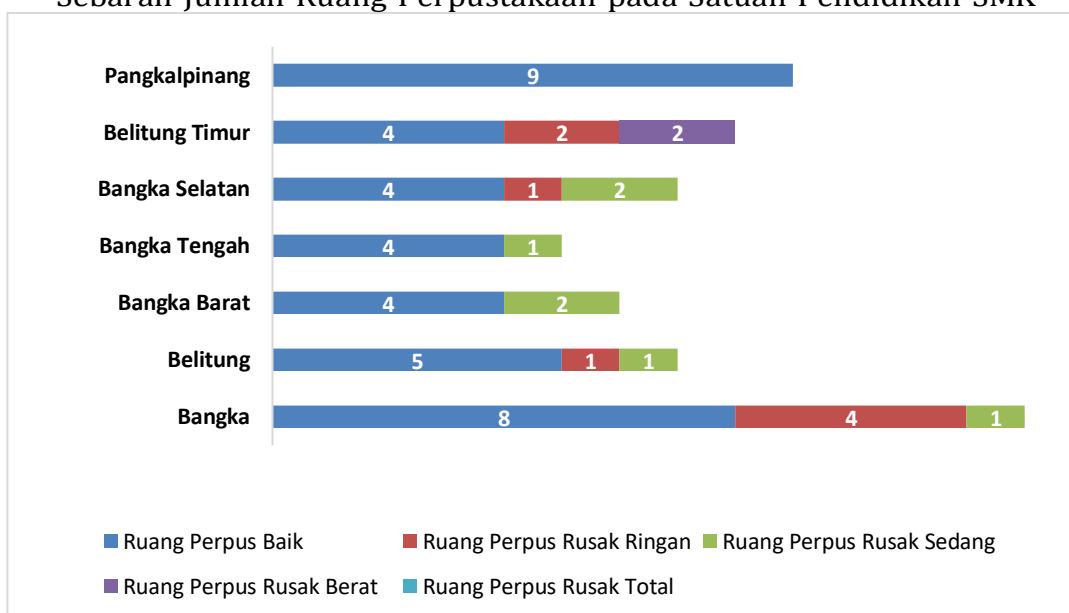
Pada diagram 3.3.31 Sebaran ruang perpustakaan pada satuan pendidikan SMK menunjukkan bahwa kondisi ruang perpustakaan umumnya baik di sebagian besar kabupaten/kota, terutama di Pangkalpinang dan Bangka. Namun, beberapa daerah masih memiliki ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, seperti Belitung Timur dan Bangka. Meskipun jumlah ruang yang rusak

berat sangat sedikit, temuan ini tetap menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan pemeliharaan agar layanan perpustakaan di SMK dapat berjalan optimal. Secara keseluruhan, kondisi perpustakaan SMK cukup memadai, tetapi peningkatan sarana tetap diperlukan pada daerah tertentu. ini menggambarkan bahwa ketersediaan ruang perpustakaan pada SMK umumnya sudah mendukung proses pembelajaran, namun kualitas dan kelayakan fasilitas masih perlu ditingkatkan secara bertahap.

Mengingat perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi, literasi kejuruan, serta pendukung pengembangan kompetensi peserta didik, maka keberadaan ruang yang layak sangat penting untuk memastikan proses belajar berjalan efektif. Oleh karena itu, perbaikan pada ruang yang mengalami kerusakan, meskipun jumlahnya tidak signifikan, tetap menjadi prioritas agar seluruh peserta didik SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan akses terhadap sarana pembelajaran yang memadai dan mendorong peningkatan mutu pendidikan kejuruan secara keseluruhan.

Diagram. 3.3.32

Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMK



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3) SLB

Pada diagram 3.3.32 Kondisi ruang perpustakaan pada grafik menunjukkan jumlah yang sangat terbatas di setiap daerah. Pangkalpinang memiliki ruang perpustakaan baik terbanyak, yaitu dua ruang, sementara daerah lainnya hanya memiliki satu ruang dengan kondisi bervariasi. Beberapa daerah seperti Bangka Tengah dan Belitung memiliki ruang dengan kerusakan ringan, sedangkan Bangka Barat dan Bangka memiliki ruang dengan kerusakan sedang. Secara umum, jumlah ruang perpustakaan yang tercatat masih sedikit dan dengan kondisi yang beragam.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang perpustakaan pada jenjang terkait masih sangat terbatas sehingga pemanfaatannya sebagai pusat sumber belajar belum dapat optimal. Minimnya jumlah ruang, ditambah dengan adanya kerusakan pada beberapa satuan pendidikan, menandakan perlunya perhatian lebih dalam penyediaan dan perawatan fasilitas perpustakaan. Penguatan sarana ini menjadi penting agar peserta didik memperoleh akses yang lebih baik terhadap bahan bacaan, informasi, dan ruang belajar yang mendukung proses pembelajaran. Dengan peningkatan jumlah serta kualitas ruang perpustakaan di seluruh daerah, diharapkan layanan pendidikan dapat berjalan lebih merata dan efektif.

Diagram. 3.3.33

Sebaran Jumlah Ruang Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.3. Ruang Laboratorium komputer

Ruang laboratorium komputer adalah fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komputer. Di dalamnya tersedia perangkat seperti komputer, jaringan internet, proyektor, serta perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk praktik siswa. Laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat siswa belajar keterampilan digital, mulai dari pengoperasian komputer, pengolahan data, desain, pemrograman, hingga kegiatan asesmen berbasis komputer. Ruang ini juga mendukung guru dalam menerapkan pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi, sehingga membantu meningkatkan kompetensi literasi digital peserta didik secara lebih terarah dan maksimal.

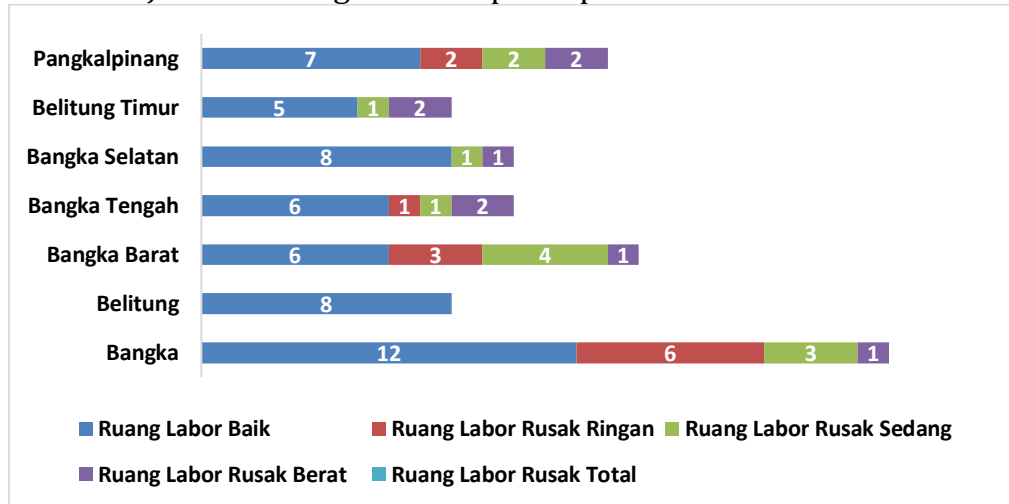
1) SMA

sebagian besar daerah memiliki **jumlah ruang laboratorium dalam kondisi baik** lebih banyak dibanding ruang yang mengalami kerusakan. Namun, beberapa daerah seperti **Bangka** dan **Bangka Barat** menunjukkan jumlah ruang labor rusak (ringan hingga berat) yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Daerah **Belitung** memiliki kondisi terbaik karena seluruh ruang labor berada dalam kondisi baik tanpa kerusakan. ini mencerminkan bahwa meskipun secara umum fasilitas laboratorium masih dapat digunakan dengan baik, upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan tetap perlu diprioritaskan, terutama pada daerah yang memiliki tingkat kerusakan lebih tinggi.

Laboratorium merupakan sarana penting untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik, pemahaman konsep, serta pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, perbaikan pada laboratorium yang mengalami kerusakan—baik ringan maupun berat—menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Dengan memperkuat kondisi laboratorium di setiap daerah, kualitas layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin merata dan mendukung peningkatan kompetensi siswa.

Diagram. 3.3.34

Sebaran Jumlah Ruang Lab Komputer pada Satuan Pendidikan SMA



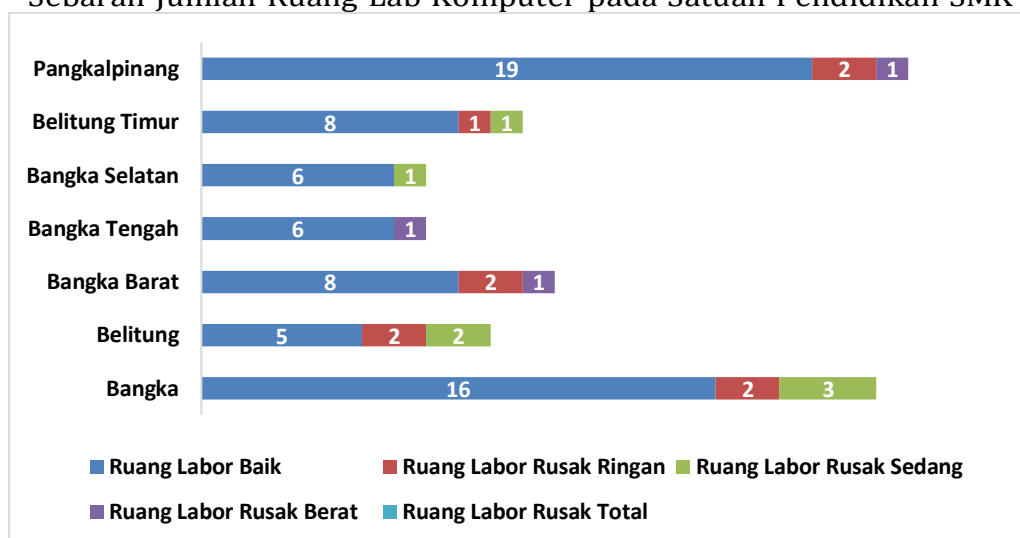
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

Sebagian besar daerah memiliki **ruang labor dalam kondisi baik** sebagai jumlah terbanyak. Pangkalpinang dan Bangka memiliki ruang labor baik paling banyak dibanding daerah lain. Meski begitu, beberapa daerah seperti **Belitung, Bangka Barat, dan Bangka** masih memiliki ruang labor yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Secara umum, kondisi laboratorium di sebagian besar wilayah masih didominasi oleh ruang yang layak digunakan. ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar ruang laboratorium berada dalam kondisi baik dan masih dapat dimanfaatkan secara optimal, perhatian terhadap ruang yang mengalami kerusakan tetap diperlukan agar tidak mengganggu proses pembelajaran praktikum. Laboratorium memiliki peran penting dalam mendukung keterampilan peserta didik melalui pembelajaran berbasis praktik, sehingga kualitas sarana harus dijaga secara berkelanjutan. Dengan melakukan perbaikan pada ruang yang rusak serta memastikan pemeliharaan rutin di setiap satuan pendidikan, diharapkan seluruh peserta didik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih aman, efektif, dan merata.

Diagram. 3.3.35

Sebaran Jumlah Ruang Lab Komputer pada Satuan Pendidikan SMK

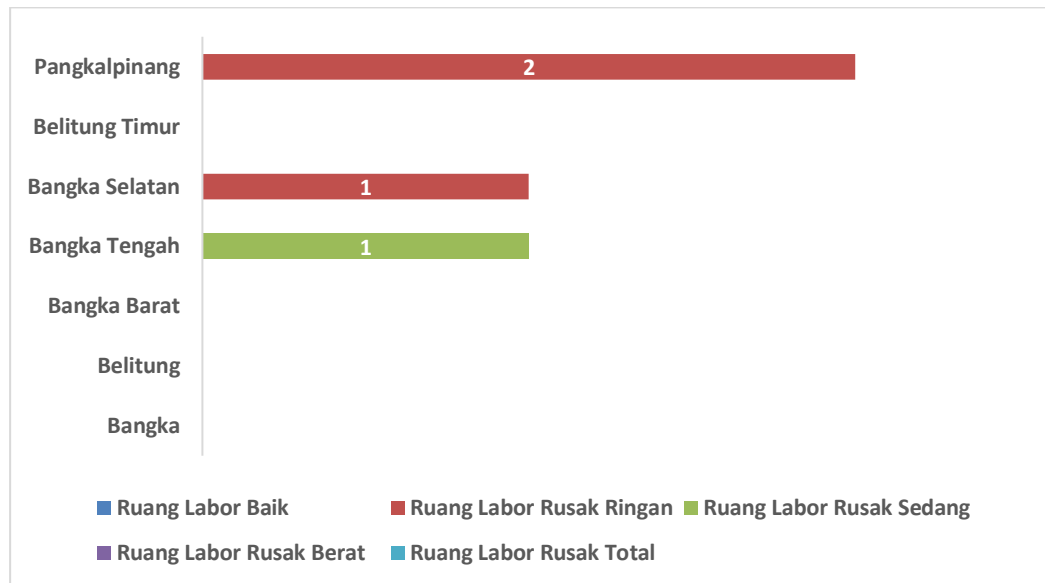


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3) SLB

Kerusakan ruang labor pada grafik ini hanya terjadi di tiga daerah. **Pangkalpinang** memiliki jumlah kerusakan terbanyak berupa *rusak ringan* (2 ruang). **Bangka Selatan** mengalami 1 ruang *rusak ringan*, sementara **Bangka Tengah** memiliki 1 ruang *rusak sedang*. Daerah lain tidak menunjukkan adanya ruang labor yang rusak. Secara umum, tingkat kerusakan laboratorium pada grafik ini tergolong rendah dan terbatas pada beberapa wilayah saja. ini menunjukkan bahwa kondisi laboratorium pada jenjang tersebut relatif terjaga, meskipun tetap diperlukan pemantauan dan pemeliharaan berkala agar kerusakan yang ada tidak berkembang menjadi lebih berat. Keberadaan ruang laboratorium yang layak sangat penting untuk mendukung kegiatan praktikum serta pembelajaran berbasis eksperimen. Oleh karena itu, meskipun tingkat kerusakan tergolong rendah, perbaikan pada beberapa ruang yang terdampak tetap perlu diprioritaskan agar kualitas layanan pendidikan tetap optimal dan merata di seluruh wilayah.

Diagram. 3.3.36
Jumlah Ruang Laboratorium Komputer pada Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.4. Ruang Kepala Sekolah

Ruang kepala sekolah adalah ruang kerja utama bagi kepala sekolah yang digunakan untuk melaksanakan fungsi manajerial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan di satuan pendidikan. Ruangan ini biasanya menjadi tempat untuk mengatur administrasi sekolah, rapat kecil, menerima tamu, melakukan koordinasi dengan guru dan staf, serta menyusun berbagai kebijakan pendidikan. Selain sebagai pusat manajemen sekolah, ruang kepala sekolah juga mencerminkan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional, sehingga mendukung kelancaran tugas kepala sekolah dalam memimpin dan memastikan mutu layanan pendidikan di sekolah.

1) SMA

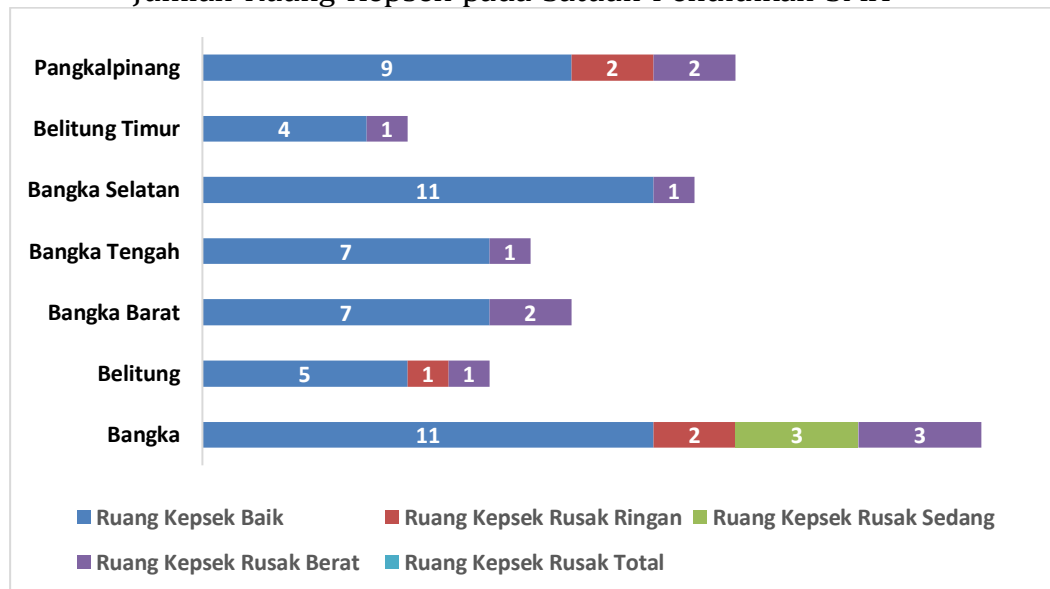
Pada diagram 3.3.36 Grafik tersebut menunjukkan kondisi ruang kepala sekolah pada jenjang SMA di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, sebagian besar ruang kepala sekolah berada dalam kondisi baik, terutama di Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka yang memiliki jumlah ruang baik paling banyak. Namun, masih terdapat beberapa ruang dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat, seperti di Pangkalpinang, Bangka Barat, Belitung, dan terutama Bangka yang memiliki kerusakan lebih beragam. Meskipun jumlah ruang kepala sekolah yang mengalami kerusakan tidak dominan, data ini tetap menegaskan perlunya upaya perbaikan agar ruang kerja kepala sekolah dapat mendukung manajemen

pendidikan secara optimal. ini juga menggambarkan bahwa kualitas ruang kepala sekolah memegang peranan penting dalam menunjang tata kelola dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Ruang kerja yang nyaman dan layak dapat mendukung efektivitas manajerial, pengambilan keputusan, serta interaksi dengan guru, siswa, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, meskipun jumlah ruang yang mengalami kerusakan tidak terlalu signifikan, upaya pemeliharaan dan perbaikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fasilitas pendukung manajemen yang memadai dan profesional.

Diagram. 3.3.37

Jumlah Ruang Kepsek pada Satuan Pendidikan SMA



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

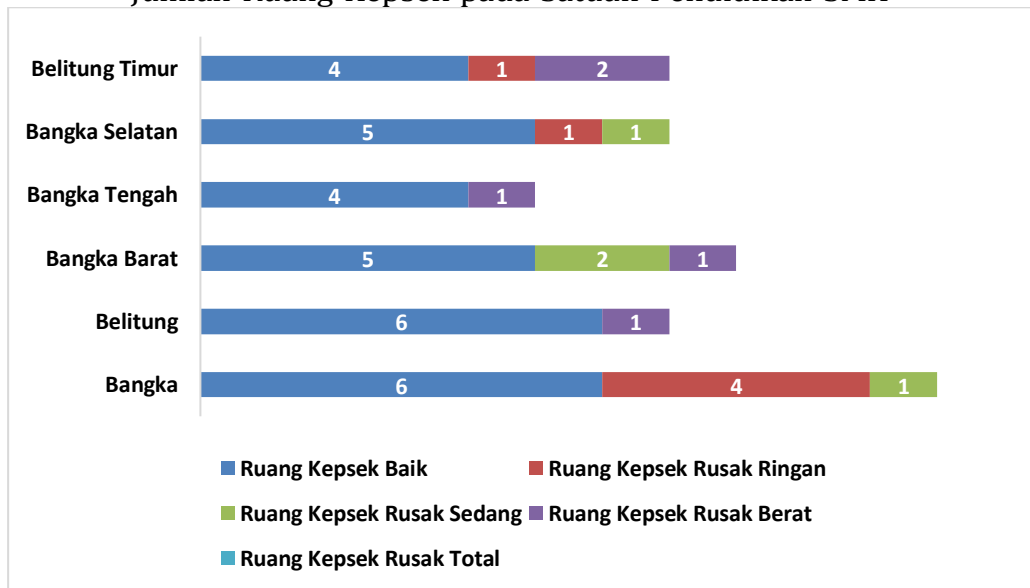
2) SMK

Pada diagram 3.3.37 Data pada grafik menunjukkan kondisi ruang kepala sekolah pada satuan pendidikan SMK di beberapa kabupaten/kota. Sebagian besar ruang kepala sekolah berada dalam kondisi baik, terutama di Belitung dan Bangka Selatan. Namun, masih terdapat sejumlah ruang yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, seperti di Belitung Timur, Bangka Barat, dan Bangka. Kabupaten Bangka memiliki jumlah ruang rusak ringan tertinggi, sementara beberapa daerah juga mencatat adanya ruang rusak berat meskipun jumlahnya sangat sedikit.

Secara keseluruhan, kondisi ruang kepala sekolah di SMK cukup baik, tetapi tetap diperlukan perhatian dan rehabilitasi pada beberapa sekolah agar fungsi manajerial kepala sekolah dapat berjalan lebih optimal. Ini menegaskan bahwa kualitas ruang kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas manajerial, administrasi, serta koordinasi program pendidikan di tingkat SMK. Ruang kerja yang layak tidak hanya mencerminkan profesionalitas satuan pendidikan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar ruang berada dalam kondisi baik, perbaikan pada ruang yang mengalami kerusakan tetap perlu diprioritaskan agar seluruh SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjalankan fungsinya secara efektif, terstruktur, dan berkesinambungan.

Diagram. 3.3.38

Jumlah Ruang Kepsek pada Satuan Pendidikan SMK



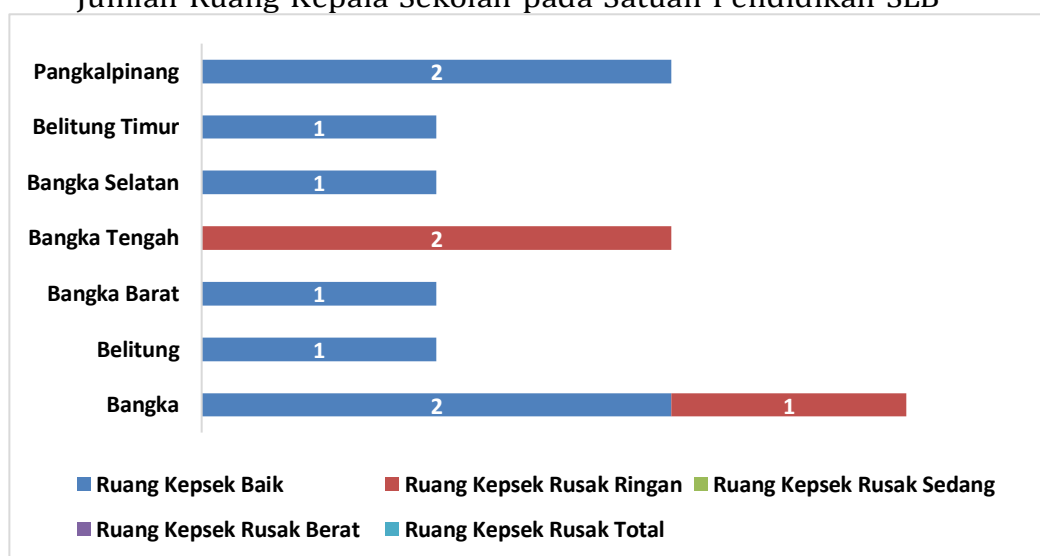
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3) SLB

Pada diagram 3.3.38 Grafik tersebut menunjukkan kondisi ruang kepala sekolah pada satuan pendidikan SLB di berbagai kabupaten/kota. Sebagian besar ruang kepala sekolah berada dalam kondisi baik, seperti di Pangkalpinang, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung. Namun, terdapat beberapa ruang yang mengalami kerusakan ringan, terutama di Bangka Tengah dan Bangka, yang masing-masing memiliki satu hingga dua ruang rusak ringan.

Diagram. 3.3.39

Jumlah Ruang Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

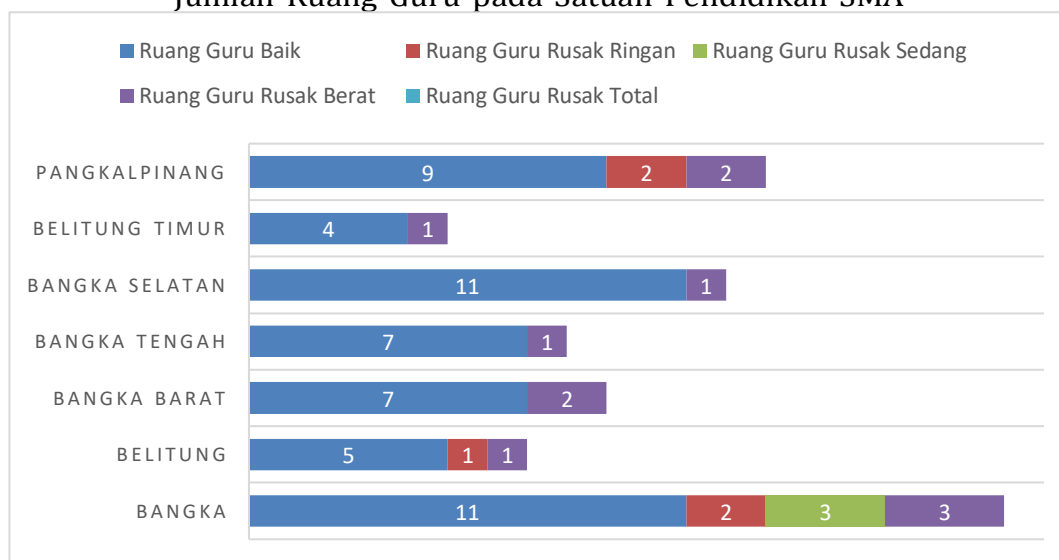
3.3.4.5. Ruang Guru

Ruang guru adalah ruang kerja dan ruang berkumpul bagi para guru di sekolah untuk melaksanakan berbagai tugas profesional, baik yang bersifat administratif maupun akademik. Di ruang ini, guru melakukan kegiatan seperti menyusun RPP, memeriksa tugas siswa, berdiskusi antar-guru, melakukan koordinasi pembelajaran, serta beristirahat di sela aktivitas mengajar. Selain itu, ruang guru juga berfungsi sebagai pusat komunikasi internal, tempat guru berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan lingkungan yang nyaman dan tertata baik, ruang guru dapat mendukung produktivitas, kolaborasi, dan kualitas layanan pembelajaran di sekolah.

1) SMA

Secara umum, jumlah **Ruang Guru Baik** pada satuan pendidikan SMA di tiap kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung masih mendominasi. Hampir semua daerah memiliki ruang guru dalam kondisi baik yang jauh lebih banyak dibandingkan ruang yang mengalami kerusakan. Namun, beberapa daerah masih memiliki ruang guru dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat, terutama di Kabupaten Bangka dan Pangkalpinang. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang guru secara umum sudah mendukung pelaksanaan tugas pendidik, namun pemeliharaan tetap perlu ditingkatkan agar fasilitas yang ada dapat berfungsi secara optimal. Ruang guru merupakan pusat koordinasi pembelajaran, perencanaan administrasi, serta interaksi profesional antarpendidik, sehingga kualitas ruang yang memadai sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas kerja guru. Oleh karena itu, ruang guru yang masih mengalami kerusakan—meskipun jumlahnya tidak dominan—perlu mendapatkan perhatian khusus agar seluruh sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana pendukung yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Diagram. 3.3.40
Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SMA



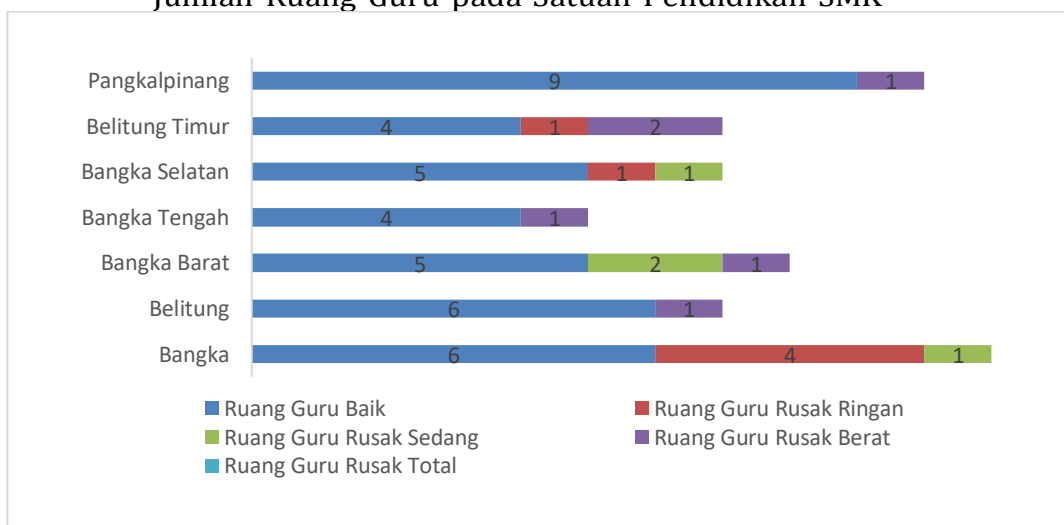
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

Secara keseluruhan, kondisi Ruang Guru Baik di SMK pada seluruh kabupaten/kota masih mendominasi dibandingkan ruang yang mengalami kerusakan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar sekolah sudah memiliki ruang guru yang layak dan dapat mendukung aktivitas profesional para guru dengan cukup baik. Meski demikian, beberapa wilayah seperti Bangka, Bangka Barat, dan Belitung Timur menunjukkan adanya ruang guru dengan kerusakan ringan hingga sedang, bahkan disertai sedikit kasus kerusakan berat.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam hal pemeliharaan dan rehabilitasi sarana agar kualitas lingkungan kerja guru tetap optimal. “Keberadaan ruang guru yang layak sangat penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pendidik, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, koordinasi antar guru, hingga proses refleksi dan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar ruang guru di SMK berada dalam kondisi baik, upaya perbaikan pada ruang yang mengalami kerusakan tetap perlu diprioritaskan agar tidak mengganggu kenyamanan dan produktivitas kerja guru. Dengan pemeliharaan yang berkelanjutan serta peningkatan fasilitas pada sekolah-sekolah yang masih memerlukan perbaikan, diharapkan kualitas lingkungan kerja para guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin merata dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Diagram. 3.3.41
Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SMK



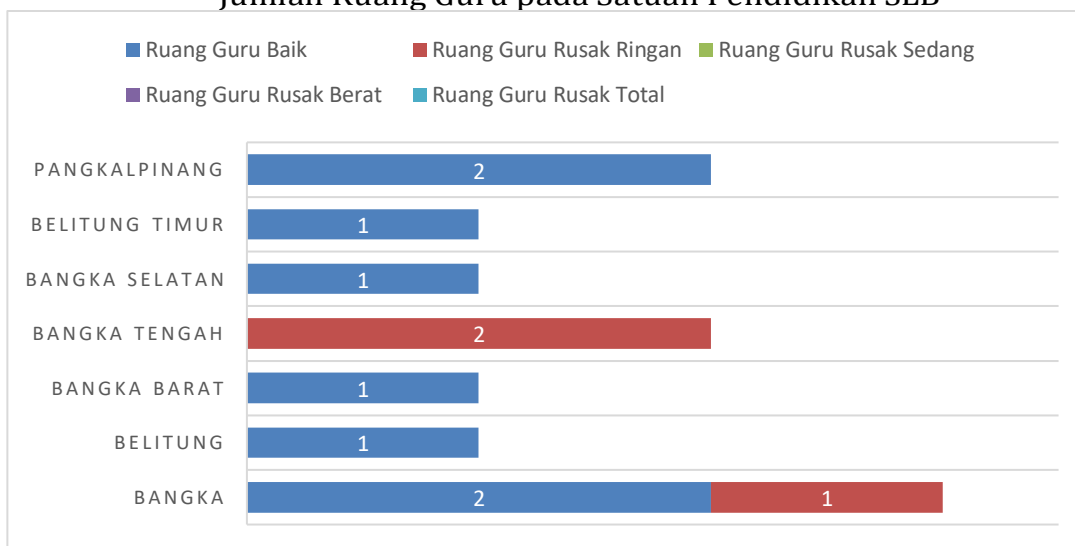
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3) SLB

Secara umum, kondisi **Ruang Guru Baik** pada satuan pendidikan SLB di seluruh kabupaten/kota masih mendominasi, dengan sebagian besar daerah memiliki 1–2 ruang guru yang berada dalam kondisi baik. Hanya sedikit ruang guru yang mengalami kerusakan, dan kerusakan yang muncul umumnya tergolong **rusak ringan**, seperti yang terlihat di **Bangka Tengah** dan **Bangka**. ini menunjukkan bahwa fasilitas ruang guru pada SLB relatif terjaga dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pendidik dalam memberikan layanan pendidikan khusus. Meskipun demikian, keberadaan beberapa ruang guru yang mengalami kerusakan ringan tetap memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius. Mengingat peran guru di SLB sangat krusial dalam memberikan pendampingan dan layanan pembelajaran yang terarah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peningkatan kualitas ruang kerja guru menjadi penting untuk menjaga kenyamanan, efektivitas, dan kelancaran aktivitas profesional mereka. Dengan pemeliharaan rutin dan perbaikan pada ruang yang terdampak, kualitas sarana pendukung di SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin optimal

Diagram. 3.3.42

Jumlah Ruang Guru pada Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.6. Ruang WC Guru

Ruang WC atau toilet sekolah adalah fasilitas sanitasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sekolah, baik peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan. Ruang WC memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan belajar.

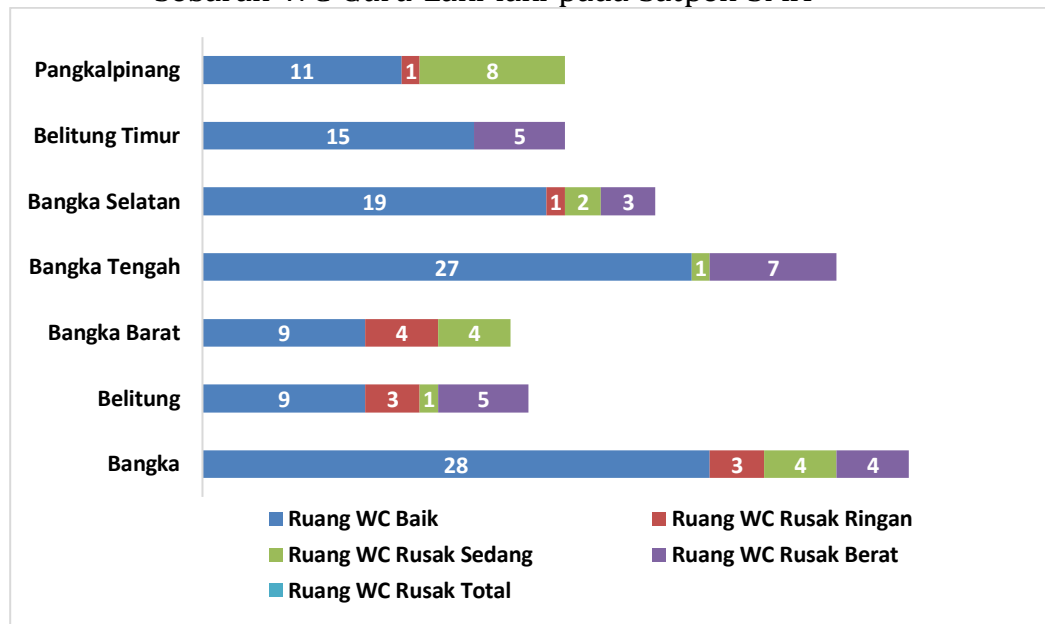
Keberadaan WC yang bersih dan berfungsi baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan siswa, mencegah penyebaran penyakit, serta mendukung kebiasaan hidup bersih. Selain itu, kualitas WC di sekolah juga menjadi bagian dari standar layanan minimal pendidikan, sehingga pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sanitasi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan ramah bagi seluruh warga sekolah.

1) SMA

Sebagian besar WC sekolah berada dalam kondisi **baik**, namun hampir semua daerah masih memiliki WC dengan **kerusakan ringan hingga berat**. Wilayah seperti Bangka, Belitung, dan Bangka Selatan memerlukan perhatian lebih karena jumlah WC rusak cukup terlihat. Ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas WC di banyak sekolah masih dapat digunakan dengan baik, kualitas sanitasi tetap perlu mendapat perhatian khusus mengingat perannya yang vital dalam mendukung kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan peserta didik maupun tenaga pendidik. Kerusakan yang masih ditemukan di beberapa daerah menandakan perlunya upaya pemeliharaan rutin serta perbaikan yang lebih terarah agar sarana sanitasi di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Dengan peningkatan fasilitas WC di daerah yang masih memiliki tingkat kerusakan tinggi, diharapkan lingkungan belajar menjadi lebih sehat, aman, dan mendukung terciptanya sekolah yang ramah bagi seluruh warga satuan pendidikan.

Diagram. 3.3.43

Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SMA

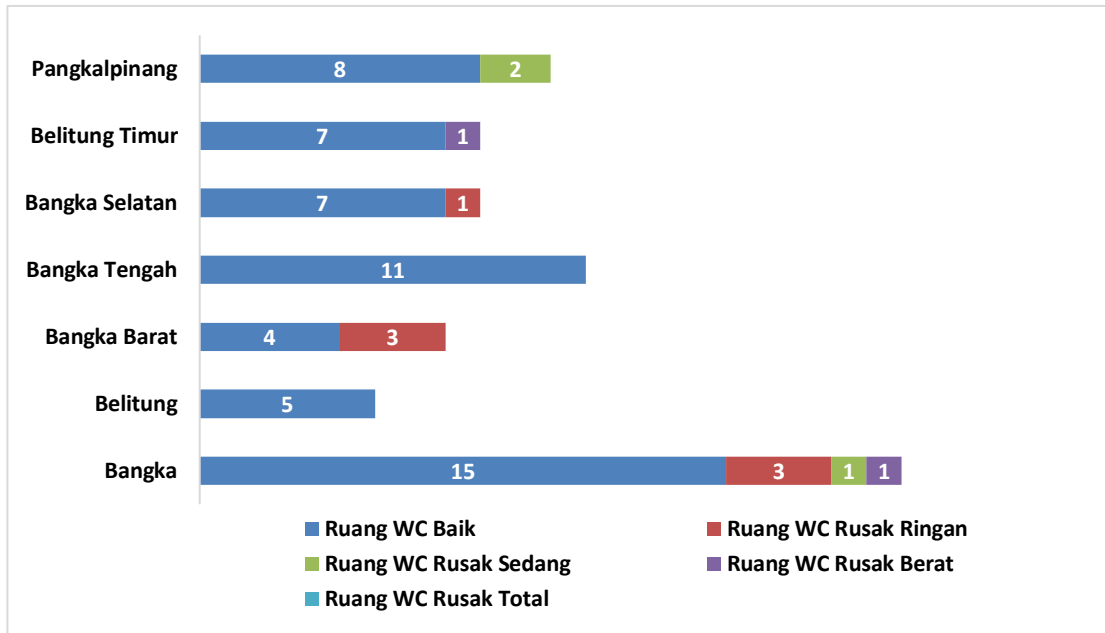


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Sebagian besar WC sekolah berada dalam kondisi **baik**, terutama di Bangka dan Bangka Tengah. Beberapa daerah masih memiliki WC dengan **kerusakan ringan hingga berat**, namun jumlahnya relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa fasilitas WC untuk guru perempuan di SMA secara umum berada dalam kondisi yang memadai, dengan Kabupaten Bangka (12 WC baik) dan Bangka Tengah (11 WC baik) menjadi wilayah dengan jumlah fasilitas layak terbanyak. Dominasi kondisi baik ini merupakan indikator positif dalam penyediaan sarana sanitasi dasar di sekolah. Namun, di beberapa wilayah masih ditemukan sejumlah WC dengan kerusakan ringan, sedang, hingga berat, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Keberadaan WC dengan kondisi rusak ini, sekalipun dalam jumlah kecil, tetap memerlukan perhatian

Diagram. 3.3.44

Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SMA



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

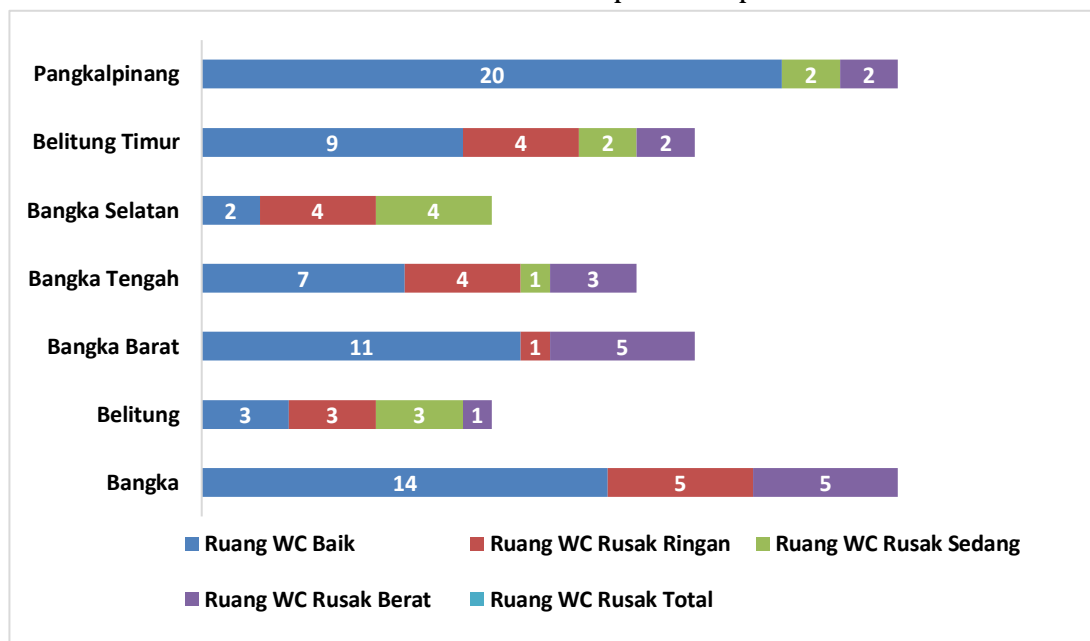
Pada diagram 3.3.44 Grafik menunjukkan kondisi WC guru laki-laki pada satuan pendidikan SMK di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, sebagian besar WC guru berada dalam kondisi baik, terutama di Pangkalpinang dan Bangka yang mencatat jumlah ruang WC baik paling tinggi. Namun, beberapa daerah seperti Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat memiliki jumlah WC yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Bahkan, beberapa wilayah seperti Belitung dan Bangka juga menunjukkan adanya WC rusak berat, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Upaya rehabilitasi fasilitas sanitasi ini penting untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan guru, serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan layak bagi seluruh warga sekolah. Ini menegaskan bahwa meskipun sebagian besar fasilitas sanitasi bagi guru di SMK berada dalam kondisi memadai, keberadaan WC yang mengalami kerusakan tetap memerlukan perhatian khusus agar tidak mengurangi kualitas lingkungan kerja pendidik. Fasilitas WC yang layak tidak hanya penting untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan guru, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen sarana prasarana di sekolah. Oleh karena itu,

rehabilitasi pada WC yang rusak—baik ringan, sedang, maupun berat—perlu dilakukan secara bertahap dan terencana agar seluruh SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan lingkungan belajar dan bekerja yang lebih sehat, aman, dan profesional.

Diagram. 3.3.45

Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SMK

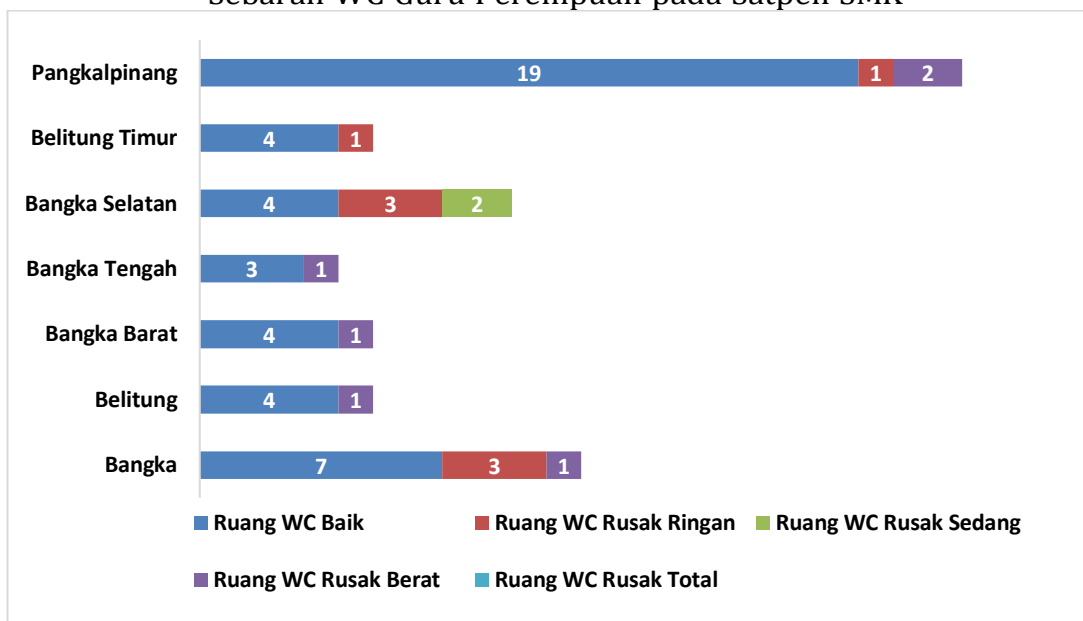


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.45 Grafik menunjukkan bahwa kondisi WC guru perempuan pada satuan pendidikan SMK umumnya berada dalam kondisi baik, terutama di Pangkalpinang yang memiliki jumlah tertinggi. Daerah lain seperti Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung juga didominasi WC yang layak digunakan. beberapa wilayah masih mencatat adanya kerusakan, terutama kategori rusak ringan hingga sedang, seperti di Bangka Selatan dan Bangka. Selain itu, terdapat pula WC rusak berat meskipun jumlahnya sangat terbatas, seperti di Pangkalpinang dan Bangka. Masih terdapat beberapa WC yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, khususnya di Bangka Selatan dan Bangka. Beberapa kasus kerusakan berat juga muncul meski jumlahnya sangat sedikit. Secara keseluruhan, fasilitas WC guru perempuan tergolong memadai, namun tetap memerlukan perbaikan di beberapa sekolah.

Diagram. 3.3.45

Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SMK



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

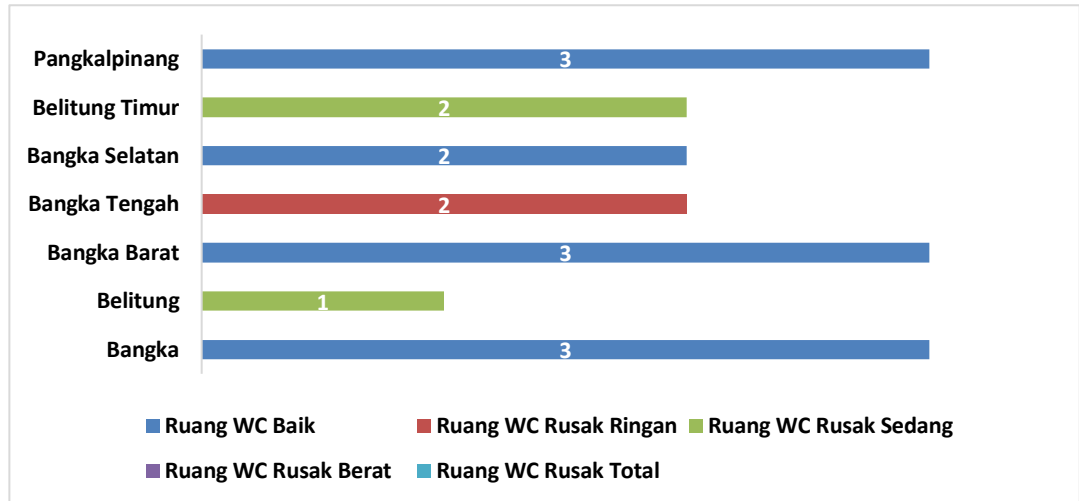
3) SLB

Pada diagram 3.346 Grafik menunjukkan bahwa kondisi WC guru laki-laki pada satuan pendidikan SLB secara umum berada dalam kondisi baik, terutama di Pangkalpinang, Bangka Barat, dan Bangka yang memiliki WC layak pakai tanpa catatan kerusakan. Meski demikian, beberapa wilayah masih memiliki fasilitas yang perlu perhatian, seperti Belitung Timur dan Belitung yang mencatat WC dengan kerusakan sedang, serta Bangka Tengah yang memiliki WC rusak ringan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar fasilitas sanitasi guru laki-laki di SLB sudah memadai, masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan agar standar kebersihan dan kenyamanan dapat terjaga dengan baik. Upaya pemeliharaan dan rehabilitasi menjadi penting untuk mendukung lingkungan belajar yang sehat dan ramah bagi seluruh warga sekolah. Dengan memastikan seluruh WC guru laki-laki berada dalam kondisi layak, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas tenaga pendidik. Fasilitas sanitasi yang baik juga berkontribusi pada terciptanya budaya hidup bersih di lingkungan sekolah, yang sangat penting terutama bagi satuan pendidikan SLB yang melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Oleh

karena itu, meskipun sebagian besar fasilitas sudah memadai, peningkatan mutu pada fasilitas yang masih mengalami kerusakan tetap perlu dilakukan agar standar sanitasi di seluruh SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan.”

Diagram. 3.3.47

Sebaran WC Guru Laki-laki pada Satpen SLB

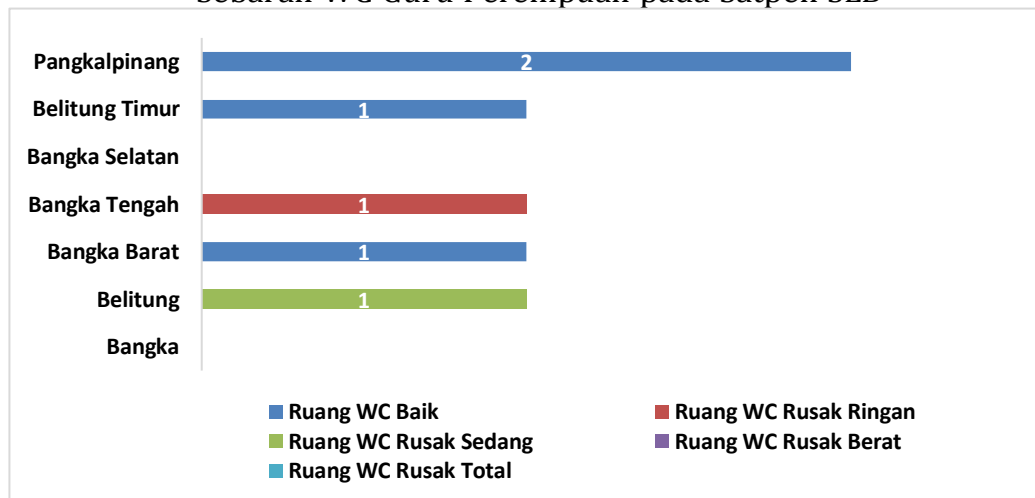


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.47 Grafik menunjukkan kondisi WC guru perempuan pada satuan pendidikan SLB. Secara umum, sebagian besar fasilitas WC berada dalam kondisi baik, seperti di Pangkalpinang, Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Barat. Namun, terdapat beberapa kasus kerusakan, misalnya di Bangka Tengah yang mencatat WC rusak ringan, serta di Belitung yang memiliki WC dengan kerusakan sedang. Meskipun jumlah kerusakan relatif sedikit, kondisi ini tetap menunjukkan perlunya pemeliharaan dan perbaikan pada beberapa satuan pendidikan. Dengan memastikan fasilitas sanitasi guru perempuan tetap layak dan bersih, sekolah dapat mendukung kenyamanan serta kesehatan tenaga pendidik, khususnya di lingkungan SLB yang memerlukan pelayanan lebih optimal.

Diagram. 3.3.48

Sebaran WC Guru Perempuan pada Satpen SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.7. Ruang WC Siswa

Ruang WC siswa adalah fasilitas sanitasi yang disediakan khusus untuk peserta didik di sekolah. Fasilitas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. WC siswa biasanya dilengkapi dengan kloset, tempat cuci tangan, saluran pembuangan yang baik, serta harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Keberadaan WC siswa yang bersih dan berfungsi baik sangat penting untuk mendukung kesehatan, kenyamanan, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Kondisi sanitasi yang baik juga berpengaruh pada kehadiran, konsentrasi belajar, dan keseluruhan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, pemeliharaan WC siswa merupakan bagian penting dari pengelolaan sarana prasarana pendidikan

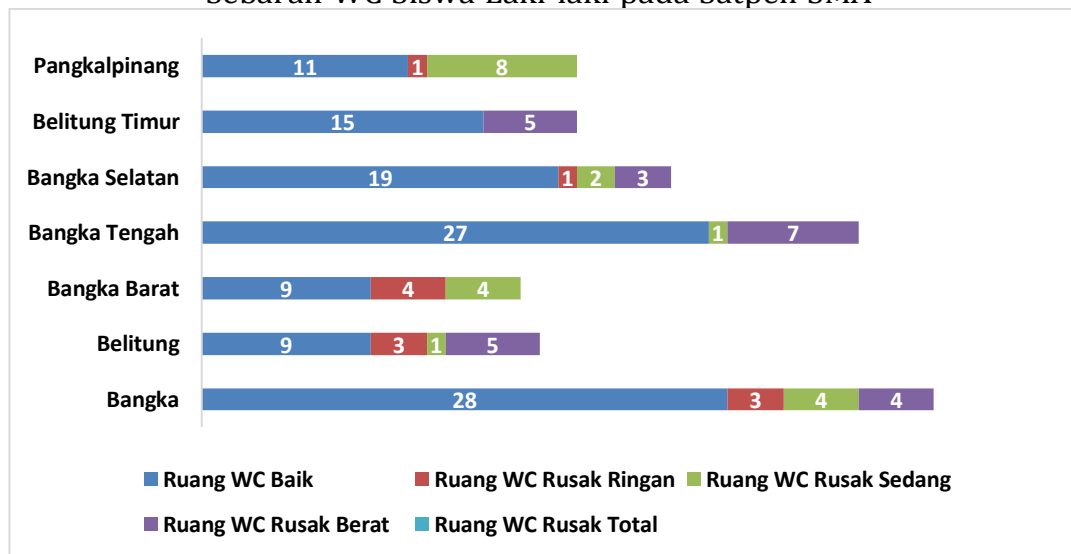
1) SMA

Pada diagram 3.348 Grafik menunjukkan kondisi WC siswa laki-laki pada satuan pendidikan SMA di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, WC dalam kondisi baik mendominasi di semua wilayah, terutama di Bangka, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Namun, beberapa daerah masih mencatat kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Misalnya, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung memiliki jumlah WC rusak yang beragam, sementara Bangka menunjukkan kasus kerusakan terbanyak pada kategori rusak ringan hingga berat.

Meskipun mayoritas WC siswa laki-laki masih layak digunakan, data ini menunjukkan perlunya peningkatan pemeliharaan fasilitas sanitasi di beberapa wilayah. Perbaikan rutin sangat penting untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan siswa sebagai bagian dari lingkungan belajar yang aman dan berkualitas. Ini menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat siswa, serta menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekolah. Oleh karena itu, meskipun kondisi WC siswa laki-laki di sebagian besar wilayah tergolong baik, ruang-ruang yang masih mengalami kerusakan perlu segera mendapatkan penanganan agar tidak menghambat kenyamanan dan kesehatan peserta didik. Dengan pelaksanaan pemeliharaan berkala, perbaikan yang tepat sasaran, serta pengelolaan sanitasi yang lebih terencana, diharapkan seluruh SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyediakan fasilitas WC yang bersih, aman, dan sesuai standar pelayanan pendidikan.

Diagram. 3.3.49

Sebaran WC Siswa Laki-laki pada Satpen SMA

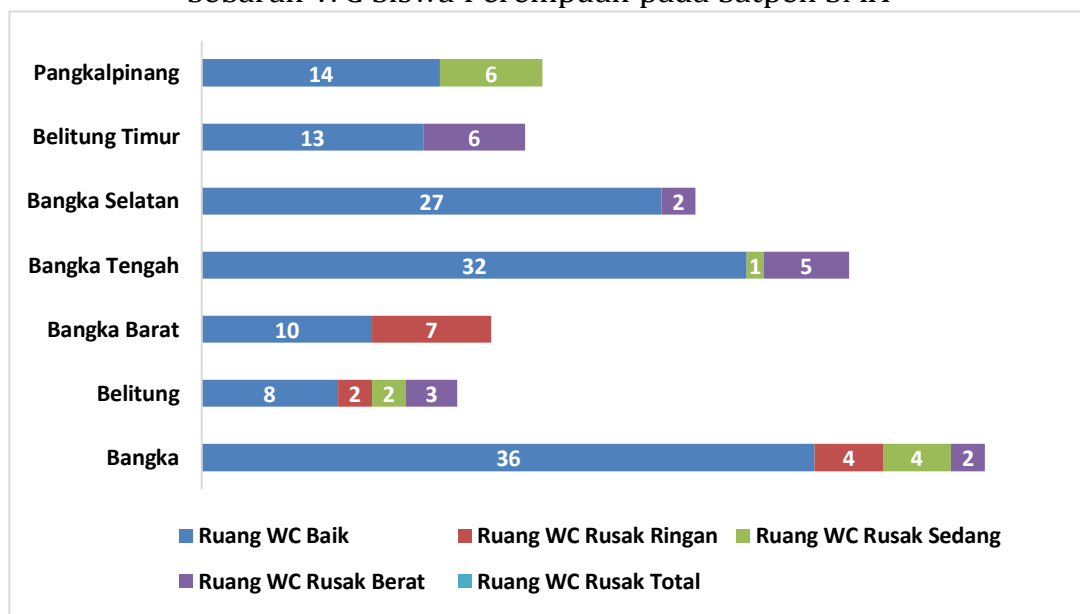


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.49 Grafik menunjukkan kondisi WC siswa perempuan pada satuan pendidikan SMA di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, fasilitas WC dalam kondisi baik mendominasi di hampir semua wilayah, terutama di Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan yang mencatat jumlah tertinggi. Meski demikian, beberapa daerah masih memiliki WC dengan kerusakan ringan hingga berat, seperti Bangka Barat, Belitung, dan Bangka, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, kondisi WC siswa perempuan tergolong memadai. Namun, keberadaan

WC yang rusak menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan pemeliharaan berkelanjutan agar fasilitas sanitasi tetap aman, bersih, dan nyaman digunakan oleh seluruh siswa perempuan di satuan pendidikan SMA. Peningkatan kualitas fasilitas sanitasi bagi siswa perempuan menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, serta mendukung kesehatan peserta didik. Mengingat kebutuhan sanitasi perempuan yang lebih sensitif, keberadaan WC yang layak dan terpelihara dengan baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan aktivitas belajar mereka di sekolah. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar WC berada dalam kondisi baik, perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan tetap harus diprioritaskan agar standar kebersihan dan kenyamanan dapat terpenuhi secara merata di seluruh SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diagram. 3.3.50
Sebaran WC Siswa Perempuan pada Satpen SMA



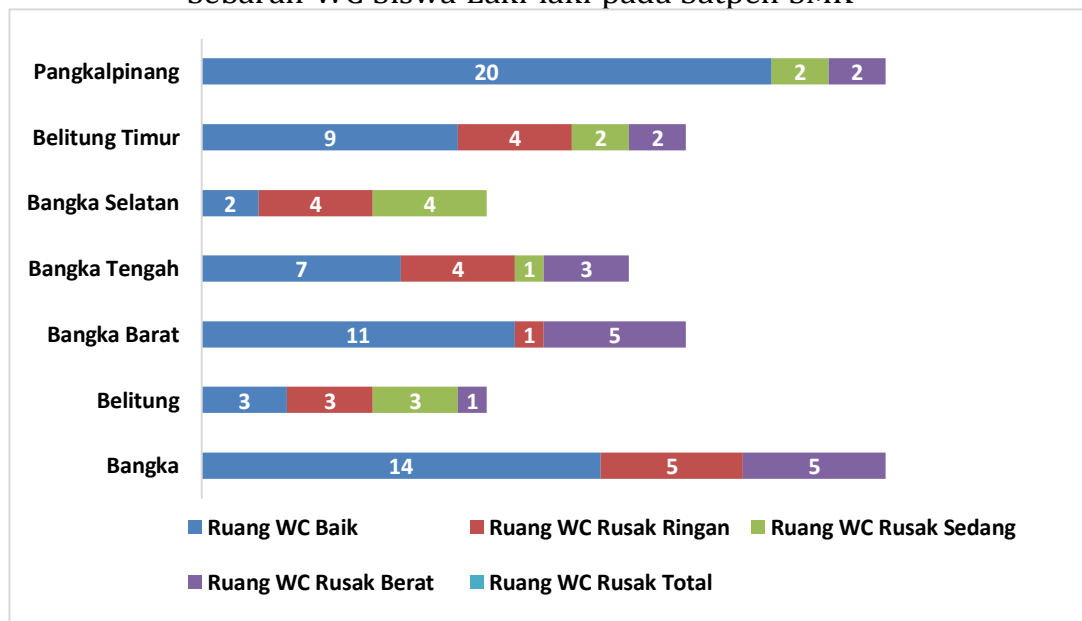
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

Pada diagram 3.350 Grafik menunjukkan kondisi WC siswa laki-laki pada satuan pendidikan SMK di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, WC dalam kondisi baik mendominasi di hampir semua wilayah, terutama di Pangkalpinang, Bangka Barat, dan Bangka, yang memiliki jumlah WC layak tertinggi. Namun, beberapa daerah masih mencatat adanya kerusakan ringan hingga sedang, seperti di Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka

Tengah, dan Belitung. Bahkan, di Bangka terdapat pula WC siswa yang mengalami kerusakan berat, meskipun jumlahnya tidak banyak. Secara keseluruhan, fasilitas WC siswa laki-laki di SMK masih relatif memadai, tetapi sejumlah sekolah tetap memerlukan perbaikan untuk memastikan sanitasi yang layak, aman, dan mendukung kesehatan siswa. Ini menegaskan pentingnya penguatan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi seluruh peserta didik SMK. WC yang terpelihara dengan baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik siswa, tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan dan keberlangsungan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar fasilitas berada dalam kondisi baik, sekolah-sekolah yang masih memiliki WC dengan tingkat kerusakan perlu segera mendapatkan perhatian melalui pemeliharaan rutin dan rehabilitasi terencana. Dengan langkah tersebut, sanitasi di SMK di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terjaga secara optimal dan merata.

Diagram. 3.3.51
Sebaran WC Siswa Laki-laki pada Satpen SMK



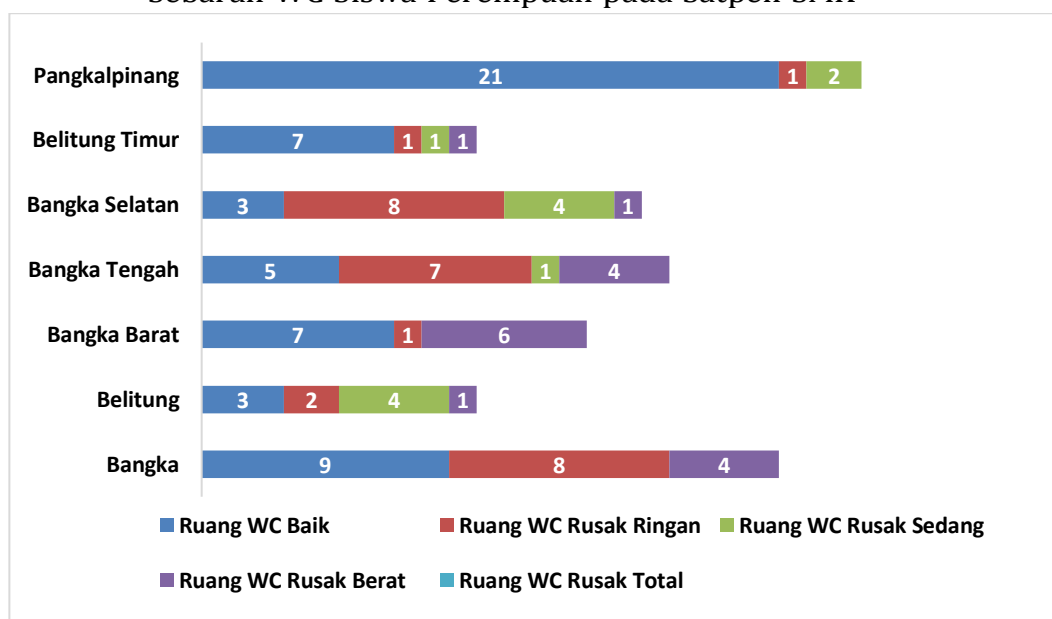
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.51 Grafik tersebut menunjukkan kondisi fasilitas WC siswa perempuan pada satuan pendidikan SMK di seluruh kabupaten/kota. Secara umum, ruang WC dalam kondisi baik masih mendominasi di sebagian besar wilayah, terutama di Pangkalpinang yang memiliki jumlah WC baik paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Bangka Barat, Belitung Timur, serta Bangka juga menunjukkan ketersediaan

WC baik yang relatif memadai. Meski demikian, beberapa daerah masih memiliki jumlah WC dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Bangka Selatan dan Bangka mencatat jumlah WC rusak ringan dan sedang yang cukup menonjol, sementara Bangka Tengah memiliki variasi kerusakan mulai dari ringan hingga berat, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pemeliharaan sarana sanitasi. Belitung dan Belitung Timur juga memiliki beberapa WC yang memerlukan perbaikan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak wilayah lainnya. Secara keseluruhan, ketersediaan WC perempuan di SMK masih tergolong cukup baik, namun beberapa satuan pendidikan memerlukan intervensi pemeliharaan dan rehabilitasi agar fasilitas sanitasi benar-benar aman, layak, serta mendukung kenyamanan dan kesehatan siswa perempuan.

Peningkatan kualitas fasilitas sanitasi bagi siswa perempuan menjadi aspek krusial dalam memastikan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung kesehatan reproduksi remaja. WC yang bersih dan layak tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan, tetapi juga pada kehadiran dan partisipasi belajar siswa perempuan, terutama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar fasilitas berada dalam kondisi baik, sekolah-sekolah yang masih memiliki WC dengan berbagai tingkat kerusakan memerlukan penanganan segera melalui pemeliharaan berkala dan perbaikan terencana. Dengan penyediaan sanitasi yang memadai dan merata di seluruh SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kualitas layanan pendidikan dapat semakin meningkat serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan ramah bagi seluruh peserta didik

Diagram. 3.3.52
Sebaran WC Siswa Perempuan pada Satpen SMK



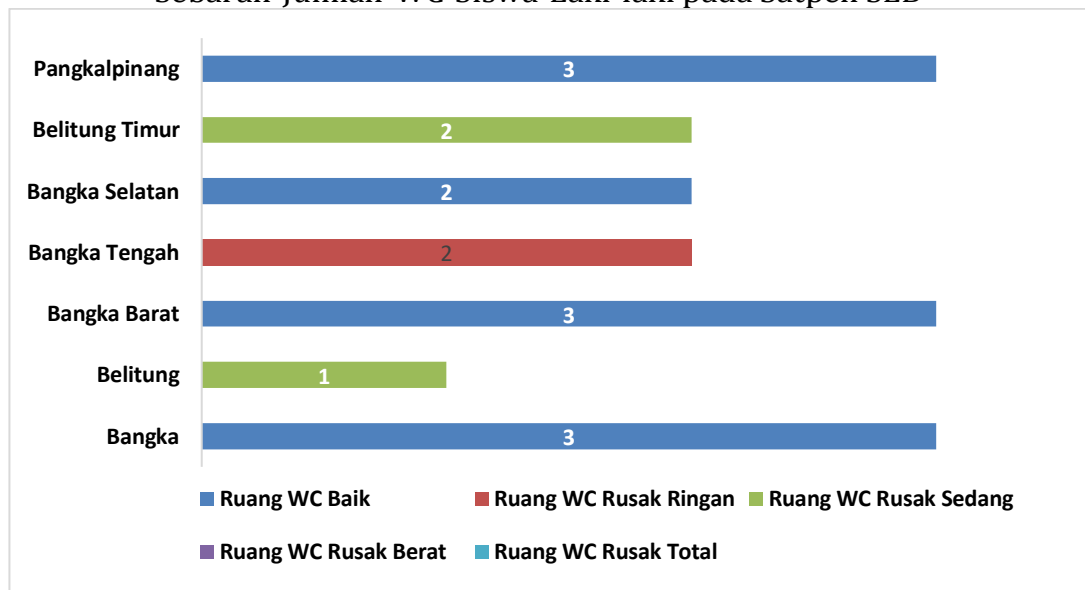
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3) SLB

Pada diagram 3.352 Grafik menunjukkan kondisi fasilitas WC siswa laki-laki pada satuan pendidikan SLB di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, sebagian besar wilayah memiliki jumlah ruang WC dalam kondisi baik, dengan Pangkalpinang, Bangka Barat, dan Bangka memiliki jumlah WC baik yang paling menonjol, yaitu masing-masing sebanyak tiga ruang. Sementara itu, beberapa daerah memiliki fasilitas WC yang memerlukan perhatian perbaikan. Belitung Timur dan Bangka Selatan masing-masing memiliki satu WC dengan kondisi rusak sedang, sementara Belitung juga mencatat satu WC rusak sedang. Bangka Tengah menampilkan kondisi yang lebih beragam, yaitu satu WC dalam kondisi baik dan dua WC dalam kondisi rusak ringan, sehingga membutuhkan tindakan pemeliharaan untuk memastikan fasilitas sanitasi tetap layak digunakan.

Diagram. 3.3.53

Sebaran Jumlah WC Siswa Laki-laki pada Satpen SLB

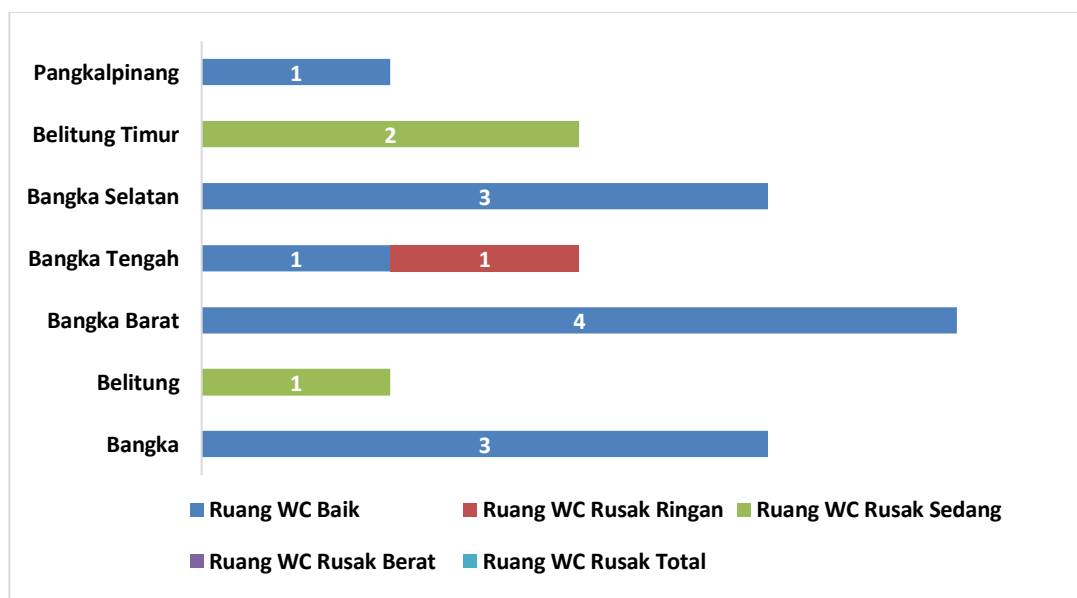


Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

Pada diagram 3.3.53 Grafik tersebut menggambarkan kondisi fasilitas WC untuk siswa perempuan pada satuan pendidikan SLB di berbagai kabupaten/kota. Secara keseluruhan, ketersediaan WC dalam kondisi baik mendominasi di beberapa wilayah, terutama di Bangka Barat yang memiliki empat ruang WC dengan kondisi baik, menjadi yang tertinggi dibanding wilayah lainnya. Bangka juga memiliki tiga WC dalam kondisi baik, diikuti Bangka Selatan dengan jumlah yang sama. Di sisi lain,

beberapa daerah memiliki WC yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Belitung Timur dan Belitung masing-masing memiliki satu hingga dua WC dalam kondisi rusak sedang, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sanitasi di wilayah tersebut. Bangka Tengah memiliki satu WC baik dan satu WC rusak ringan, sehingga memerlukan perbaikan agar fasilitas tetap layak dan nyaman digunakan oleh siswa perempuan. Secara umum, ketersediaan WC perempuan di SLB cukup memadai di sebagian besar wilayah, terutama yang memiliki banyak unit dalam kondisi baik. Namun demikian, upaya perbaikan di beberapa daerah dengan WC rusak sedang maupun rusak ringan sangat diperlukan untuk memastikan layanan sanitasi yang aman, sehat, dan ramah bagi seluruh siswa perempuan di SLB.

Diagram. 3.3.54
Sebaran Jumlah WC Siswa Perempuan pada Satpen SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.8. Meja dan Kursi Siswa

Ketersediaan meja dan kursi siswa merupakan salah satu indikator penting dalam memastikan kenyamanan serta kelancaran proses pembelajaran di kelas. Kondisi sarana ini sangat memengaruhi efektivitas kegiatan belajar, khususnya dalam menciptakan suasana kelas yang tertib dan kondusif. Secara umum, meja dan kursi yang berada dalam kondisi baik menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi peserta didik. Sebaliknya, keberadaan meja atau kursi yang mengalami kerusakan ringan hingga berat menunjukkan perlunya intervensi segera agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Kerusakan ringan biasanya masih dapat diperbaiki melalui

pemeliharaan rutin, sedangkan kerusakan berat sering kali memerlukan penggantian total agar aman digunakan. Jumlah meja dan kursi yang rusak total juga menjadi perhatian khusus karena berdampak langsung terhadap ketersediaan tempat duduk bagi siswa. Oleh karena itu, pemetaan kondisi meja dan kursi siswa di setiap wilayah menjadi langkah penting untuk mengetahui kebutuhan riil yang harus diprioritaskan. Data ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dalam merencanakan pengadaan, perbaikan, maupun peremajaan sarana belajar agar seluruh siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman.

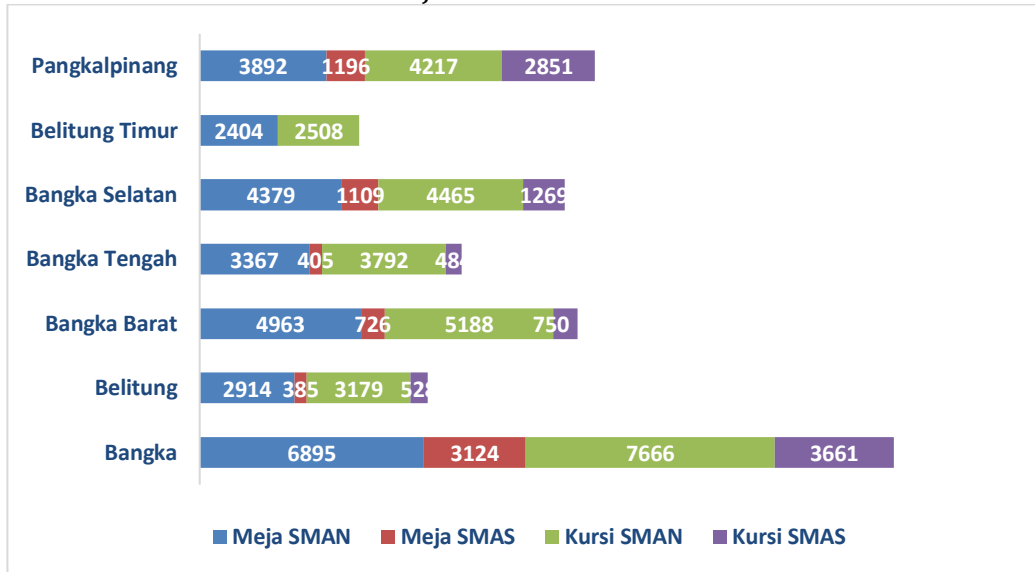
1) SMA

Secara keseluruhan, ketersediaan meja dan kursi di jenjang SMAN jauh lebih tinggi dibandingkan SMAS di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Bangka menjadi wilayah dengan jumlah sarana terbanyak, baik meja maupun kursi untuk SMAN maupun SMAS. Sementara itu, Belitung Timur dan Belitung memiliki jumlah sarana yang relatif lebih sedikit dibanding wilayah lain. Pola umum menunjukkan bahwa SMAN memiliki kapasitas sarana yang jauh lebih memadai, sedangkan SMAS cenderung lebih terbatas, terutama pada jumlah kursi.

Perbedaan ketersediaan sarana ini mengindikasikan adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta, yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan serta kualitas proses pembelajaran. Meja dan kursi merupakan sarana dasar yang sangat penting bagi kegiatan belajar mengajar, sehingga keterbatasan jumlahnya berpotensi menghambat efektivitas pembelajaran, terutama di sekolah yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penyediaan sarana di SMAS, khususnya pada daerah dengan ketersediaan yang masih rendah, agar seluruh satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan layanan pembelajaran yang lebih layak, merata, dan mendukung kebutuhan peserta didik secara optimal.

Diagram. 3.3.55

Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SMA



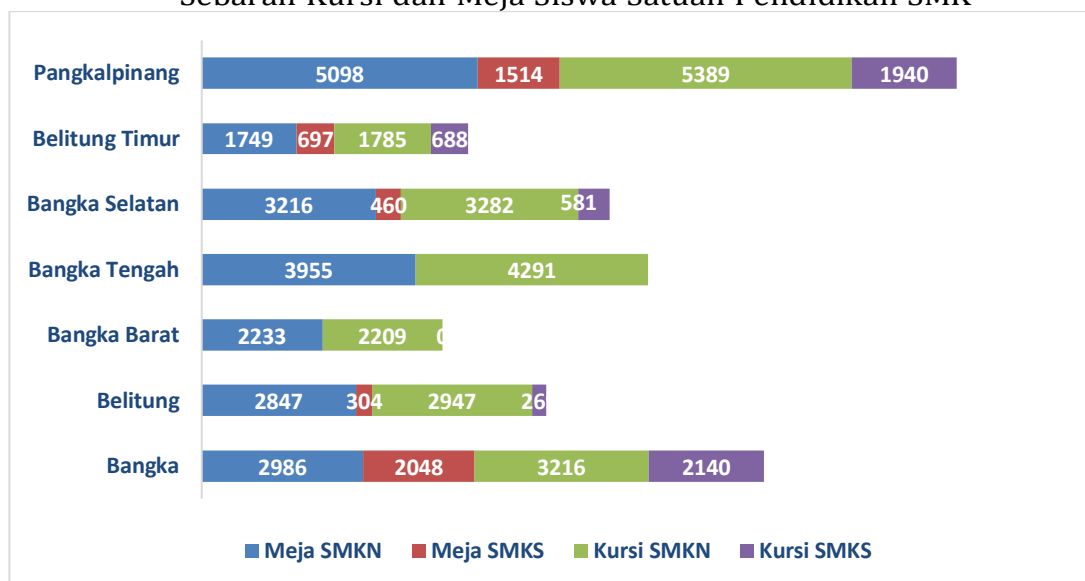
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

Pada diagram 3.3.55 Sebaran meja dan kursi siswa pada satuan pendidikan SMK menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota memiliki ketersediaan sarana belajar yang relatif mencukupi, terutama pada sekolah negeri. Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi dalam jumlah meja dan kursi baik untuk SMKN maupun SMKS, mencerminkan kapasitas sekolah yang lebih besar. Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan juga memiliki jumlah sarana yang cukup banyak, sejalan dengan jumlah peserta didik di wilayah tersebut. beberapa daerah seperti Belitung dan Belitung Timur tampak memiliki jumlah meja dan kursi siswa yang lebih rendah, sehingga berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kualitas proses pembelajaran jika kebutuhan tidak sebanding dengan jumlah siswa.

Diagram. 3.3.56

Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SMK



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2024, (diolah).

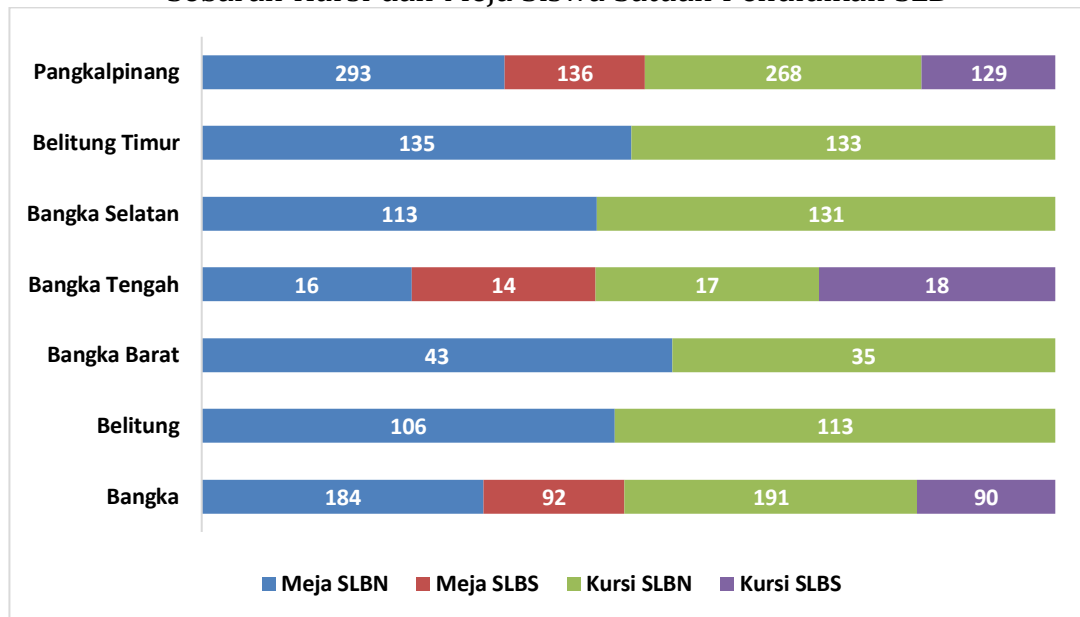
3) SLB

Pada diagram 3.3.56 Sebaran meja dan kursi pada satuan pendidikan SLB di berbagai kabupaten/kota menunjukkan bahwa kebutuhan sarana dasar pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah tersedia, meskipun jumlahnya bervariasi antarwilayah. Kota Pangkalpinang memiliki jumlah meja dan kursi terbanyak untuk SLBN maupun SLBS, mencerminkan kapasitas layanan yang lebih besar dibanding daerah lain.

Kabupaten Bangka dan Belitung juga menunjukkan ketersediaan sarana yang relatif memadai. Sementara itu, Bangka Tengah dan Bangka Barat memiliki jumlah meja dan kursi yang lebih sedikit, yang mengindikasikan kapasitas satuan pendidikan yang lebih kecil atau masih terbatasnya sarana dibanding daerah lainnya. Secara umum, meskipun sarana pembelajaran di SLB telah tersedia, pemerataan jumlah meja dan kursi antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara..

Diagram. 3.3.57

Sebaran Kursi dan Meja Siswa Satuan Pendidikan SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.3.4.9. Papan tulis dan Komputer

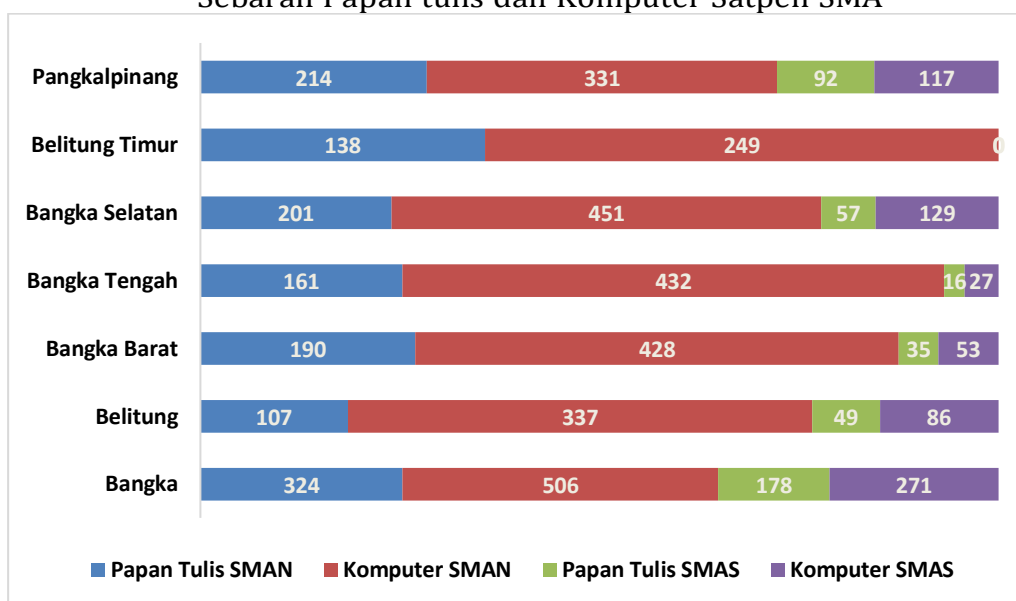
Papan tulis dan komputer merupakan sarana pembelajaran yang memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Papan tulis berfungsi sebagai media utama untuk penyampaian materi secara visual, memudahkan guru dalam menjelaskan konsep, serta membantu siswa memahami pelajaran secara langsung. Keberadaan papan tulis yang layak dan mencukupi di setiap ruang kelas menjadi kebutuhan dasar agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Sementara itu, komputer merupakan perangkat penunjang pembelajaran abad 21 yang tidak hanya digunakan untuk kegiatan administrasi, tetapi juga untuk mendukung literasi digital, keterampilan teknologi informasi, dan kegiatan praktik siswa. Ketersediaan komputer yang memadai, khususnya di sekolah menengah dan sekolah kejuruan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi siswa agar mampu bersaing di era digital. Secara keseluruhan, kecukupan dan kelayakan papan tulis serta komputer merupakan indikator penting dalam memastikan mutu layanan pendidikan yang optimal dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

1) SMA

Peralatan papan tulis dan komputer di SMAN/SMAS paling banyak terdapat di Pangkalpinang dan Bangka, sementara Belitung Timur dan Belitung memiliki jumlah yang lebih sedikit. Distribusi perangkat antar wilayah masih belum merata. Ketimpangan distribusi ini menunjukkan perlunya pemerataan penyediaan perangkat pembelajaran agar seluruh sekolah dapat menjalankan proses belajar mengajar secara optimal. Papan tulis dan komputer merupakan sarana penting yang mendukung penyampaian materi, interaksi kelas, serta pengembangan literasi digital siswa. Oleh karena itu, daerah dengan jumlah perangkat yang masih terbatas perlu menjadi prioritas dalam pengadaan maupun peningkatan fasilitas, sehingga kualitas pembelajaran di seluruh SMAN dan SMAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berlangsung lebih efektif, modern, dan berkesinambungan

Diagram. 3.3.58

Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SMA



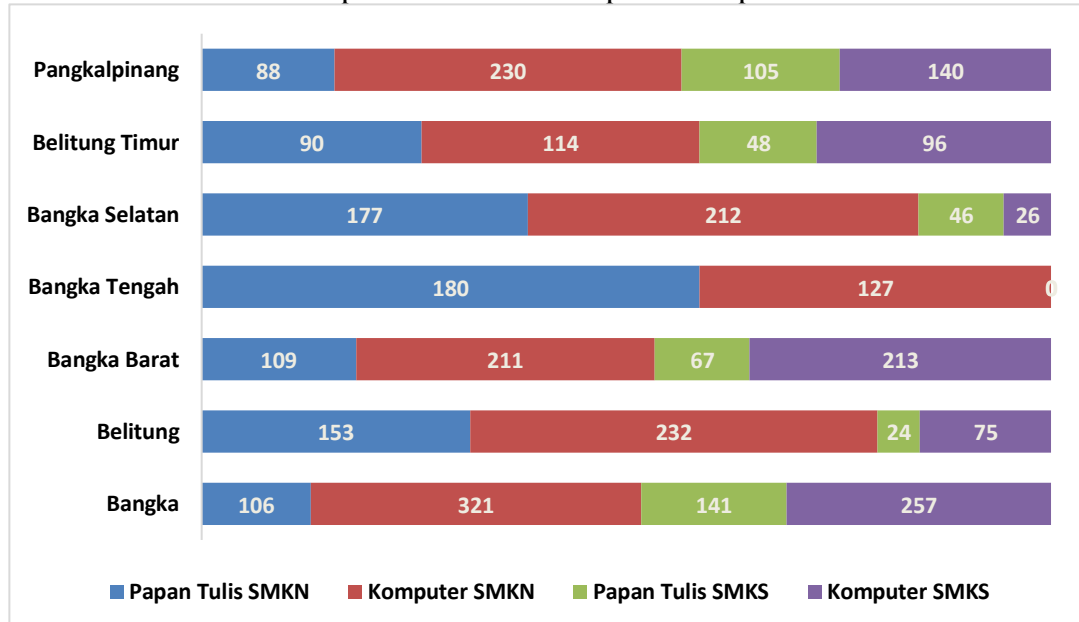
Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

2) SMK

Ketersediaan **papan tulis dan komputer** di SMKN dan SMKS bervariasi tiap daerah. Umumnya **SMKN memiliki jumlah lebih banyak**, terutama di Bangka Selatan, Belitung, dan Bangka. SMKS cenderung lebih sedikit dan tidak merata antar wilayah. Perbedaan ketersediaan perangkat ini mencerminkan adanya ketimpangan sarana antara sekolah negeri dan swasta, yang dapat berdampak pada kualitas proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan praktik dan pembelajaran berbasis teknologi. Papan tulis dan komputer merupakan fasilitas penting untuk mendukung penyampaian materi, simulasi kejuruan, serta peningkatan kompetensi digital siswa—hal yang sangat relevan di lingkungan SMK. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki jumlah perangkat lebih sedikit perlu mendapatkan perhatian melalui pengadaan tambahan maupun pemerataan distribusi sarana, agar seluruh SMKN dan SMKS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih setara, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Diagram. 3.3.59

Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SMK



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

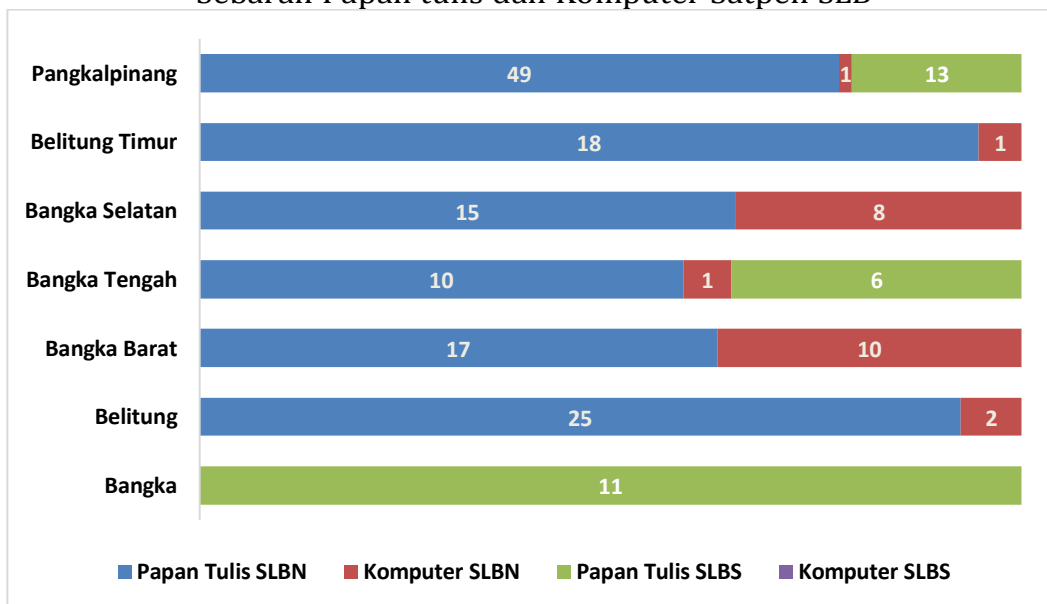
3) SLB

Sebagian besar daerah memiliki jumlah Papan Tulis SLBN yang cukup memadai, terutama Pangkalpinang, Belitung, dan Belitung Timur. Penggunaan Komputer SLBN masih sangat sedikit di hampir semua wilayah. Untuk SLBS, fasilitas didominasi oleh Papan Tulis SLBS, sedangkan Komputer SLBS hanya tersedia di beberapa daerah seperti Bangka Selatan dan Belitung, itupun dalam jumlah kecil. Secara umum, sekolah luar biasa masih membutuhkan peningkatan fasilitas teknologi, terutama komputer.

Secara keseluruhan, ketersediaan papan tulis di SLBN relatif memadai, terutama di wilayah Pangkalpinang, Belitung, dan Belitung Timur, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar ruang kelas telah cukup terlayani. Namun, keberadaan komputer di SLBN masih sangat terbatas hampir di seluruh daerah, sehingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khusus belum dapat berjalan optimal. Kondisi serupa juga terlihat pada SLBS, di mana fasilitas masih didominasi oleh papan tulis, sementara komputer hanya tersedia di beberapa lokasi seperti Bangka Selatan dan Belitung, itupun dalam jumlah yang sangat minim. Situasi ini mencerminkan bahwa sekolah luar biasa masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dalam penyediaan perangkat teknologi, agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh akses pembelajaran yang lebih modern, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan pendidikan inklusif.

Diagram. 3.3.60

Sebaran Papan tulis dan Komputer Satpen SLB



Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2025, (diolah).

3.1. RAPOR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB.

3.1.1. RAPOR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. Kemampuan Literasi

Kemampuan literasi diukur dengan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

1) Kemampuan literasi SMA Semua

Berdasarkan data berikut sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Data menunjukkan bahwa selain capaiannya baik, juga mengalami peningkatan.

Tabel 3.4.1
Kemampuan literasi Siswa SMA Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	17,10	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	19,50	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	14,26	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	13,91	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	11,09	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	16,46	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	10,60	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kemampuan literasi SMA Negeri

Capaian kemampuan literasi pada satuan pendidikan SMA Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik SMA diseluruh kabupaten/kota telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 3.4.2
Kemampuan literasi Siswa SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	18,12	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	20,81	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	16,18	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	16,43	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	8,95	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	16,46	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	12,19	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kemampuan literasi SMA Swasta

Sementara capaian kemampuan literasi pada satuan pendidikan SMA Swasta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik di seluruh kabupaten/kota telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 3.4.3
Kemampuan literasi Siswa SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	14,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	18,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	2,47	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	0,11	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	14,58	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	8,15	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi

Indikator ini untuk mengetahui persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

1) Kemampuan Numerasi SMA Semua

Berdasarkan data berikut diketahui bahwa sebagian besar peserta didik SMA Negeri dan Swasta di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, kecuali sekolah yang berada di Bangka Selatan.

Tabel 3.4.4
Kemampuan Numerasi Siswa SMA Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	19,71	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	15,16	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	27,80	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	25,77	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	12,54	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	9,01	Peringkat menengah bawah (61- 80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	15,91	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kemampuan Numerasi SMA Negeri

Berdasarkan data berikut diketahui bahwa sebagian besar peserta didik pada SMA Negeri di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi,

Tabel 3.4.5
Kemampuan Numerasi Siswa SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	22,95	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	14,86	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	28,87	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	28,86	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	18,05	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	9,01	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	20,57	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kemampuan Numerasi SMA Swasta

Sementara itu sebagian besar peserta didik pada SMA Swasta di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, SMA Swasta yang berada di Bangka Barat dan Selatan perlu didorong untuk peningkatan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Tabel 3.4.6
Kemampuan Numerasi Siswa SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	12,89	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	19,58	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	21,82	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	8,67	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,19	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	8,75	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Karakter

Indikator ini untuk mengetahui nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.

1) Karakter SMA Umum

Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.4.7
Karakter Siswa pada SMA Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,37	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	0,86	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	0,44	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	0,38	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,77	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,53	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	2,06	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Karakter SMA Negeri

Berdasarkan data berikut peserta didik di SMA Negeri di seluruh Kabupaten/kota terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.4.8
Karakter Peserta Didik pada SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,08	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	1,25	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	0,25	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	1,96	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,90	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,53	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	1,15	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Karakter SMA Swasta

Sementara peserta didik di SMA Swasta di seluruh Kabupaten/kota terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.4.9
Karakter Peserta Didik pada SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,81	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	4,79	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	1,05	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	10,76	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	0,94	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	2,89	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Proporsi PTK bersertifikat

Data ini menjelaskan tentang Proporsi PTK bersertifikat. Proporsi tersebut dihitung dari jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada.

1) Proporsi PTK bersertifikat SMA Semua

Data berikut menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan jenjang SMA di Propinsi Kep. Bangka Belitung dengan proporsi guru bersertifikat pendidik kurang.

Tabel 3.4.10
Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	58,90	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	63,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	66,18	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	71,74	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	50,40	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	44,13	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Proporsi PTK bersertifikat SMA Negeri

Satuan pendidikan jenjang SMA pada sekolah negeri di Propinsi Kep. Bangka Belitung dengan proporsi guru bersertifikat pendidik berstatus cukup namun masih ada kekurangan di beberapa satuan Pendidikan.

Tabel 3.4.11
Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	45,92	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	45,06	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	42,95	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	43,49	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	37,35	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	41,51	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	20,50	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Proporsi PTK bersertifikat SMA Swasta

Selanjutnya satuan pendidikan jenjang SMA pada sekolah swasta di Propinsi Kep. Bangka Belitung dengan proporsi guru bersertifikat pendidik berstatus kurang hamper di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 3.4.12
Proporsi PTK bersertifikat pada SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	71,89	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	81,60	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	89,40	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	100,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Kurang	Turun	63,47	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	67,77	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Indeks Distribusi Guru

Indikator ini menggambarkan indeks pemerataan guru per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu. Data berikut menunjukkan bahwa sekolah negeri dan swasta jenjang SMA di kabupaten/kota masih memiliki sebaran guru yang kurang merata, kecuali sekolah yang berada di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3.4.13
Indeks Distribusi Guru pada SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	0,05	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	0,06	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	0,01	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	0,08	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Kurang	Naik	0,02	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	0,05	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

5. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru

Data ini menjelaskan tentang kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru. Pengukurannya yaitu Jumlah formasi guru ASN yang diajukan dibagi jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbud. Data menunjukkan Propinsi Kep. Bangka Belitung kurang mampu dalam melakukan pemenuhan guru

Tabel 3.4.14
Kecukupan formasi guru ASN

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

6. Kualitas Pembelajaran SMA

Indikator ini menjelaskan nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar

1) Kualitas Pembelajaran SMA Semua

Data ini menjelaskan bahwa pembelajaran pada jenjang SMA Negeri dan Swasta telah mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru.

Tabel 3.4.15
Kualitas Pembelajaran SMA Semua

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	0,74	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	0,20	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,60	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	0,45	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Sedang	Naik	1,54	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	2,09	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	5,60	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

1) Kualitas Pembelajaran SMA Negeri

Pembelajaran pada jenjang SMA Negeri telah mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru, sebagaimana yang ditampilkan data berikut.

Tabel 3.4.16
Kualitas Pembelajaran SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	0,02	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	1,36	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,46	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Naik	1,01	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	2,91	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	2,09	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	1,47	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kualitas Pembelajaran SMA Swasta

Sementara itu pembelajaran pada jenjang SMA Swasta sudah cukup mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru, sebagaimana yang ditampilkan data berikut.

Tabel 3.4.17
Kualitas Pembelajaran SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	1,78	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	1,46	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	1,01	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	10,69	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	0,28	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	8,82	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

7. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru SMA

Indikator ini untuk mengetahui nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar. Data ini menunjukkan bahwa guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik.

Tabel 3.4.18
Refleksi dan perbaikan pembelajaran

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	3,00	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	4,43	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	3,96	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	0,15	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	2,70	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	1,17	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	5,24	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

8. Keamanan SMA

Indikator ini untuk mengukur nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba

berdasarkan survei lingkungan belajar

1) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Semua

Data ini menjelaskan bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan Pendidikan.

Tabel 3.4.19
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	1,62	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	1,73	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	1,65	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	1,22	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	1,84	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,39	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	4,91	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Negeri

Data ini menjelaskan tentang Satuan Pendidikan jenjang SMA Negeri memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 3.4.20
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	1,53	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	2,86	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	2,30	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	2,19	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	1,80	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,39	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,33	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Swasta

Data berikut ini menjelaskan bahwa satuan pendidikan jenjang SMA Swasta juga memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 3.4.21
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	1,75	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	1,39	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	0,25	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	5,91	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	1,91	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	9,67	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

9. Iklim Kebinekaan SMA

Indikator ini dihitung melalui nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar. Data ini menjelaskan tentang kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen

kebangsaan.

1) Iklim Kebinekaan SMA Semua

Iklim kebinekaan pada sekolah menengah atas negeri dan swasta menunjukkan kondisi baik dan terus meningkat dari tahun sebelumnya di seluruh kabupaten/kota. Data berikut ini menunjukkan bahwa satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 3.4.22
Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	5,02	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	5,67	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	5,61	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	4,49	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,85	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	6,01	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	3,14	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Kebinekaan SMA Negeri

Kondisi sekolah negeri menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Data berikut ini menunjukkan bahwa satuan Pendidikan negeri sudah menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 3.4.23
Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	5,02	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	7,19	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	6,61	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	5,78	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,20	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	6,01	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	4,87	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024

(Diolah).

3) Iklim Kebinekaan SMA Swasta

Data berikut ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan swasta sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 3.4.24
Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	5,03	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	2,85	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	2,59	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	4,81	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,41	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,61	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024
(Diolah).

10. Iklim Inklusivitas SMA

Indikator ini dihitung dengan nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.

1) Iklim Inklusivitas SMA Semua

Data ini menjelaskan tentang kondisi satuan pendidikan sudah mampu menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Dalam proses pembelajaran.

Tabel 3.4.25
Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,17	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	0,61	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	0,32	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	2,50	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,08	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	1,35	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	0,46	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Inklusivitas SMA Negeri

Satuan pendidikan jenjang SMA negeri sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat Istimewa, sebagaimana data berikut.

Tabel 3.4.26
Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,79	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	2,40	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	0,93	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	2,93	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,30	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	1,35	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,35	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Iklim Inklusivitas SMA Swasta

Sementara SMA swasta sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat Istimewa, sebagaimana data berikut.

Tabel 3.4.27
Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan SMA Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,74	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	2,82	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	1,50	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	0,29	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,43	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	2,08	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

11. Partisipasi Warga Satuan Pendidikan

Indikator ini menghitung nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. Data ini menggambarkan keterlibatan warga sekolah dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Data berikut menunjukkan bahwa satuan pendidikan sudah melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.

Tabel 3.4.28
Partisipasi Warga Satuan Pendidikan

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	1,88	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	1,39	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	1,38	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	6,45	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	2,20	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	5,74	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	10,81	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3.1.2. RAPOR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

1. Kemampuan literasi SMK

Kemampuan literasi diukur dengan persentase peserta didik SMK berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

1) Kemampuan literasi SMK Umum

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada sekolah negeri dan swasta.

Tabel 3.4.29
Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	16,16	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	12,83	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	12,68	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	19,00	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	14,61	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	21,50	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	6,75	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kemampuan literasi SMK Negeri

Berikut ini data persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada sekolah negeri saja.

Tabel 3.4.30
Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	8,18	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	15,12	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	14,83	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	19,00	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	10,36	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	23,47	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	5,73	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kemampuan literasi SMK Swasta

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada sekolah swasta disajikan pada data dibawah ini.

Tabel 3.4.31
Capaian Kemampuan Literasi Pendidikan SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	22,61	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	4,51	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Baik	Naik	40,00	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	16,40	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	7,96	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi SMK

Persentase peserta didik SMK berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

1) Kemampuan Numerasi SMK Umum

Berikut ini persentase peserta didik SMK berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan secara umum pada sekolah negeri dan swasta.

Tabel 3.4.32
Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	19,93	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	9,95	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	18,47	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Naik	20,89	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Sedang	Naik	13,34	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	19,91	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	11,21	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kemampuan Numerasi SMK Negeri

Persentase peserta didik SMK Negeri berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan digambarkan pada data berikut.

Tabel 3.4.33
Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	10,33	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	15,43	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	21,21	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Naik	20,89	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	12,59	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	18,61	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	16,76	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kemampuan Numerasi SMK Swasta

Persentase peserta didik SMK Swasta berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan digambarkan pada data berikut.

Tabel 3.4.34
Capaian Kemampuan Numerasi Pendidikan SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	27,76	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	5,37	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	2,21	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Sedang	Naik	17,79	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	20,17	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Naik	4,52	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Karakter Siswa SMK

Kecenderungan peserta didik SMK dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian.

1) Karakter SMK Umum

Kecenderungan peserta didik SMK baik negeri maupun swasta dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian dapat diketahui dari data berikut ini.

Tabel 3.4.35
Gambaran Karakter Pendidikan SMK

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,40	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	0,76	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	1,39	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	1,57	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	1,21	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,62	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	0,46	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Karakter SMK Negeri

Kecenderungan peserta didik SMK Negeri dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotongroyong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian dapat diketahui dari data berikut ini.

Tabel 3.4.36
Gambaran Karakter Pendidikan SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,04	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	0,15	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	0,32	Peringkat menengah bawah (61- 80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	1,57	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	0,80	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	0,81	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	0,17	Peringkat menengah atas (21- 40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Karakter SMK Swasta

Kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian pada SMK Swasta dapat dilihat pada informasi berikut ini.

Tabel 3.4.37
Gambaran Karakter Pendidikan SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,77	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	1,67	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	7,85	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,53	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	2,25	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	0,72	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Proporsi PTK bersertifikat

Data ini menjelaskan tentang Proporsi PTK bersertifikat. Proporsi tersebut dihitung dari jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada. Data ini merupakan dimensi proses dalam penyelenggaraan Pendidikan pada suatu wilayah. Berikut ini capaian PTK bersertifikat berdasarkan kabupaten/kota.

Tabel 3.4.38
Proporsi PTK bersertifikat

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	53,97	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	51,68	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	62,28	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Kurang	Turun	64,97	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Turun	60,59	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	40,39	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

5. Indeks Distribusi Guru

Indikator ini menggambarkan indeks pemerataan guru per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu. Berdasarkan data berikut ini diketahui bahwa hampir semua kabupaten/kota memiliki pemerataan guru per-mata pelajaran SMK yang kurang.

Tabel 3.4.39
Indeks Distribusi Guru SMK

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Naik	0,02	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Naik	0,01	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	0,01	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Kurang	Naik	0,04	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Naik	0,01	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

6. Kecukupan Formasi Guru ASN SMK Untuk Sekolah yang Diselenggarakan Oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru

Data ini menjelaskan tentang kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru. Pengukurannya yaitu Jumlah formasi guru ASN yang diajukan dibagi jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbud.

Tabel 3.4.40
Kecukupan Formasi Guru ASN

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

7. Kualitas pembelajaran

Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa pada SMK.

1) Kualitas pembelajaran SMK Umum

Capaian indikator kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa pada SMK negeri dan swasta adalah sedang hampir di semua kabupaten/kota.

Tabel 3.4.41
Kualitas pembelajaran SMK Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	0,20	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	0,94	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	1,08	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	1,18	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	0,41	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	1,01	Peringkat menengah bawah (61- 80%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Naik	0,07	Peringkat menengah atas (21- 40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kualitas pembelajaran SMK Negeri

Capaian indikator kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa pada SMK negeri adalah sedang di semua kabupaten/kota kecuali SMK negeri yang berada di Kabupaten Belitung.

Tabel 3.4.42
Kualitas pembelajaran SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	0,31	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	0,01	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,33	Peringkat menengah bawah (61- 80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	1,18	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	0,31	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	0,99	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Naik	0,71	Peringkat menengah atas (21- 40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kualitas pembelajaran SMK Swasta

Capaian indikator kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa pada SMK negeri adalah sedang di semua kabupaten/kota kecuali SMK Swasta yang berada di Kabupaten Tengah yang tidak tersedia.

Tabel 3.4.43
Kualitas pembelajaran SMK swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	0,54	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	2,73	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	5,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Sedang	Naik	0,88	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	3,53	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	0,56	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah)

8. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Indikator ini menjelaskan tentang Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada SMK. Data menunjukkan bahwa hanya SMK yang berada di Kabupaten Bangka Barat yang capaiannya sedang, yang lainnya baik.

Tabel 3.4.44
Refleksi dan perbaikan pembelajaran

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	2,39	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	3,29	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	3,34	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	3,16	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	4,62	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	2,37	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	0,21	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

9. Iklim keamanan satuan Pendidikan

indikator ini menjelaskan tentang kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.

1) Iklim keamanan sekolah

Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik pada SMK Negeri dan Swasta dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 3.4.45
Iklim Keamanan SMK Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	1,47	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	0,27	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	1,51	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	1,23	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,20	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	0,08	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,64	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Keamanan SMK Negeri

Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik pada SMK Negeri memiliki capaian baik di semua kabupaten/kota.

Tabel 3.4.46
Iklim Keamanan SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	2,70	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	1,69	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	2,17	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	1,23	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,11	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	2,24	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	3,75	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Iklim Keamanan SMK Swasta

Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik pada SMK Swasta memiliki capaian baik di semua kabupaten/kota, kecuali di Bangka Tengah tidak tersedia data.

Tabel 3.4.47
Iklim Keamanan SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,52	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	2,06	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	2,46	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,72	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	2,71	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	0,48	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

10. Iklim Kebinekaan

Indikator ini menjelaskan tentang kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.

1) Iklim Kebinekaan SMK Umum

Indikator ini menjelaskan tentang kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan pada sekolah negeri dan swasta.

Tabel 3.4.48
Iklim Kebinekaan SMK Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	5,75	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	4,81	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	5,14	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	4,13	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,64	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	3,81	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	5,54	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Kebinekaan SMK Negeri

Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan pada sekolah negeri memiliki capaian baik di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.4.49
Iklim Kebinekaan SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	5,01	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	4,63	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	5,33	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	4,13	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,50	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	5,92	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	5,61	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Iklim Kebinekaan SMK Swasta

Indikator ini menjelaskan tentang kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan pada SMK swasta.

Tabel 3.4.50
Iklim Kebinekaan SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	6,32	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	5,49	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	4,14	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Baik	Naik	7,53	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	1,21	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	5,50	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

11. Iklim Inklusivitas

Indikator ini menjelaskan tentang kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.

1) Iklim Inklusivitas SMK Umum

Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa pada SMK Negeri dan Swasta dengan capaian sedang berada di Bangka Barat, Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Sementara lainnya bernilai baik.

Tabel 3.4.51
Iklim Inklusivitas SMK Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,07	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	0,01	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,86	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	1,70	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,44	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	0,51	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,83	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Iklim Inklusivitas SMK Negeri

Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa pada SMK Negeri dengan capaian sedang berada di Bangka Barat dan Bangka Tengah. Sementara lainnya bernilai baik.

Tabel 3.4.52
Iklim Inklusivitas SMK Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	1,47	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	0,09	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	0,04	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	1,70	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	2,34	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	0,83	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,60	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Iklim Inklusivitas SMK Swasta

Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa pada SMK Negeri dengan capaian sedang berada di Bangka Barat dan Bangka Selatan. Sementara lainnya bernilai baik, kecuali SMK yang berada di Bangka Tengah yang tidak tersedia data.

Tabel 3.4.53
Iklim Inklusivitas SMK Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	1,08	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	1,40	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	5,82	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Baik	Naik	10,03	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	0,16	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	2,08	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

12. *Link and Match* dengan Dunia Kerja

Indikator ini menjelaskan tentang nilai rerata keselarasan SMK dengan kebutuhan dan standar dunia kerja. Data berikut menunjukkan SMK sudah mengupayakan keselarasan SMK dengan dunia kerja, namun perlu melakukan peningkatan kualitas pembelajaran, kelembagaan dan kompetensi SDM.

Tabel 3.4.54
Link and Match dengan Dunia Kerja

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

13. Partisipasi warga satuan Pendidikan

Indikator ini memberikan Gambaran tentang nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar. Data menunjukkan satuan pendidikan melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.

Tabel 3.4.55
Partisipasi warga satuan Pendidikan SMK

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	1,06	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Naik	0,39	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,97	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	5,78	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	0,88	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	1,30	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	4,34	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3.1.3. RAPOR PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA

A. SMALB SEMUA

1. Kompetensi Literasi SMALB

Indikator ini menjelaskan tentang persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

1. Kompetensi Literasi SMALB Umum

Data capaian kompetensi literasi SMALB menunjukkan peserta didik di Kabupaten Bangka dan Belitung telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun pada SMALB yang berada di Bangka Tengah, Pangkalpinang dan Belitung Timur perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.56
Kompetensi Literasi SMALB Umum

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	50,00	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	100,00	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	70,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kompetensi Literasi SMALB Negeri

Data capaian kompetensi literasi SMALB menunjukkan peserta didik di Kabupaten Bangka dan Belitung telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun pada SMALB yang berada di Bangka Tengah, Pangkalpinang dan Belitung Timur perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.57
Kompetensi Literasi SMALB Negeri

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	50,00	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	100,00	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	70,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Kompetensi Literasi SMALB Swasta

Data capaian kompetensi literasi SMALB Swasta menunjukkan peserta didik di Kabupaten Bangka telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun di Pangkalpinang perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.58

Kompetensi Literasi SMALB Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kompetensi Numerasi SMALB

Indikator ini menggambarkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Data berikut menunjukkan peserta didik SMALB Negeri dan Swasta pada Kabupaten Bangka dan Belitung telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun pada Kabupaten Bangka Tengah, Belitung Timur dan kota Pangkalpinang perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Walaupun secara umum capaiannya 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.59
Kompetensi Numerasi SMALB Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	50,00	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	100,00	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	70,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Karakter

Indikator ini menjelaskan mengenai nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.

Peserta didik SMALB pada Kabupaten Bangka, Belitung, Belitung Timur dan kota Pangkalpinang telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari, sementara yang berada di Bangka Tengah masih kurang.

Tabel 3.4.60
Capaian Karakter SMALB Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	10,23	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,55	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	5,46	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	12,50	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Proporsi PTK bersertifikat

Jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada. Kabupaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang dengan proporsi guru SMALB bersertifikat pendidik kurang. Sementara Bangka Barat, Selatan, Tengah dan Belitung Timur memiliki proporsi sedang.

Tabel 3.4.61
Proporsi PTK SMALB Negeri dan Swasta Bersertifikat

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	63,94	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	65,35	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

5. Indeks Distribusi Guru

Indikator ini menggambarkan indeks pemerataan guru per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu. Daerah memiliki sebaran guru yang kurang merata yaitu berada di seluruh Satuan Pendidikan SMALB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.4.62
Indeks Distribusi Guru

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	0,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	0,29	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

6. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru

Jumlah formasi guru ASN yang diajukan dibagi jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbud. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang mampu dalam melakukan pemenuhan guru SMALB pada Satuan Pendidikan Khusus yang berada di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 3.4.63
Kecukupan Formasi Guru ASN di Satuan Pendidikan SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

7. Kualitas Pembelajaran

Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif tersebar di Kabupaten Bangka, Belitung dan kota Pangkalpinang. Sementara di Bangka Tengah dan Belitung Timur cukup atau sedang.

Tabel 3.4.64
Kualitas Pembelajaran SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	0,98	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	12,58	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	9,85	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	5,64	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

8. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Indikator ini menjelaskan nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar. Data menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pembelajarannya SMALB yang berada di kabupaten Bangka dan Pangkalpinang sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif. Namun sekolah yang berada di Kabupaten Belitung dan Belitung timur sudah baik.

Tabel 3.4.65
Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	4,10	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	3,72	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	4,41	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	5,19	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

9. Iklim keamanan satuan Pendidikan

Indikator ini memberikan data tentang nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar. Data berikut menunjukkan satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan Pendidikan.

Tabel 3.4.66
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	15,85	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Baik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,42	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	0,39	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	6,25	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

10. Iklim Kebinekaan

Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar. Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme sebagaimana ditunjukkan data berikut.

Tabel 3.4.67
Iklim Kebinekaan SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	0,27	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Baik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	5,67	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	4,11	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	5,85	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

11. Iklim Inklusivitas

Indikator ini menggambarkan nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar. Satuan pendidikan pada jenjang SMALB sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat Istimewa di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 3.4.68
Iklim Inklusivitas SMALB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	8,72	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	22,85	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	23,03	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	1,94	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

12. Partisipasi warga satuan Pendidikan

Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar merupakan indikator untuk mengetahui indikator ini. Satuan pendidikan jenjang SMALB sudah melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.

Tabel 3.4.69
Partisipasi warga satuan Pendidikan

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	16,70	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Turun	9,46	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	1,25	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	9,21	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

B. SMPLB SEMUA

1. Kemampuan literasi SMPLB

Indikator ini merupakan persentase peserta didik pada jenjang SMPLB berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Data berikut menunjukkan peserta didik di SLB yang berada di Belitung Timur telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Sementara itu untuk SMPLB yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah bernilai cukup sedangkan di Bangka Barat bernilai kurang.

Tabel 3.4.70
Kemampuan literasi SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Naik	25,00	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	50,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	100,00	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	76,93	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi SMPLB

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Data menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik jenjang SMPLB baik negeri maupun swasta telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Tabel 3.4.71
Kemampuan Numerasi SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	25,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Baik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	30,77	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Karakter SMPLB

Indikator ini menjelaskan nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter. Data menggambarkan bahwa secara umum peserta didik SMPLB sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.4.72
Karakter Siswa SMPLB Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	13,86	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	34,99	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	26,82	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	4,54	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Proporsi PTK bersertifikat

Indikator ini menghitung jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada. Proporsi guru bersertifikat pendidik pada jenjang SMPLB di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang baik negeri maupun swasta.

Tabel 3.4.73
Proporsi PTK bersertifikat di SMPLB Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	63,94	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	65,35	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

5. Indeks Distribusi Guru

Indikator ini menghitung indeks pemerataan guru per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu. Data berikut menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sebaran guru yang kurang merata pada jenjang SMPLB baik pada negeri maupun swasta.

Tabel 3.4.74
Indeks Distribusi Guru di SMPLB Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	0,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	0,29	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

6. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru

Indikator ini menghitung jumlah formasi guru ASN yang diajukan dibagi jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbud. Data menunjukkan bahwa provinsi belum cukup mampu dalam melakukan pemenuhan guru.

Tabel 3.4.75
Kecukupan Formasi Guru ASN di SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

7. Kualitas pembelajaran

Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif.

Tabel 3.4.76
Kualitas Pembelajaran di SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	5,50	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	23,39	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	3,37	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	1,45	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

8. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif.

Tabel 3.4.77
Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	12,03	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	14,22	Peringkat menengah bawah (61- 80%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	3,30	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	3,74	Peringkat menengah atas (21- 40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

9. Iklim keamanan satuan Pendidikan

Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.

Tabel 3.4.78
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	12,03	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	14,22	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	3,30	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	3,74	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

10. Iklim Kesetaraan Gender

Satuan pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.

Tabel 3.4.79
Iklim Keamanan Kesetaraan Gender SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	16,25	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Turun	35,08	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Turun	11,85	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	11,51	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

11. Iklim Kebinekaan

Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 3.4.80
Iklim Kebinekaan SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	7,62	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	15,73	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	7,64	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	0,24	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

12. Iklim Inklusivitas

Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Tabel 3.4.81
Iklim Inklusivitas SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Naik	6,35	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	21,80	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Baik	Naik	12,32	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	16,81	Peringkat atas (1-20%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

13. Partisipasi warga satuan Pendidikan

Satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan.

Tabel 3.4.82
Partisipasi Warga Satuan Pendidikan SMPLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	18,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	12,07	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung Timur	Sedang	Turun	2,88	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	14,78	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

C. SLB UMUM

1. Kemampuan literasi

Rata-rata capaian kemampuan literasi siswa SDLB adalah 40% - 70%, artinya peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Beberapa Kabupaten masih ada yang kurang yaitu Bangka dan Bangka Selatan.

Tabel 3.4.83
Kemampuan Literasi SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	100,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	100,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	6,25	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi

Capaian kemampuan numerasi siswa SDLB adalah 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.84
Kemampuan Numerasi SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	20,00	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	50,00	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	56,25	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Karakter

Data berikut menginformasikan bahwa peserta didik SDLB telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.

Tabel 3.4.85
karakter SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	2,40	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	24,24	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	28,67	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	3,25	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	11,73	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	3,08	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Proporsi PTK bersertifikat

Data berikut menunjukkan bahwa Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan dengan proporsi guru bersertifikat pendidik kurang.

Tabel 3.4.86
Proporsi PTK SDLB Bersertifikat

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	63,94	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	65,35	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

5. Indeks Distribusi Guru

Indikator ini merupakan indeks pemerataan guru SDLB per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu. Data berikut menunjukkan bahwa daerah memiliki sebaran guru yang kurang merata.

Tabel 3.4.87
Indeks Distribusi Guru SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	0,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung	Kurang	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	NA (karena nilai tahun lalu tidak tersedia)	Peringkat atas (1-20%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	0,29	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

6. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru

Data berikut ini memberikan informasi bahwa Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan yang cukup mampu dalam melakukan pemenuhan guru, walaupun nilainya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.88
Kecukupan formasi guru ASN SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Kurang	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Peringkat bawah (81-100%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

7. Kualitas pembelajaran

Capaian kualitas pembelajaran berdasarkan data berikut bahwa pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif, walaupun capaiannya menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.89
Kualitas pembelajaran SDLB

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	6,19	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	10,49	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	9,00	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Naik	3,33	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Turun	8,12	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	6,71	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

8. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Capaian berdasarkan data berikut adalah adanya upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif.

Tabel 3.4.90
Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	11,29	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	4,75	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Turun	12,97	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	17,12	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Turun	4,43	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	10,41	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

9. Iklim keamanan satuan Pendidikan

Capaiannya adalah Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.

Tabel 3.4.91
Iklim keamanan satuan Pendidikan

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	3,47	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	9,36	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	9,80	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Naik	13,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	6,02	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)	NA (Satdik tidak mengikuti AN)
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	0,42	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

10. Iklim Kesetaraan Gender

Satuan pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.

Tabel 3.4.92
Iklim Kesetaraan Gender

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	14,31	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	17,74	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	11,42	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	13,04	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	12,73	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	13,01	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

11. Iklim Kebinekaan

Berdasarkan data berikut diketahui bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 3.4.93
Iklim Kebinekaan

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	13,04	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Turun	7,80	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	15,45	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Baik	Turun	10,90	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Turun	2,28	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Turun	9,57	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

12. Iklim Inklusivitas

Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Tabel 3.4.94
Iklim Inklusivitas

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Baik	Turun	7,56	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Barat	Baik	Naik	6,06	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Baik	Turun	7,26	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Naik	4,50	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	7,24	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	6,32	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

13. Partisipasi warga satuan Pendidikan

Satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan.

Tabel 3.4.95
Partisipasi warga satuan Pendidikan

Kab/Kota	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Turun	26,51	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Turun	8,53	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Turun	13,90	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Turun	19,46	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Turun	10,81	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kota Pangkalpinang	Sedang	Turun	7,61	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah)

3.4.1. RAPOR PENDIDIKAN KESETARAAN

A. SMA KESETARAAN

1. Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan

Indikator ini menjelaskan tentang persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

1) Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan Semua

Data capaian kompetensi literasi SMA Kesetaraan menunjukkan peserta didik di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah masih kurang dalam mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Belitung Timur sudah baik yang artinya lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum untuk literasi.

Tabel 3.4.96
Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan Semua

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Naik	10,18	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	27,84	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Naik	3,60	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	24,17	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	4,64	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Naik	15,53	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan Negeri

Data capaian kompetensi literasi SMA Kesetaraan Negeri merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SMA yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan belajar masyarakat yang dikelola oleh pemerintah hanya tersedia datanya di 3 (Tiga) pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan peserta didik di Kota Pangkalpinang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Sementara SMALB yang berada di Bangka Selatan perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.97
Kompetensi Literasi SMALB Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	NA	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Barat	NA	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Naik	10,19	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	NA	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kab. Belitung	Sedang	Naik	33,35	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	NA	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	21,05	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Literasi SMA Kesetaraan Swasta

Data capaian kompetensi literasi SMA Kesetaraan Swasta merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SMA yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Masyarakat atau dikenal dengan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Data capaian kompetensi literasi SMA Kesetaraan Swasta menunjukkan peserta didik di Kabupaten Belitung telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. PKBM di dua Kabupaten perlu didorong agar peserta didiknya mampu mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.98
Kompetensi Literasi SMALB Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Naik	10,18	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	NA	NA	NA
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	30,06	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Naik	3,60	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Baik	Naik	16,67	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	4,64	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Naik	12,41	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Semua

Indikator ini menggambarkan persentase peserta didik di Pendidikan nonformal yang diukur berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

1) Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Semua

Data berikut menunjukkan peserta didik SMA Kesetaraan Negeri dan Swasta pada Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Lima Kabupaten/kota perlu didorong sedikit lagi agar peserta didik mampu mencapai kompetensi minimum. Walaupun secara umum capaiannya peserta didik mencapai kompetensi minimum dengan status sedang.

Tabel 3.4.99
Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Kurang	Naik	9,55	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Barat	Sedang	NA	NA	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Selatan	Sedang	Naik	24,94	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Tengah	Kurang	Naik	13,55	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung	Sedang	Naik	32,96	Peringkat atas (1-20%)
Kab. Belitung Timur	Sedang	Naik	14,10	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Sedang	Naik	16,23	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Negeri

Data berikut menunjukkan peserta didik SMA Kesetaraan Negeri pada Kabupaten Bangka Selatan belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Kabupaten Belitung perlu didorong sedikit lagi agar peserta didik mampu mencapai kompetensi minimum. Sementara Kota Pangkalpinang capaiannya peserta didik mencapai kompetensi minimum sudah dengan status baik.

Tabel 3.4.100
Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Selatan	Kurang	Naik	11,11	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Bangka Tengah	NA	NA	NA	NA
Kab. Belitung	Sedang	Naik	30,00	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	31,31	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Swasta

Data berikut menunjukkan peserta didik SMA Kesetaraan Swasta pada Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Pangkalpinang belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Empat Kabupaten/kota perlu didorong sedikit lagi agar peserta didik mampu mencapai kompetensi minimum. Walaupun secara umum capaiannya peserta didik mencapai kompetensi minimum dengan status sedang.

Tabel 3.4.101
Kompetensi Numerasi SMA Kesetaraan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Kurang	Naik	9,55	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Sedang	NA	NA	Peringkat menengah atas (21-40%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	26,68	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Tengah	Kurang	Naik	13,55	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Belitung	Sedang	Naik	35,61	Peringkat atas (1-20%)
Belitung Timur	Sedang	Naik	14,10	Peringkat menengah (41-60%)
Kota Pangkalpinang	Kurang	Naik	11,06	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Kualitas Pembelajaran

Indikator ini menggambarkan nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar. Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif dengan status capaian sedang tersebar di 5 Kabupaten dan kota Pangkalpinang.

Tabel 3.4.102
Kualitas Pembelajaran SMA Kesetaraan Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	0,39	Peringkat bawah (81-100%)
angka Barat	Baik	NA	NA	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	3,92	Peringkat menengah atas (21-40%)
Bangka Tengah	Sedang	Turun	1,33	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Belitung	Sedang	Turun	1,97	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung Timur	Sedang	Turun	2,56	Peringkat menengah (41-60%)
Pangkalpinang	Sedang	Naik	1,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah)

4. Partisipasi warga satuan Pendidikan

Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar merupakan indikator untuk mengetahui indikator ini. Satuan pendidikan jenjang SMA Kesetaraan baik negeri maupun swasta sudah melibatkan orang tua dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik. Bangka Tengah memiliki partisipasi dengan baik, namun partisipasi yang rendah berada di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3.4.103
Partisipasi warga satuan Pendidikan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Turun	0,63	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Sedang	Naik	NA	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Sedang	Turun	0,48	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Tengah	Baik	Turun	1,15	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung	Sedang	Naik	1,36	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung Timur	Kurang	Turun	34,00	Peringkat bawah (81-100%)
Pangkalpinang	Sedang	Turun	0,64	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

B. SMP KESETARAAN

1. Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Semua

Indikator ini merupakan persentase peserta didik pada jenjang SMP Kesetaraan berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Indikator ini memberikan informasi capaian literasi pada sekolah negeri dan swasta secara gabungan dan terpisah.

1) Kompetensi Literasi SMP Kesetaraan Semua

Data berikut menunjukkan peserta didik di SMP kesetaraan yang berada di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur baik negeri dan swasta telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dengan capaian baik. Upaya yang lebih diperlukan untuk mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi literasi minimum yang berada di 4 Kabupaten dan Kota Pangkalpinang.

Tabel 3.4.104
Kemampuan literasi SMPLB

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	2,68	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Sedang	Naik	16,67	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	3,30	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Tengah	Sedang	Naik	30,34	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung	Baik	Naik	3,90	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung Timur	Baik	Naik	6,35	Peringkat atas (1-20%)
Pangkalpinang	Sedang	Naik	19,74	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Literasi SMP Kesetaraan Negeri

Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Negeri merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SMP Kesetaraan Negeri yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan belajar masyarakat yang dikelola oleh pemerintah hanya tersedia datanya di 3 (Tiga) pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan peserta didik di Kota Pangkalpinang dan Bangka Selatan telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Sementara SMP Kesetaraan Negeri yang berada di Belitung perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.105
Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	NA	NA	NA	NA
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	Baik	Naik	33,33	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Tengah	NA	NA	NA	NA
Belitung	Sedang	Naik	3,14	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Baik	Naik	49,33	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Literasi SMP Kesetaraan Swasta

Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Swasta merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SMP yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Masyarakat atau dikenal dengan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Swasta menunjukkan peserta didik di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. PKBM di empat Kabupaten perlu didorong agar peserta didiknya mampu mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.106
Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	2,68	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Barat	Sedang	Naik	16,67	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	0,10	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Tengah	Sedang	Naik	30,34	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung	Baik	Turun	5,92	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung Timur	Baik	Naik	6,35	Peringkat atas (1-20%)
Pangkalpinang	Kurang	Naik	3,45	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Data menjelaskan bahwa sebagian besar peserta didik jenjang SMPLB baik negeri maupun swasta telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

1) Kompetensi Numerasi SMP Kesetaraan Semua

Data berikut menunjukkan peserta didik SMP Kesetaraan Negeri dan Swasta pada 6 kabupaten dan kota berstatus kompetensi minimum untuk numerasi sedang. Kabupaten Bangka Barat yang peserta didiknya mampu mencapai kompetensi minimum dengan baik.

Tabel 3.4.107
Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Negeri dan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	16,85	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Baik	Naik	51,92	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	20,91	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Tengah	Sedang	Naik	33,77	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung	Sedang	Naik	18,36	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung Timur	Sedang	Naik	1,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Pangkalpinang	Sedang	Naik	12,15	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Numerasi SMP Kesetaraan Negeri

Data berikut menunjukkan peserta didik SMP Kesetaraan Negeri pada Kabupaten Bangka Selatan dan Pangkalpinang telah mencapai kompetensi minimum yang baik untuk numerasi. Kabupaten Belitung perlu didorong sedikit lagi agar peserta didik mampu mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.108
Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Selatan	Baik	Naik	33,33	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Tengah	NA	NA	NA	NA
Kab. Belitung	Sedang	Naik	0,70	Peringkat bawah (81-100%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Kota Pangkalpinang	Baik	Naik	39,78	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Numerasi SMP Kesetaraan Swasta

Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Swasta menunjukkan peserta didik di Kabupaten Bangka Barat telah mencapai kompetensi minimum dengan baik untuk literasi. Sementara PKBM di 5 Kabupaten lainnya dan Kota Pangkalpinang perlu didorong agar peserta didiknya mampu mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.109
Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	16,85	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Baik	Naik	51,92	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Sedang	Naik	18,05	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Tengah	Sedang	Naik	33,77	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung	Sedang	Naik	23,71	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung Timur	Sedang	Naik	1,58	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Pangkalpinang	Kurang	Turun	3,05	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Kualitas Pembelajaran SMP Kesetaraan Semua

Indikator ini menggambarkan nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar. Capaian pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif berada di Kabupaten Bangka Barat dan Belitung Timur. Sementara di kabupaten/kota lainnya memiliki capaian cukup atau sedang.

Tabel 3.4.110
Kualitas Pembelajaran SMP Kesetaraan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Turun	0,98	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	Baik	Naik	18,51	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Sedang	Turun	1,27	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Tengah	Sedang	Naik	2,72	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung	Sedang	Turun	1,18	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung Timur	Baik	Naik	6,69	Peringkat menengah atas (21-40%)
Pangkalpinang	Sedang	Naik	0,32	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Partisipasi Warga Satuan Pendidikan

Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar merupakan indikator untuk mengetahui indikator ini. Satuan pendidikan jenjang SMP Kesetaraan sudah melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.

Tabel 3.4.111
Partisipasi Warga Satuan Pendidikan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Turun	3,29	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Bangka Barat	Baik	Naik	18,50	Peringkat atas (1-20%)
Bangka Selatan	Kurang	Turun	7,80	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Tengah	Sedang	Turun	0,85	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung	Kurang	Turun	14,73	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	Kurang	Turun	11,20	Peringkat menengah (41-60%)
Pangkalpinang	Kurang	Turun	5,43	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

C. SD KESETARAAN

1. Kemampuan literasi SD Kesetaraan

Indikator ini merupakan persentase peserta didik pada jenjang SD Kesetaraan, yang diukur berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

1) Kemampuan literasi SD Kesetaraan Semua

Data berikut menunjukkan peserta didik di SD Kesetaraan yang berada di tiga daerah telah mencapai kompetensi minimum dengan skor sedang untuk literasi namun perlu upaya peningkatan kembali karena penurunan skor dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta didik SD Kesetaraan negeri yang berada di Kota Pangkalpinang masih memiliki skor kurang bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.112
Kemampuan Literasi SD Kesetaraan Negeri dan Semua

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	15,00	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	7,14	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung	Sedang	Naik	29,17	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	7,15	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Literasi SD Kesetaraan Negeri

Data capaian kompetensi literasi SD Kesetaraan Negeri merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SD yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan belajar masyarakat yang dikelola oleh pemerintah hanya tersedia datanya di 2 (Dua) pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan peserta didik di Kota Pangkalpinang dan Belitung telah mencapai kompetensi minimum literasi dengan baik. Sementara SD Kesetaraan Negeri yang berada di Bangka Selatan perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.113
Kemampuan literasi SD Kesetaraan Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	NA	NA	NA	NA
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	NA	NA	NA	NA
Belitung	Baik	Naik	66,67	Peringkat menengah (41-60%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Baik	Naik	50,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Literasi SD Kesetaraan Swasta

Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Swasta merupakan kompetensi literasi peserta didik setingkat SMP yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Masyarakat atau dikenal dengan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Data capaian kompetensi literasi SMP Kesetaraan Swasta pada tabel 3.4.75 menunjukkan bahwa peserta didik di Kabupaten Belitung dan Pangkalpinang belum mencapai kompetensi minimum literasi, capaiannya masih kurang. PKBM di dua Kabupaten lainnya perlu didorong agar peserta didiknya mampu mencapai kompetensi minimum.

Tabel 3.4.114
Kemampuan literasi SMP Kesetaraan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Kab. Bangka	Sedang	Turun	15,00	Peringkat menengah atas (21-40%)
Kab. Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Kab. Bangka Tengah	Sedang	Turun	7,14	Peringkat menengah (41-60%)
Kab. Belitung	Kurang	NA	NA	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Kab. Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Kota Pangkalpinang	Kurang	Turun	100,00	Peringkat bawah (81-100%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2. Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

1) Kompetensi Numerasi SD Kesetaraan Semua

Data pada table 3.4.76 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik jenjang SD Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Bangka Tengah telah mencapai kompetensi numerasi sudah baik, namun Belitung masih rendah.

Tabel 3.4.115
Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	Baik	Naik	57,14	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung	Kurang	Turun	41,67	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

2) Kompetensi Numerasi SD Kesetaraan Negeri

Data pada table 3.4.77 tersedia data capaian kompetensi numerasi peserta didik di SD Kesetaraan yang dikelola pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik jenjang SD Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Belitung dan Pangkalpinang masih banyak yang belum mencapai kompetensi numerasi. Beberapa kabupaten lainnya berstatus NA yang artinya data tidak tersedia dikarenakan tidak mengikuti asesmen nasional.

Tabel 3.4.116
Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan Negeri

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	NA	NA	NA	NA
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	NA	NA	NA	NA
Belitung	Kurang	Turun	33,34	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Sedang	Naik	16,67	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3) Kompetensi Numerasi SD Kesetaraan Swasta

Data capaian kompetensi literasi SD Kesetaraan Swasta merupakan kompetensi numerasi peserta didik setingkat SMP yang kegiatan belajarnya dikelola oleh Masyarakat atau dikenal dengan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM). Data capaian kompetensi numerasi SD Kesetaraan Swasta pada tabel 3.4.78 menunjukkan bahwa peserta didik di Kabupaten Belitung dan Pangkalpinang belum mencapai kompetensi minimum numerasi, capaiannya masih kurang. PKBM di Kabupaten Bangka perlu didorong agar peserta didiknya mampu mencapai kompetensi ini

Tabel 3.4.117
Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan Swasta

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Naik	60,00	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	Baik	Naik	57,14	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung	Kurang	NA	NA	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Kurang	Naik	25,00	Peringkat menengah bawah (61-80%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

3. Kualitas Pembelajaran SD Kesetaraan

Indikator ini menggambarkan nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar. Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif tersebar di Kabupaten Bangka masih kurang. Sementara Bangka Tengah, Belitung dan kota Pangkalpinang memiliki capaian cukup atau sedang.

Tabel 3.4.118
Kualitas Pembelajaran SD Kesetaraan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Kurang	Turun	19,78	Peringkat bawah (81-100%)
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	Sedang	Naik	1,95	Peringkat menengah atas (21-40%)
Belitung	Sedang	Naik	1,27	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Sedang	Naik	1,10	Peringkat menengah (41-60%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

4. Partisipasi Warga Satuan Pendidikan

Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar merupakan indikator untuk mengetahui indikator ini. Satuan pendidikan jenjang SD Kesetaraan sudah melibatkan orang tua dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kabupaten Bangka Tengah masih memiliki partisipasi yang rendah. Sementara Kabupaten lainnya harus didorong berbagai stakeholder untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ini.

Tabel 3.4.119
Partisipasi Warga Satuan Pendidikan SD Kesetaraan

Kab/Kota	Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Skor Perubahan dari Tahun Lalu	Peringkat di Provinsi
Bangka	Sedang	Turun	4,91	Peringkat menengah (41-60%)
Bangka Barat	NA	NA	NA	NA
Bangka Selatan	NA	NA	NA	NA
Bangka Tengah	Kurang	Turun	21,63	Peringkat menengah bawah (61-80%)
Belitung	Sedang	Naik	4,71	Peringkat bawah (81-100%)
Belitung Timur	NA	NA	NA	NA
Pangkalpinang	Sedang	Turun	1,56	Peringkat menengah atas (21-40%)

Sumber: Rapor Pendidikan KemendikbudRistekDikti, tahun 2024 (Diolah).

BAB IV PENUTUP

Buku ini menyajikan berbagai indikator makro di bidang pendidikan, terutama indikator yang mencerminkan manfaat pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Selain itu, turut disajikan indikator makro lainnya yang meliputi angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, serta capaian rata-rata literasi dan numerasi. Keseluruhan indikator tersebut merupakan elemen penting dalam memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan dokumen perencanaan pendidikan tahunan, sekaligus menjadi landasan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pendidikan.

Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan buku data dan informasi pendidikan ini. Dengan menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan buku ini dapat berfungsi sebagai rujukan utama bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung proses perencanaan dan perumusan kebijakan pendidikan. Penyusunan buku ini juga disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan serta ketersediaan data yang ada.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya komitmen para penanggung jawab data, pemanfaatan peran pegawai yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta perlunya peningkatan dalam proses konsolidasi dan rekonsiliasi data. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan berupa penguatan dukungan dari seluruh penanggung jawab data, peningkatan kapasitas dan peran sumber daya manusia dalam tim penyusun data dan informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap keseluruhan proses penyusunan data.